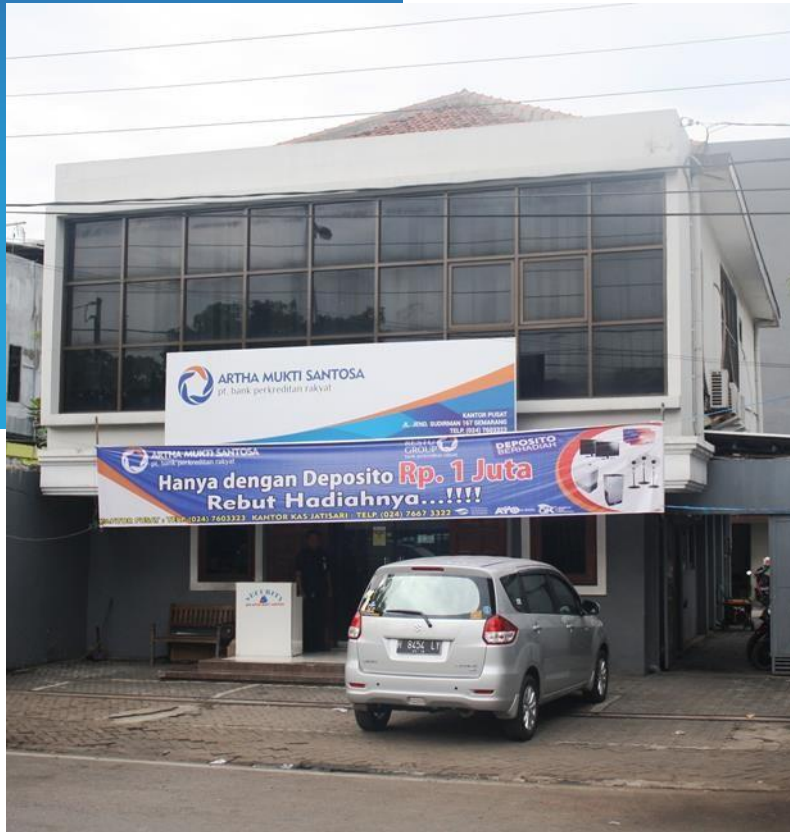
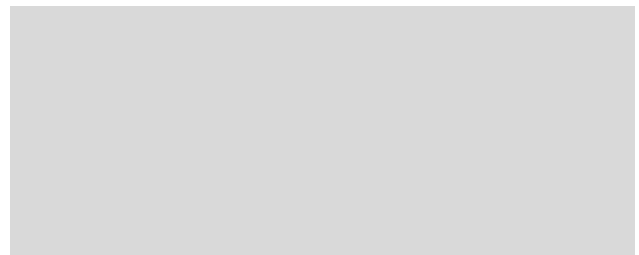




LAPORAN TAHUNAN 2024



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga PT BPR Artha Mukti Santosa dapat melalui tahun 2024 dengan pencapaian yang patut disyukuri. Laporan Tahunan ini kami susun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan, sekaligus sebagai dokumentasi atas perjalanan, tantangan, dan keberhasilan yang telah kami lalui bersama.

Di tengah kondisi ekonomi yang dinamis dan persaingan industri perbankan yang semakin kompetitif, kami terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembiayaan yang berkelanjutan. Keberhasilan yang kami raih tidak lepas dari sinergi seluruh elemen perusahaan, kepercayaan nasabah, serta arahan dari pemegang saham dan regulator.

Laporan ini tidak hanya mencerminkan hasil kerja selama satu tahun, tetapi juga menjadi fondasi untuk menatap masa depan dengan lebih optimis. Kami menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks, namun dengan semangat inovasi, integritas, dan kerja sama, kami yakin PT BPR Artha Mukti Santosa akan mampu terus bertumbuh dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan. Semoga laporan ini memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai kondisi dan arah strategis perusahaan.

Semarang, April 2025
PT BPR Artha Mukti Santosa

FORM A.01.01

DATA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama	Jabatan	Tanggal Mulai Menjabat	Tanggal Selesai Menjabat	Surat Persetujuan		Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Tanggal Berakhir Masa Berlaku Sertifikat Kompetensi Kerja	Pendidikan Formal			Pendidikan Non Formal			Keanggotaan Komite				Membawahkan Fungsi	Komisaris Independen
				No. SK	Tanggal SK			Pendidikan Terakhir	Tanggal Kelulusan	Nama Lembaga	Jenis Pelatihan Terakhir	Tanggal Pelatihan	Lembaga Penyelenggara	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan	Komite Manajemen Risiko	(Ya /Tidak)	(Ya /Tidak)
Toto Wijatmiko	Direktur Utama	04-04-2022	04-04-2027	S-200/KR.0313/2022	05-04-2022	Ya	12-04-2027	S1	05-11-2001	STIE Dharma Putra	Sertifikasi Direktur BPR	12-04-2022	LSP CERTIF	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
Yuni Mardiati	Direktur YMKF	15-11-2020	15-11-2025	S-546/KR.0313/2020	05-11-2020	Ya	08-12-2025	S2	29-09-2020	Universitas Semarang	Sertifikasi Direktur BPR	08-12-2020	LSP CERTIF	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	
Catur Budi Pamungkas	Komisaris Utama	23-06-2023	23-06-2028	SR-48/KR.0313/2023	26-05-2023	Ya	23-06-2028	S1	01-12-2004	UDINUS Semarang	Sertifikasi Komisaris BPR	25-10-2021	LSP CERTIF	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak		Tidak
Andri Eko Harseno	Komisaris	22-07-2024	22-07-2029	004/SKDIR/AMS/2024	19-07-2024	Ya	19-12-2028	S1	13-12-2008	STEKOM Semarang	Sertifikasi Komisaris BPR	19-12-2023	LSP CERTIF	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak		Tidak

FORM A.01.02

DATA PEJABAT EKSEKUTIF BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama	Jabatan					Tanggal Mulai Menjabat	Surat Pengangkatan		Keanggotaan Komite				Keterangan Jabatan
	Kepatuhan	Manajemen Risiko	Audit Intern	APU, PPT, dan/atau PPSPM	Fungsi Lainnya		No	Tanggal	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	
Petrus Joko Santoso	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	08-01-2024	SKDIR 01/SKDIR/BPRAMS/HRC-I/24	08-01-2024	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Manajer Marketing
Subiyanti	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	18-03-2013	SK DIR NO 01/2013	18-03-2013	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Kepala Cabang
Winda Trisnawati	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	01-02-2019	SK DIR NO 01/HRC-II/19	01-02-2019	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Manajer Operasional
Hertanto	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya	09-04-2012	SK DIR NO 001/SK-DIR/2022	03-01-2022	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Manajer Remedial
Dwi Retno Andayani	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	09-04-2018	SK DIR NO 002/2018	09-04-2018	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	PE Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT PPSPM
Sketsa Damar Prabowo	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	Tidak	06-06-2022	SK DIR NO 004/SK-DIR/2022	06-06-2022	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	PE Audit Internal

FORM A.02.02

DATA KEPEMILIKAN BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama	Status	Jumlah Nominal	Persentase Kepemilikan
PT Yasaniaga Utama Mulia	Pemegang Saham Pengendali	2,000,000,000	50.00%
Irma Wardhani	Pemegang Saham	2,000,000,000	50.00%

FORM A.03.01

RIWAYAT PENDIRIAN BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Informasi	Keterangan
Nomor Akta Pendirian	3
Tanggal Akta Pendirian	17-05-2004
Nomor Perubahan Anggaran Dasar Terakhir	9
Tanggal Perubahan Anggaran Dasar Terakhir	06-09-2024
Nomor Pengesahan dari Instansi yang Berwenang	6/70/KEP.BI/2004
Tanggal Pengesahan dari Instansi yang Berwenang	08-09-2004
Tanggal Mulai Pelaksanaan Kegiatan Usaha	23-09-2004
Bidang Usaha sesuai Anggaran Dasar	Perbankan - Bank Perekonomian Rakyat
Tempat Kedudukan	Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

FORM A.03.02

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PENTING

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Rekening	Jumlah
Pendapatan Operasional	12,280,401,272
Beban Operasional	9,827,920,518
Pendapatan Non Operasional	101,202,256
Beban Non Operasional	51,028,150
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	2,502,654,860
Taksiran Pajak Penghasilan	440,492,046
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2,062,162,814

FORM A.03.03
KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN RASIO KEUANGAN
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Aset Produktif	Posisi Tanggal Laporan					
	L	DPK	KL	D	M	Total
Surat Berharga	0	0	0	0	0	0
Penyertaan Modal	0	0	0	0	0	0
Penempatan pada Bank Lain	18,839,508,225					18,839,508,225
Kredit yang Diberikan						0
a. Kepada BPR	0	0				0
b. Kepada Bank Umum	0	0				0
c. Kepada Nonbank - Pihak Terkait	116,165,600	288,017,600				404,183,200
d. Kepada Nonbank - Pihak Tidak Terkait	31,855,568,408	9,590,261,659	2,023,888,500	654,131,200	4,713,716,463	48,837,566,230
Jumlah Aset Produktif	50,811,242,233	9,878,279,259	2,023,888,500	654,131,200	4,713,716,463	68,081,257,655

Jenis Rasio	Nilai Rasio (%)
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	77.88
Rasio Cadangan terhadap PPKA	100.00
Non Performing Loan (NPL) Neto	14.40
Non Performing Loan (NPL) Gross	15.01
Return on Assets (ROA)	3.73
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80.03
Net Interest Margin (NIM)	12.77
Loan to Deposit Ratio (LDR)	107.72
Cash Ratio	12.14

FORM A.03.04

PENJELASAN MENGENAI NPL

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Kategori	Uraian
Penyebab Utama	Kinerja kredit bermasalah BPR pada 2024 ini senilai 15.01% mengalami peningkatan 7.15% dari kinerjanya pada 2023. Penyebab utama dari penurunan kinerja kredit bermasalah BPR pada tahun 2024 adalah: - Adanya salah satu Debitur Inti yang dari tahun 2023 belum dapat terselesaikan yaitu atas nama Soelistyaningsih yang mempengaruhi NPL sebesar 4.41%, dimana fasilitas tersebut merupakan kredit sindikasi dengan BPR Restu Artha Makmur, BPR Restu Klepu Makmur, dan BPR Restu Artha Abadi; - Terdapat penurunan kinerja kredit bermasalah di wilayah pemasaran Kaliwungu, Kendal sebesar 2.93% dan Semarang Tengah, Kota Semarang sebesar 1.02%. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki 3 NPL tertinggi adalah Baturetno, Wonogiri sebesar 4.41%, Kaliwungu, Kendal sebesar 2.93% dan Tersono, Batang sebesar 1.29%; - Dilihat dari sektor ekonominya yang perlu menjadi perhatian adalah Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Toko, Peternakan Unggas, serta Aktivitas Hukum dan Akuntansi, dimana ketiga sektor ekonomi tersebut dibandingkan tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan masing-masing sebesar 2.45%, 1.39%, dan 1.07%. Sedangkan pada tahun 2024 ini terdapat 3 sektor ekonomi dengan kinerja kredit bermasalah yang berpengaruh secara signifikan yaitu Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat dan Produk YBDI sebesar 4.41%, Perdagangan Eceran Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Toko sebesar 3.28% dan Peternakan Unggas sebesar 1.46%; - Kinerja kredit bermasalah berdasarkan tujuan kredit yang terbesar berasal dari modal kerja dengan nilai NPL sebesar 13.36%; - Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana secara tidak langsung hal tersebut mempengaruhi kinerja ekonomi secara nasional, sehingga mempengaruhi kinerja beberapa sektor ekonomi.
Langkah Penyelesaian	Peningkatan rasio kredit bermasalah selama tahun 2024 menjadi perhatian serius bagi manajemen, karena berpengaruh langsung terhadap kualitas aset dan kinerja keuangan BPR secara keseluruhan. Meskipun tantangan eksternal dan dinamika usaha debitur turut berperan, BPR Artha Mukti Santosa tetap berkomitmen untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Berbagai langkah strategis telah dan sedang dijalankan, mulai dari penguatan sistem monitoring, restrukturisasi kredit, hingga tindakan hukum terhadap debitur yang tidak kooperatif. Diharapkan, upaya tersebut mampu mengendalikan rasio NPL ke level yang lebih sehat dan menjaga keberlangsungan usaha BPR secara jangka panjang. Ke depan, BPR akan terus memperkuat analisa kredit, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perkreditan, serta memperluas penggunaan teknologi informasi untuk deteksi dini risiko. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan disiplin manajemen risiko yang kuat, BPR optimis dapat memulihkan kualitas kredit dan meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

PERKEMBANGAN USAHA YANG BERPENGARUH SECARA SIGNIFIKAN DAN PERUBAHAN PENTING LAIN

Nama BPR : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 2024

Perkembangan yang terjadi pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh Secara Signifikan

Pada tahun buku 2024, BPR Artha Mukti Santosa menghadapi sejumlah tantangan eksternal maupun internal yang berdampak pada penurunan kinerja usaha secara umum. Penurunan ini menjadi perhatian serius bagi manajemen untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan guna memastikan keberlanjutan usaha di masa mendatang.

1. Kinerja Kredit Bermasalah

Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) mengalami peningkatan menjadi 15,01%, melebihi batas ideal yang ditetapkan regulator. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya kemampuan bayar sebagian debitur akibat tekanan ekonomi, terutama di sektor perdagangan eceran dan perdagangan unggas.

Selama periode 2022–2024, tingkat risiko kredit yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini terjadi di seluruh jenis kredit, dengan dominasi pada kredit modal kerja dan investasi.

a. Modal Kerja

NPL kredit modal kerja menunjukkan tren kenaikan dari 7,37% di tahun 2022 menjadi 20,92% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan peningkatan risiko pada sektor usaha produktif, yang kemungkinan dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi, melemahnya permintaan pasar, serta penurunan kualitas pembayaran debitur.

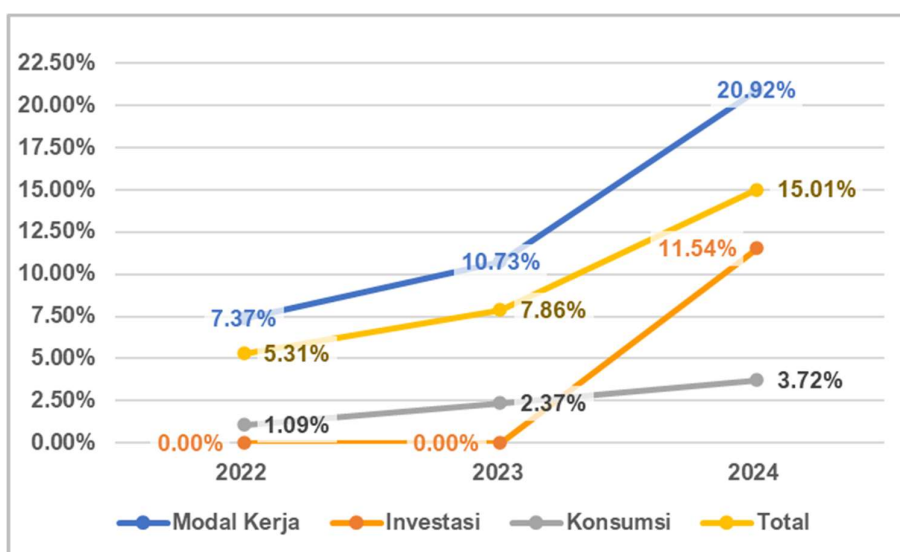
b. Investasi

Tercatat tidak memiliki kredit bermasalah pada tahun 2022 dan 2023, namun melonjak drastis menjadi 11,54% pada tahun 2024. Kenaikan yang signifikan ini perlu diantisipasi dengan evaluasi menyeluruh terhadap proses analisis dan pemantauan kredit investasi, karena sifatnya yang jangka panjang dan berisiko tinggi jika tidak dikendalikan dengan baik.

c. Konsumsi

NPL kredit konsumsi juga meningkat secara bertahap dari 1,09% pada 2022 menjadi 3,72% pada 2024. Meskipun masih dalam batas wajar, tren kenaikan ini mengindikasikan potensi tekanan daya bayar nasabah sektor rumah tangga.

Secara agregat, total NPL meningkat dari 5,31% di tahun 2022 menjadi 15,01% di tahun 2024. Nilai ini sudah melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh OJK (maksimal 5% untuk BPR), sehingga menjadi perhatian serius bagi manajemen. Berikut adalah grafik batang perkembangan kinerja NPL dalam kurun waktu 3 tahun terakhir:



Tindak lanjut dan strategi penanganan yang dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko, BPR Artha Mukti Santosa akan menempuh langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- a. Penelusuran dan Analisa Akar Permasalahan
 - i. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap portofolio kredit untuk mengidentifikasi penyebab kenaikan NPL secara segmentatif (jenis usaha, sektor ekonomi, wilayah, atau jaminan).
 - ii. Memetakan debitur bermasalah berdasarkan tingkat risiko dan potensi pemulihan.
- b. Pengetatan Proses Penagihan dan Pemulihan
 - i. Meningkatkan intensitas penagihan melalui tim kolektor lapangan, reminder otomatis, dan kunjungan personal.

- ii. Melakukan renegotiasi skema pembayaran dengan pendekatan persuasif, guna mendorong kelancaran angsuran kembali.
 - iii. Menerapkan strategi penagihan yang berbasis kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mengedepankan prinsip keadilan serta tanggung jawab sosial.
- c. Pendekatan Persuasif kepada Debitur
 - i. Melakukan komunikasi intensif dengan debitur melalui kunjungan langsung (*field collection*), surat pemberitahuan, maupun telepon.
 - ii. Memberikan pemahaman mengenai kewajiban penyelesaian kredit dan konsekuensi atas keterlambatan pembayaran.
- d. Penguatan Sistem Monitoring dan Early Warning
 - i. Mengoptimalkan sistem informasi kredit untuk memberikan peringatan dini terhadap potensi kredit bermasalah.
 - ii. Menetapkan prosedur mitigasi lebih awal agar kredit tidak berkembang menjadi NPL.
- e. Restrukturisasi Kredit Secara Selektif
 - i. Menawarkan program restrukturisasi bagi debitur terdampak namun masih menunjukkan prospek pembayaran, dengan prinsip kehati-hatian dan analisis kelayakan.
 - ii. Bentuk restrukturisasi meliputi penyesuaian jangka waktu, penurunan suku bunga, atau penjadwalan ulang pembayaran.
- f. Penyelesaian Melalui Jalur Hukum
 - i. Apabila langkah persuasif dan restrukturisasi tidak membuahkan hasil, BPR akan mengambil tindakan hukum sesuai prosedur, termasuk penyitaan jaminan atau pelaksanaan lelang aset dan gugatan sederhana.
 - ii. Berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam proses penyelesaian aset yang dijamin.
- g. Evaluasi dan Penguatan Manajemen Risiko
 - i. Melakukan evaluasi terhadap proses kredit dan penyebab timbulnya NPL untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
 - ii. Memperkuat sistem manajemen risiko kredit melalui peningkatan analisis kelayakan dan monitoring yang lebih ketat.
- h. Evaluasi dan Pengetatan Pemberian Kredit Baru

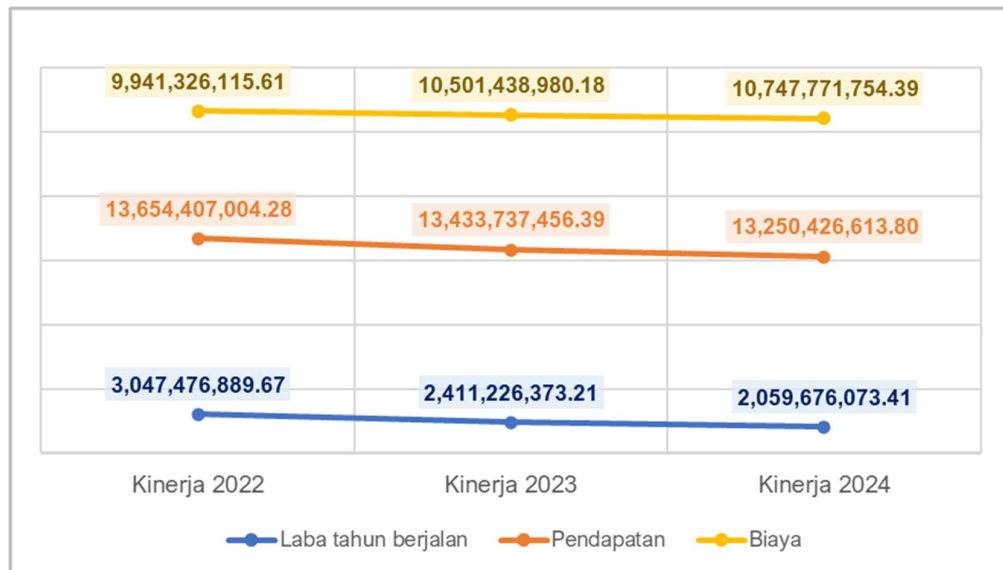
- i. Peninjauan kembali kebijakan kredit dengan fokus pada sektor yang terbukti resilient dan debitur yang memiliki reputasi baik.
 - ii. Meningkatkan kualitas analisa kredit terutama untuk sektor usaha berisiko tinggi dan memperketat persyaratan agunan.
- i. Peningkatan Kualitas SDM Kredit
- Memberikan pelatihan intensif kepada petugas analis kredit dan tim kolektor agar lebih responsif, komunikatif, dan memiliki pendekatan yang solutif.

2. Kinerja Kemampulabaan

Pada tahun 2024, BPR Artha Mukti Santosa membukukan kemampulabaan sebesar Rp2.059.676.073,00 dan mencatatkan penurunan laba sebesar 14,58% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BPR. Penurunan laba terutama disebabkan oleh:

- a. Peningkatan biaya operasional sebesar 2,18%, yang terkait dengan pembentukan PPAP kredit dan investasi aset tetap dalam bentuk gedung dalam rangka perbaikan pelayanan sehingga secara tidak langsung meningkatkan nilai penyusutan aset dan inventaris.
- b. Melambatnya pertumbuhan penyaluran kredit produktif akibat kondisi ekonomi lokal yang belum sepenuhnya pulih, serta kehati-hatian manajemen dalam menjaga kualitas portofolio kredit.
- c. Penurunan pendapatan bunga bersih seiring dengan menurunnya pendapatan bunga dan meningkatnya biaya bunga.

Meski demikian, manajemen tetap menjaga fundamental keuangan yang sehat, dengan fokus pada efisiensi, peningkatan pendapatan non-bunga, dan penguatan manajemen risiko. Penurunan laba sebelum CKPN ini juga menjadi refleksi dari upaya kehati-hatian yang lebih besar dalam menyikapi risiko penurunan kualitas aset dan menjaga stabilitas jangka panjang. Berikut kami sajikan grafik kinerja kemampulabaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir:



Dari hasil analisa terkait kinerja kemampuan, untuk kedepannya BPR Artha Mukti Santosa akan terus melakukan penyesuaian strategi usaha dan pengendalian biaya guna mendorong pemulihan kinerja laba yang berkelanjutan.

3. Kinerja Efisiensi Operasional

Selama tahun 2024, BPR Artha Mukti Santosa mengalami penurunan efisiensi operasional, yang ditunjukkan oleh peningkatan rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dari 75,38% pada tahun 2023 menjadi 80,03% di tahun 2024. Kenaikan rasio ini mencerminkan bahwa proporsi biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan mengalami peningkatan, sehingga menekan margin laba operasional.

Peningkatan BOPO tersebut terutama dipengaruhi oleh:

- Kenaikan beban operasional, termasuk biaya SDM dan pencadangan penghapusan aktiva produktif.
- Beban penyusutan dan administrasi yang meningkat seiring pembelian aset tetap berupa gedung kantor dalam rangka perbaikan pelayanan.
- Sementara itu, pendapatan operasional tumbuh namun tidak secepat pertumbuhan biaya, akibat masih terbatasnya ruang ekspansi kredit dan persaingan suku bunga yang ketat.

Manajemen menyadari pentingnya menjaga efisiensi sebagai bagian dari keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, ke depan akan dilakukan upaya penguatan manajemen biaya, pengembangan layanan digital, dan peningkatan produktivitas, agar rasio BOPO dapat kembali ditekan ke level yang lebih sehat dan kompetitif.

Meskipun menghadapi berbagai tekanan tersebut, manajemen tetap berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah pemulihan, termasuk melalui perbaikan manajemen risiko, penataan kembali portofolio kredit, serta penguatan hubungan dengan nasabah. Strategi pemulihan juga melibatkan pengembangan produk dan layanan baru, digitalisasi, serta penguatan kapasitas internal.

B. Perubahan Penting Lainnya

Tahun 2024 menjadi periode yang penuh tantangan sekaligus momentum strategis bagi BPR Artha Mukti Santosa dalam menjalankan transformasi yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Di luar aspek keuangan utama, BPR turut mencatat sejumlah perubahan signifikan yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja operasional, tata kelola, dan pelayanan kepada nasabah. Perubahan-perubahan ini mencerminkan komitmen BPR dalam menjawab dinamika industri keuangan yang terus berkembang, sekaligus memperkuat pondasi menuju pertumbuhan jangka panjang yang sehat dan berdaya saing.

1. Perubahan Nomenklatur

Seiring dengan perkembangan industri perbankan serta arah kebijakan regulasi nasional yang mendukung penguatan peran lembaga keuangan mikro, pada tahun 2024 dilakukan perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

Perubahan ini didasari oleh semangat untuk memperluas cakupan makna dan fungsi BPR dalam mendukung pembangunan ekonomi rakyat. Istilah “Perkreditan” yang selama ini melekat dinilai kurang mencerminkan secara utuh berbagai layanan dan peran BPR, yang tidak hanya terbatas pada pemberian kredit, tetapi juga mencakup kegiatan penghimpunan dana, edukasi keuangan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dengan perubahan nama ini, BPR tidak hanya diposisikan sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak perekonomian rakyat yang lebih luas. Nama baru ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih inklusif, memperkuat citra kelembagaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran dan kontribusi BPR dalam pembangunan ekonomi lokal.

BPR Artha Mukti Santosa menyambut perubahan nomenklatur ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik,

meningkatkan akses keuangan masyarakat, dan menjadi mitra strategis bagi pelaku UMKM dan ekonomi kerakyatan.

Untuk itu pada tanggal 21 Oktober 2024, BPR Artha Mukti Santosa resmi melakukan perubahan nomenklatur ditegaskan dengan Keputusan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 Nomor KEP-7/KO.132/2024. Perubahan nama ini merupakan bagian dari penyesuaian identitas hukum dan kelembagaan untuk mendukung strategi transformasi serta penguatan tata kelola perusahaan.

Dengan keputusan tersebut, nomenklatur PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mukti Santosa diubah menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Mukti Santosa, yang berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya keputusan oleh OJK. Perubahan ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan diumumkan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen BPR untuk terus berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat posisi di industri perbankan, khususnya di sektor Bank Perkreditan Rakyat.

2. Pembelian Aset Tetap

Sebagai bagian dari upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkauan operasional, pada tahun 2024 BPR Artha Mukti Santosa telah melakukan pembelian gedung baru di sebelah Kantor Cabang Weleri. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen BPR dalam memperkuat infrastruktur pendukung layanan perbankan yang lebih modern, nyaman, dan responsif terhadap kebutuhan nasabah.

Gedung baru ini dirancang untuk menunjang operasional yang lebih efisien serta menjadi pusat layanan yang representatif, sekaligus memperluas kapasitas layanan kepada masyarakat. Dengan adanya fasilitas baru ini, BPR berharap dapat memberikan pengalaman layanan yang lebih optimal, memperkuat citra kelembagaan, serta mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Investasi ini mencerminkan keyakinan manajemen terhadap potensi pertumbuhan jangka panjang dan komitmen untuk terus melakukan pembenahan internal demi mewujudkan pelayanan yang prima dan terpercaya.

3. Perubahan Alamat Kantor Cabang

Seiring dengan pembelian gedung tersebut, BPR juga melakukan perubahan alamat kantor cabang dari sebelumnya di Jalan Utama Timur, Ruko Griya Weleri

Makmur Asri A1, Weleri, Kabupaten Kendal menjadi Jalan Utama Timur, Ruko Griya Weleri Makmur Asri A1-A2, Weleri, Kabupaten Kendal, yang mulai berlaku efektif sejak 10 Februari 2025. Perubahan alamat kantor Cabang tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan Nomor Surat S-27/KO.132/2025 tertanggal 04 Februari 2025. Perubahan lokasi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, menciptakan kenyamanan yang lebih baik bagi nasabah, serta mendukung efisiensi operasional secara keseluruhan.

Langkah ini mencerminkan komitmen BPR Artha Mukti Santosa dalam memberikan pelayanan prima, memperkuat fondasi pertumbuhan usaha, dan terus beradaptasi terhadap perkembangan kebutuhan pasar serta lingkungan bisnis.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Nama BPR : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 2024

Dalam upaya menjaga kesinambungan pertumbuhan serta memperkuat daya saing, BPR Artha Mukti Santosa menerapkan berbagai strategi dan kebijakan manajemen yang terarah dan adaptif sepanjang tahun 2024. Strategi tersebut disusun dengan mempertimbangkan dinamika pasar, karakteristik nasabah, serta perkembangan regulasi dan teknologi di sektor jasa keuangan.

Beberapa strategi dan kebijakan utama yang dijalankan antara lain:

1. Penguatan fokus pada segmen UMKM

Bank terus memprioritaskan penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan pendekatan layanan yang lebih fleksibel, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Strategi ini juga didukung oleh pelatihan dan pendampingan usaha guna meningkatkan kualitas debitur.

2. Peningkatan Efisiensi Operasional

Manajemen melakukan penyempurnaan proses bisnis melalui digitalisasi internal, optimalisasi struktur organisasi, dan efisiensi biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan.

3. Penguatan Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Untuk menjaga kesehatan portofolio kredit dan keberlanjutan usaha, kebijakan penyaluran kredit diperketat dengan pendekatan manajemen risiko yang lebih disiplin, termasuk monitoring kredit secara berkala dan penerapan prinsip kehati-hatian.

4. Strategi Penghimpunan Dana yang Kompetitif

Dalam menghadapi persaingan ketat dalam penghimpunan dana pihak ketiga, BPR menetapkan strategi bunga yang kompetitif dan menawarkan produk simpanan yang menarik serta mudah diakses oleh masyarakat.

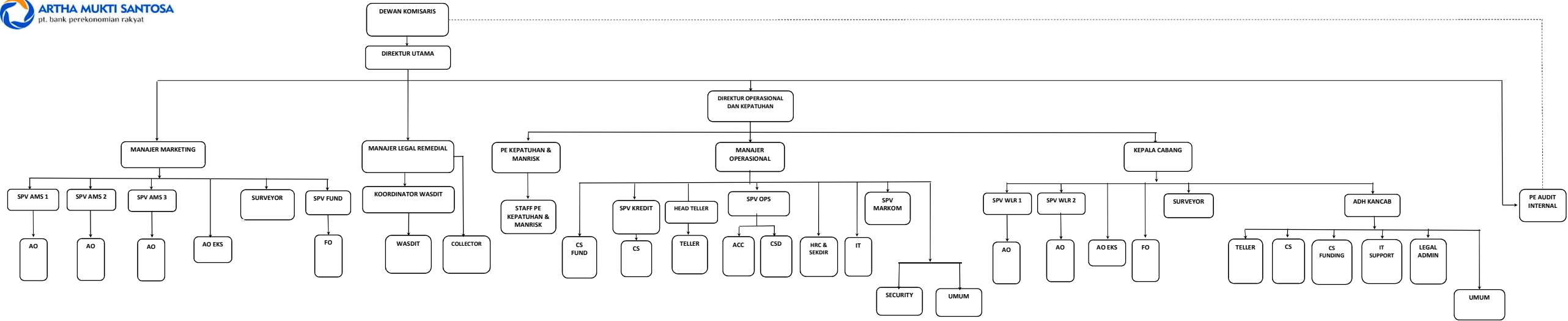
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Budaya Kerja

BPR Artha Mukti Santosa menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai pilar utama, melalui pelatihan berkelanjutan, sistem evaluasi kinerja yang adil, serta penciptaan budaya kerja yang produktif dan berintegritas.

6. Ekspansi dan Penguatan Jaringan Layanan

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan menjangkau pasar yang lebih luas, BPR melakukan peningkatan sarana dan prasarana layanan di kantor cabang demi memberikan pelayanan prima kepada nasabah.

Melalui strategi dan kebijakan tersebut, BPR Artha Mukti Santosa terus berkomitmen untuk tumbuh secara berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, serta berkontribusi aktif terhadap penguatan ekonomi lokal.



FORM A.05.02

BIDANG USAHA

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
Penghimpunan Dana	Produk Dasar	Tabungan Wajib Restu	Tabungan Wajib Restu diperuntukkan bagi nasabah kredit, dimana transaksi pencairan dana dan angsuran dilakukan pada produk tabungan ini. Namun produk ini juga bisa dimanfaatkan seperti Tabungan Restu.
Penghimpunan Dana	Produk Dasar	Tabungan Restu	Tabungan Restu diperuntukkan bagi masyarakat umum yang berkeinginan menyimpan dananya di BPR. Produk tabungan ini untuk pengambilan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu selama jam operasional BPR. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi. Namun jika jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun tidak terdapat transaksi akan dikenakan biaya rekening dormant sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
Penghimpunan Dana	Produk Dasar	Tabungan Simapan	Tabungan Simapan adalah tabungan berjangka yang dipergunakan bagi masyarakat umum yang ingin merencanakan kebutuhannya di masa datang. Produk ini memiliki pilihan jangka waktu seperti halnya deposito yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Kelebihan dari produk ini adalah adanya undian berhadiah di setiap tahunnya untuk nasabah yang rekeningnya masih aktif hingga akhir tahun dan suku bunga yang menarik dibandingkan dengan suku bunga produk tabungan yang lain.
Penghimpunan Dana	Produk Dasar	Tabungan Sifitri	Tabungan Sifitri adalah tabungan momentum dengan jangka waktu 12 bulan yang diperuntukan tidak hanya untuk umat muslim namun untuk masyarakat umum. Tabungan ini bermanfaat bagi Nasabah yang ingin menyisihkan sebagian uangnya untuk mempersiapkan kebutuhan di hari raya Idul Fitri. Produk ini tidak diberikan bunga namun di setiap akhir periode, BPR akan memberikan bingkisan berupa voucher maupun parcel.
Penghimpunan Dana	Produk Dasar	Tabungan Qurban	Tabungan Qurban adalah tabungan yang diperuntukan bagi umat muslim yang ingin merencanakan untuk berqurban, dimana Nasabah dapat memilih sendiri jangka waktu dan/atau jenis hewan qurbannya. Ketika akhir periode Nasabah akan diberikan uang tunai dan pengembangan jasa.
Penghimpunan Dana	Produk Dasar	Tabungan Karyawan	Tabungan Karyawan adalah tabungan yang diperuntukan untuk Karyawan BPR.
Penghimpunan Dana	Produk Dasar	Tabungan Sitaru	Tabungan Sitaru kepanjangan dari "Tabungan Tahun Baru" adalah tabungan berjangka diperuntukan bagi masyarakat umum, dimana pencairan tabungan dilakukan di awal tahun. Tabungan ini tidak diberikan bunga namun diberikan bingkisan berupa parcel.
Penghimpunan Dana	Produk Dasar	Tabungan Harmoni	Tabungan Harmoni adalah tabungan berjangka merupakan kerjasama dengan 2 BPR Restu lainnya yaitu BPR Restu Artha Makmur dan BPR Restu Mranggen Makmur. Produk tabungan ini merupakan tabungan berhadiah dengan sistem tarikan seperti halnya arisan, bagi Nasabah yang beruntung mendapat hadiah grandprize pada setiap periode tarikan maka Nasabah tersebut tidak melanjutkan kembali, namun bagi Nasabah yang tidak beruntung hingga akhir periode akan diberikan pengembangan produk berupa bunga tabungan. Setoran untuk produk ini hanya di awal ketika Nasabah melakukan penempatan yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

FORM A.05.02
BIDANG USAHA
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Kategori Kegiatan Usaha	Jenis Produk	Nama Produk	Uraian
Penghimpunan Dana	Produk Dasar	Tabungan Tarisa 8	Tabungan Tarisa 8 adalah tabungan berjangka dengan jangka waktu 12 bulan. Produk tabungan ini merupakan tabungan berhadiah dengan sistem tarikan, bagi Nasabah yang beruntung mendapat hadiah grandprize pada setiap periode tarikan maka Nasabah tersebut tidak melanjutkan kembali, namun bagi Nasabah yang tidak beruntung hingga akhir periode akan diberikan pengembangan produk berupa bunga tabungan. Setoran untuk produk ini hanya di awal ketika Nasabah melakukan penempatan yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
Penghimpunan Dana	Produk Dasar	Tabungan Simpel	Tabungan Simpel kepanjangan dari Tabungan Simpanan Pelajar merupakan tabungan yang ditujukan khusus untuk pelajar Indonesia yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP. Tujuannya adalah untuk memberikan edukasi dan inklusi keuangan sejak dini, serta mendorong budaya menabung di kalangan pelajar. Tabungan ini merupakan program dari Otoritas Jasa Keuangan, dimana setiap perbankan dianjurkan untuk memiliki produk ini. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi.
Penghimpunan Dana	Produk Dasar	Deposito	Deposito adalah simpanan berjangka di bank yang hanya bisa dicairkan setelah jangka waktu tertentu. Produk simpanan ini menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa, namun pencairan dana hanya bisa dilakukan saat jatuh tempo. Jangka waktu deposito bervariasi, mulai dari 1 bulan hingga 24 bulan, atau bahkan lebih.
Penyaluran Dana	Produk Dasar	Kredit Modal Kerja	Kredit modal kerja adalah fasilitas pinjaman yang diberikan kepada perusahaan atau individu untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang bersifat sementara atau untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Pinjaman ini biasanya digunakan untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, membayar hutang dagang, atau kebutuhan operasional lainnya yang diperlukan dalam siklus usaha. Kredit modal kerja di BPR AMS berjangka waktu dari 3 bulan hingga 84 bulan.
Penyaluran Dana	Produk Dasar	Kredit Investasi	Kredit investasi adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru, atau kebutuhan lainnya yang terkait dengan investasi. Kredit ini biasanya memiliki jangka waktu menengah hingga panjang, dan ditujukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan usaha.
Penyaluran Dana	Produk Dasar	Kredit Konsumsi	Kredit konsumtif adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan yang sifatnya pribadi atau konsumtif, seperti pembelian rumah, kendaraan, atau barang elektronik. Kredit ini berbeda dengan kredit produktif yang digunakan untuk investasi atau mengembangkan usaha.

TEKNOLOGI INFORMASI

Nama BPR : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 2024

Dalam mendukung kegiatan operasional dan layanan kepada nasabah, BPR Artha Mukti Santosa terus mengembangkan dan memperkuat penggunaan teknologi informasi (TI) secara menyeluruh. Inisiatif ini mencakup optimalisasi sistem operasional internal, peningkatan keamanan data, serta kerja sama strategis dengan penyedia jasa teknologi terpercaya.

1. Sistem Operasional

BPR Artha Mukti Santosa terus meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi kerja melalui penguatan sistem operasional berbasis teknologi informasi (TI). Seluruh proses operasional utama, mulai dari pembukaan rekening, transaksi teller, pencatatan kredit, hingga pelaporan keuangan, telah didukung oleh sistem core banking yang terintegrasi dan *real-time*.

Sistem operasional teknologi informasi yang digunakan oleh BPR memungkinkan:

- i. Otomatisasi proses layanan di front office dan back office, sehingga mempercepat pelayanan kepada nasabah dan meminimalisir potensi kesalahan manual.
- ii. Pengelolaan data yang akurat dan aman, mendukung kebutuhan audit, pelaporan OJK, serta pengambilan keputusan manajerial.
- iii. Pemantauan dan kontrol operasional secara menyeluruh, termasuk sistem limit transaksi, otorisasi berjenjang, dan sistem pelaporan harian/mingguan/bulanan.

Sistem ini juga telah disesuaikan dengan ketentuan regulasi dan dirancang untuk dapat beradaptasi terhadap pengembangan layanan digital di masa mendatang, seperti mobile banking, pembayaran elektronik, dan integrasi dengan sistem keuangan nasional.

Selain itu, pengembangan sistem informasi manajemen (SIM) terus dilakukan untuk menunjang proses pengambilan keputusan yang cepat dan berbasis data seperti pengembangan dashboard yang dapat dipergunakan oleh tim bisnis untuk memantau perkembangan penyaluran kredit dan kredit bermasalah.

Dengan sistem operasional teknologi informasi yang andal, BPR AMS berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi internal, memperkuat pengendalian risiko operasional, dan memberikan layanan yang lebih cepat, aman, dan responsif kepada nasabah.

2. Sistem Keamanan

Untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data nasabah serta memastikan kelangsungan operasional, BPR menerapkan kebijakan dan sistem keamanan yang cukup memadai. Strategi pengelolaan risiko teknologi informasi dilakukan melalui pendekatan preventif dan berkelanjutan, yang meliputi:

- a. Penggunaan perangkat lunak antivirus dan anti-malware yang andal, seperti McAfee dan Windows Defender, guna mendeteksi dan mencegah potensi ancaman siber pada perangkat internal.
- b. Penerapan sistem backup harian, yang memastikan data operasional dan transaksi tersimpan aman dan dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi gangguan atau kehilangan data.
- c. Pembaruan berkala terhadap kata sandi (password) pada sistem core banking, sebagai bagian dari pengendalian akses dan proteksi terhadap akses tidak sah.
- d. Pelatihan keamanan informasi kepada karyawan terkait, yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap ancaman siber serta penguatan budaya keamanan data di lingkungan kerja.

Dengan penerapan sistem keamanan yang komprehensif ini, BPR berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan nasabah, memperkuat ketahanan digital, dan memastikan operasional yang aman serta berkelanjutan.

3. Kerjasama dengan Penyedia Jasa TI

BPR menjalin kerja sama dengan penyedia jasa teknologi informasi yang memiliki reputasi baik dan tersertifikasi, guna memastikan layanan yang handal dan sesuai dengan standar regulasi OJK. Untuk itu, BPR Artha Mukti Santosa menjalin kerja sama strategis dengan PT Intisoft Mitra Sejahtera sebagai pemegang lisensi “Corsys”, salah satu penyedia layanan teknologi informasi yang telah berpengalaman dalam sistem perbankan, khususnya untuk BPR dan lembaga keuangan mikro.

Kerja sama ini mencakup pemanfaatan sistem core banking Corsys yang memungkinkan proses transaksi, pelaporan, dan pemantauan keuangan berjalan secara real-time dan terpusat. Selain itu, Corsys juga menyediakan dukungan teknis yang mencakup pemeliharaan sistem, keamanan data, serta pengembangan fitur sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan regulasi dari OJK.

PERKEMBANGAN USAHA DAN TARGET PASAR

Nama BPR : PT BPR Artha Mukti Santosa

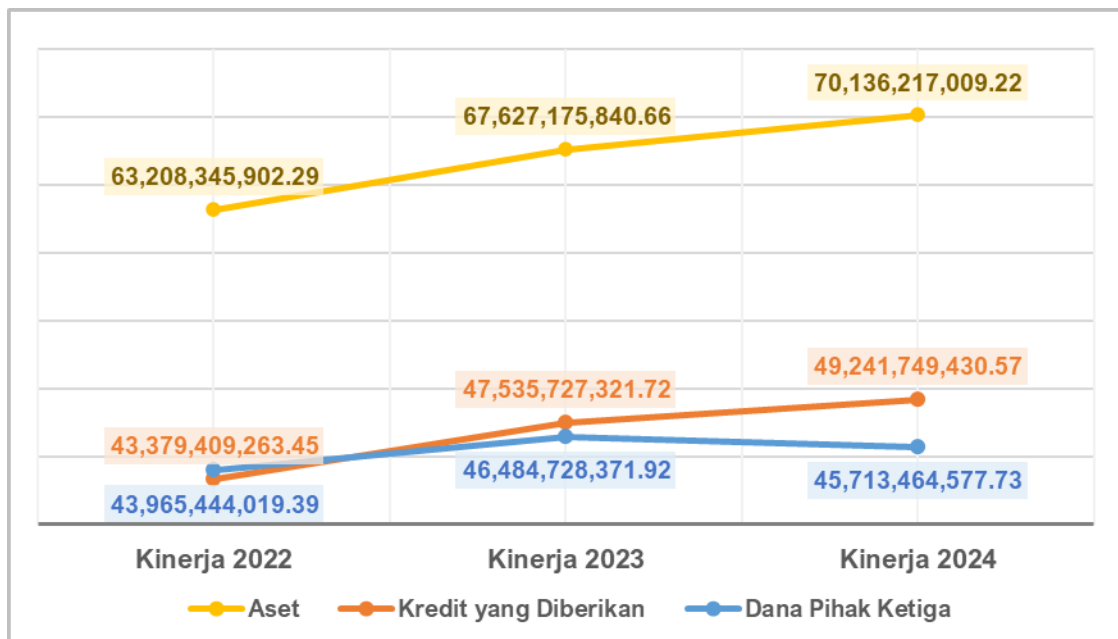
Posisi Laporan : 2024

Informasi mengenai perkembangan usaha dan target pasar pada periode posisi laporan adalah sebagai berikut:

A. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh Secara Signifikan

Pada tahun 2024, BPR Artha Mukti Santosa mencatat pertumbuhan volume usaha yang positif meskipun dihadapkan pada kondisi ekonomi yang dinamis dan tantangan kompetisi di industri perbankan. Pertumbuhan ini ditunjukkan melalui peningkatan total aset, penyaluran kredit, namun terdapat penurunan yang tidak signifikan di sisi dana pihak ketiga (DPK) yang dikelola oleh BPR.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja keuangan sepanjang tahun 2024, berikut disajikan grafik pertumbuhan aset, kredit yang disalurkan, dan dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh BPR Artha Mukti Santosa dalam tiga tahun terakhir.



Grafik pertumbuhan aset menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, mencerminkan ekspansi usaha dan pengelolaan portofolio yang efektif. Pertumbuhan ini sebagian besar

ditopang oleh peningkatan penyaluran kredit, khususnya kepada sektor UMKM dan perdagangan lokal, yang terus menjadi fokus utama BPR.

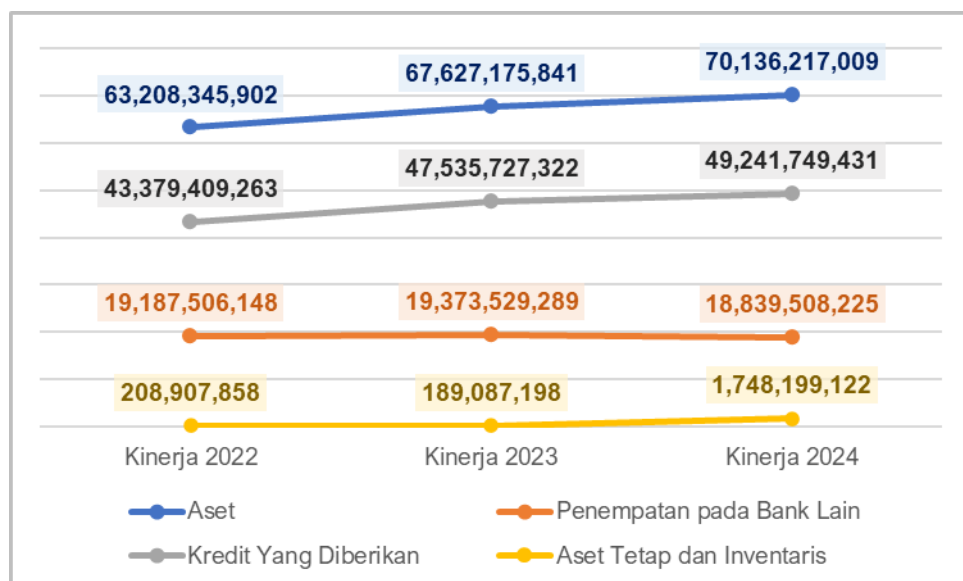
Sementara itu, grafik simpanan (yang mencakup tabungan dan deposito) memperlihatkan fluktuasi seiring dengan dinamika preferensi nasabah dan tingkat persaingan di pasar. Penurunan sementara pada DPK menjadi perhatian manajemen dan telah ditindaklanjuti dengan strategi penghimpunan dana yang lebih agresif dan kompetitif.

Berikut ini akan diuraikan mengenai perkembangan dari kinerja aset, penyaluran kredit dan penghimpunan dana:

1. Kinerja Aset

Pada tahun 2024, BPR mencatatkan kinerja aset yang positif dan konsisten tumbuh dari tahun sebelumnya. Total aktiva per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp70.136.217.009,00, meningkat dari Rp67.627.175.841,00 di tahun 2023 dan Rp63.208.345.902,00 di tahun 2022. Pertumbuhan ini mencerminkan efektivitas strategi intermediasi yang diterapkan serta kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap BPR.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan keuangan BPR, berikut disajikan grafik yang menunjukkan tren pertumbuhan total aset selama tiga tahun terakhir, dari tahun 2022 hingga 2024. Grafik ini bertujuan untuk memperlihatkan dinamika dan arah pertumbuhan aset sebagai cerminan dari kinerja intermediasi dan strategi pengelolaan keuangan BPR secara menyeluruh.



Kredit yang diberikan tetap menjadi komponen utama dalam struktur aset, dengan nilai mencapai Rp47,96 miliar, meningkat sebesar 3,7% dibandingkan tahun

sebelumnya yang tercatat sebesar Rp46,25 miliar. Pertumbuhan ini mencerminkan komitmen BPR dalam memperluas pembiayaan kepada sektor produktif, khususnya UMKM, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko yang baik.

Sementara itu, penempatan pada bank lain mengalami sedikit penurunan dari Rp19,37 miliar di tahun 2023 menjadi Rp18,84 miliar di tahun 2024. Perubahan ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan penempatan dalam bentuk deposito, dari Rp15,58 miliar menjadi Rp12,03 miliar, sebagai respons terhadap strategi optimalisasi likuiditas guna mendorong penyaluran kredit.

Menariknya, komponen giro pada bank lain justru mencatat kenaikan signifikan, dari Rp3,32 miliar menjadi Rp4,61 miliar, mencerminkan fleksibilitas pengelolaan kas dan kesiapan dana operasional. Tabungan pada bank lain juga menunjukkan peningkatan tajam dari Rp470 juta di tahun 2023 menjadi Rp2,20 miliar di tahun 2024.

Perubahan paling mencolok terjadi pada aset tetap dan inventaris, yang melonjak dari Rp189 juta menjadi Rp1,75 miliar pada akhir 2024. Peningkatan signifikan ini disebabkan oleh pembelian gedung baru, yang menjadi bagian dari langkah strategis BPR dalam memperkuat kapasitas operasional serta meningkatkan kenyamanan dan pelayanan kepada nasabah. Investasi ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang dan modernisasi infrastruktur BPR.

Secara keseluruhan, komposisi dan pertumbuhan aset BPR di tahun 2024 mencerminkan pengelolaan keuangan yang pruden namun progresif. Fokus pada pertumbuhan kredit, optimalisasi likuiditas, dan investasi jangka panjang menunjukkan kesiapan BPR untuk menghadapi tantangan dan peluang ke depan secara berkelanjutan.

2. Kinerja Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit tetap menjadi fokus utama kegiatan usaha BPR. Sepanjang tahun 2024, total kredit yang disalurkan meningkat sebesar 3,59% menjadi Rp49.241.751.454,00, yang terutama tersalurkan kepada sektor UMKM, pertanian, dan perdagangan. Peningkatan ini mencerminkan komitmen BPR dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

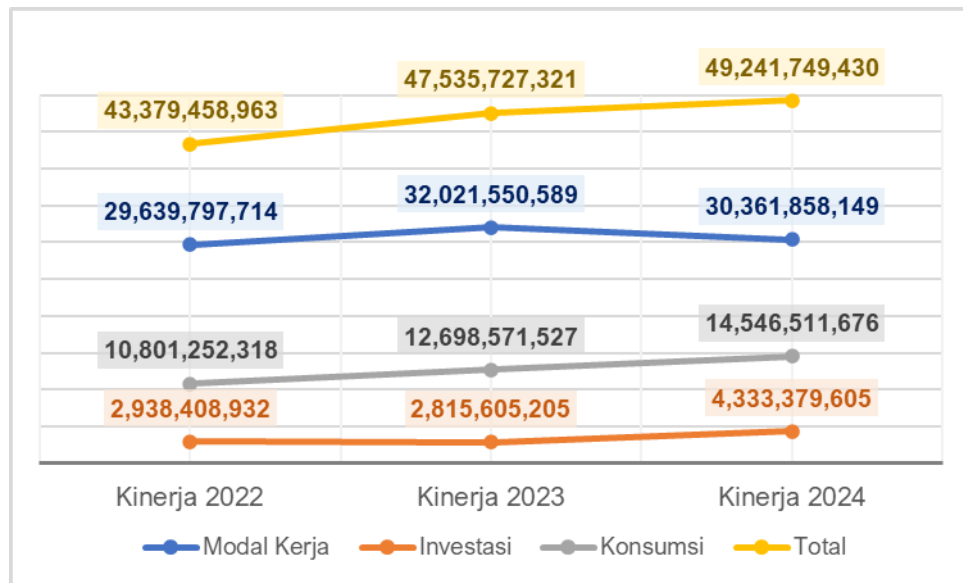
Selama periode tahun 2022 hingga 2024, BPR Artha Mukti Santosa mencatat tren pertumbuhan yang positif dalam penyaluran pembiayaan di seluruh kategori

penggunaan dana, dengan peningkatan total pembiayaan dari Rp43.379.460.985,00 pada tahun 2022 menjadi Rp49.241.751.454,00 pada tahun 2024.

- a. Pembiayaan untuk modal kerja tetap menjadi komponen terbesar dari total penyaluran, mencerminkan fokus BPR dalam mendukung kegiatan usaha produktif. Meskipun mengalami kenaikan dari Rp29.639.797.714,00 di tahun 2022 menjadi Rp32.021.550.589,00 di tahun 2023, nilai ini sedikit menurun menjadi Rp30.361.858.149,00 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian strategi penyaluran kredit yang lebih selektif terhadap sektor produktif yang berisiko.
- b. Pembiayaan investasi mengalami fluktuasi, sempat turun dari Rp2.938.408.932,00 di tahun 2022 menjadi Rp2.815.605.205,00 di tahun 2023, namun meningkat signifikan menjadi Rp4.333.379.605 di tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan minat investasi dari debitur serta peningkatan kepercayaan terhadap prospek jangka panjang perekonomian daerah.
- c. Penyaluran kredit konsumsi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari Rp10.801.252.318,00 di tahun 2022 menjadi Rp14.546.511.676,00 di tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan konsumtif serta perbaikan daya beli pasca pemulihan ekonomi.

Secara keseluruhan, total penyaluran pembiayaan BPR Artha Mukti Santosa meningkat sebesar 13,51% selama periode tiga tahun terakhir. Hal ini mencerminkan kemampuan BPR dalam menjaga pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan, serta menyesuaikan strategi bisnis sesuai dengan dinamika pasar dan kebutuhan nasabah.

Berikut adalah grafik penyaluran dana BPR dari tahun 2022 hingga 2024 berdasarkan kategori modal kerja, investasi, konsumsi, dan secara total. Grafik ini memperlihatkan arah pertumbuhan masing-masing segmen serta kontribusinya terhadap total penyaluran dana.



3. Kinerja Kewajiban

Total kewajiban BPR pada akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp47,93 miliar, meningkat tipis sebesar 0,93% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp47,48 miliar. Peningkatan ini mencerminkan stabilitas dalam struktur pendanaan BPR, meskipun terdapat fluktuasi pada beberapa komponen utama.

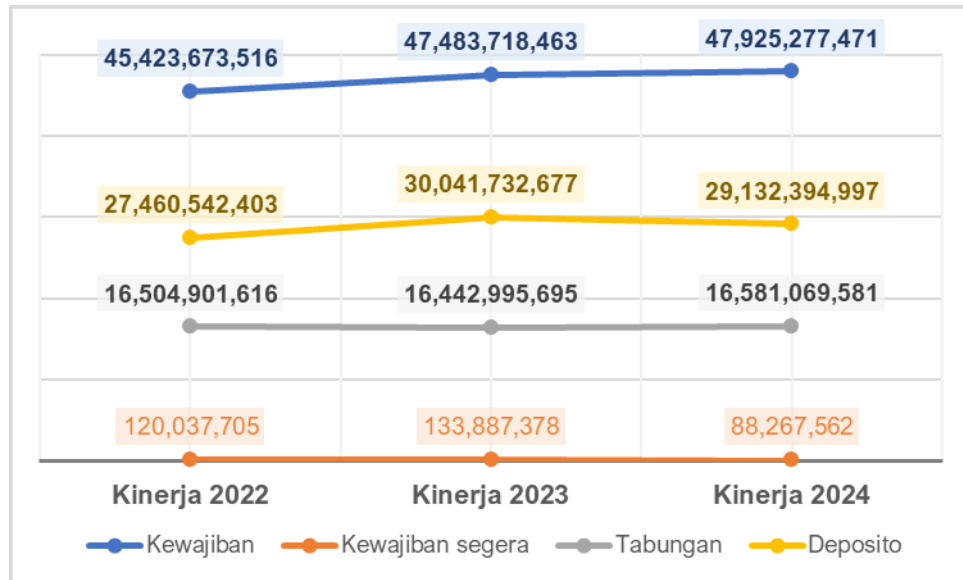
Komponen terbesar dalam kewajiban tetap didominasi oleh dana pihak ketiga, khususnya tabungan dan deposito. Tabungan menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari Rp16,44 miliar di tahun 2023 menjadi Rp16,58 miliar di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan kepercayaan masyarakat yang terus terjaga terhadap layanan simpanan BPR.

Sementara itu, deposito mengalami sedikit penurunan dari Rp30,04 miliar menjadi Rp29,13 miliar, sejalan dengan tren penyesuaian tingkat bunga simpanan dan strategi pengelolaan dana yang lebih selektif.

Kewajiban segera, yang mencerminkan kewajiban jangka sangat pendek, turun dari Rp133,89 juta di tahun 2023 menjadi Rp88,27 juta di tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan likuiditas harian dan efisiensi pada sisi kewajiban jangka pendek.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan kewajiban BPR, berikut disajikan grafik yang menggambarkan tren kewajiban total dan komponen utama kewajiban selama tiga tahun terakhir, dari tahun 2022 hingga 2024. Grafik ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana BPR mengelola

kewajiban dana pihak ketiga dan kewajiban jangka pendek dalam mendukung kelancaran operasional dan strategi pertumbuhannya.



Secara keseluruhan, struktur kewajiban BPR pada tahun 2024 menunjukkan profil pendanaan yang solid dan terjaga, dengan dominasi dana murah dan pengelolaan risiko likuiditas yang baik, mendukung kinerja intermediasi yang berkelanjutan.

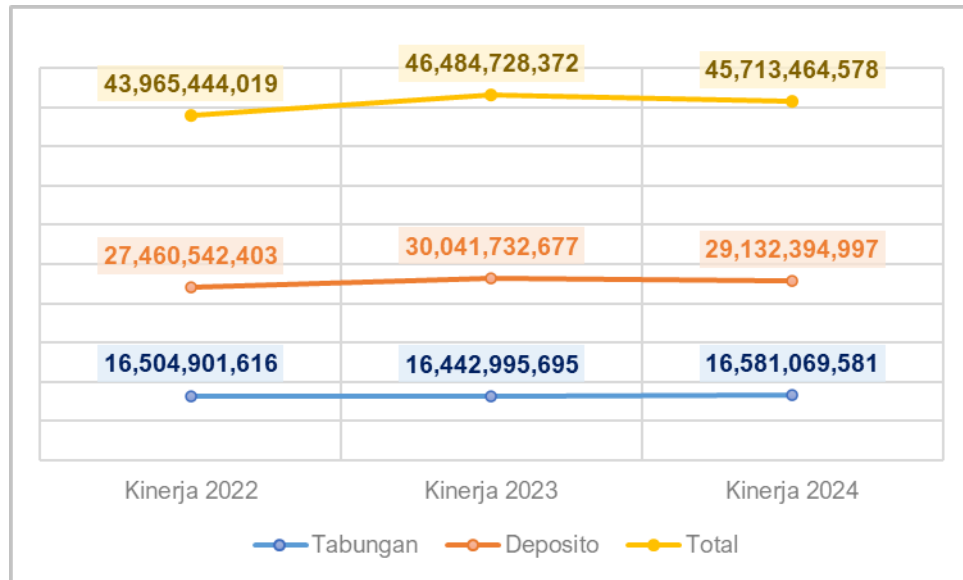
4. Kinerja Penghimpunan Dana

Selama tahun 2024, BPR Artha Mukti Santosa mencatatkan kinerja yang relatif stabil dalam penghimpunan dana dari masyarakat. Total dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp45.713.464.578,00, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp46.484.728.372,00, atau mengalami penurunan sebesar 1,66%.

Secara rinci, kinerja per jenis produk adalah sebagai berikut:

- Tabungan menunjukkan pemulihan dari tahun sebelumnya, dengan kenaikan sebesar Rp138.073.886,00 juta atau 0,84%, dari Rp16.442.995.695,00 di tahun 2023 menjadi Rp16.581.069.581,00 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk tabungan BPR, didukung oleh layanan yang lebih responsif dan strategi promosi yang lebih tersegmentasi.
- Deposito mengalami penurunan dari Rp30.041.732.677,00 menjadi Rp29.132.394.997,00, atau setara dengan penurunan sebesar Rp909.337.680,00 (-3,03%). Penurunan ini disinyalir akibat pergeseran preferensi nasabah ke instrumen investasi dengan imbal hasil lebih tinggi di tengah tren suku bunga yang mulai stabil.

Penurunan tidak signifikan secara total tidak lepas dari tantangan eksternal, seperti ketatnya persaingan pasar dana serta kondisi makroekonomi yang masih dinamis. Namun demikian, BPR Artha Mukti Santosa tetap mampu menjaga daya saing produk dan loyalitas nasabah. Berikut adalah grafik pergerakan kinerja penghimpunan dana 3 tahun terakhir:



Kedepannya manajemen akan memperkuat strategi penghimpunan dana melalui:

- Inovasi produk simpanan berbasis kebutuhan pasar;
- Digitalisasi layanan untuk mempermudah transaksi;
- Program loyalitas dan penghargaan bagi nasabah setia.

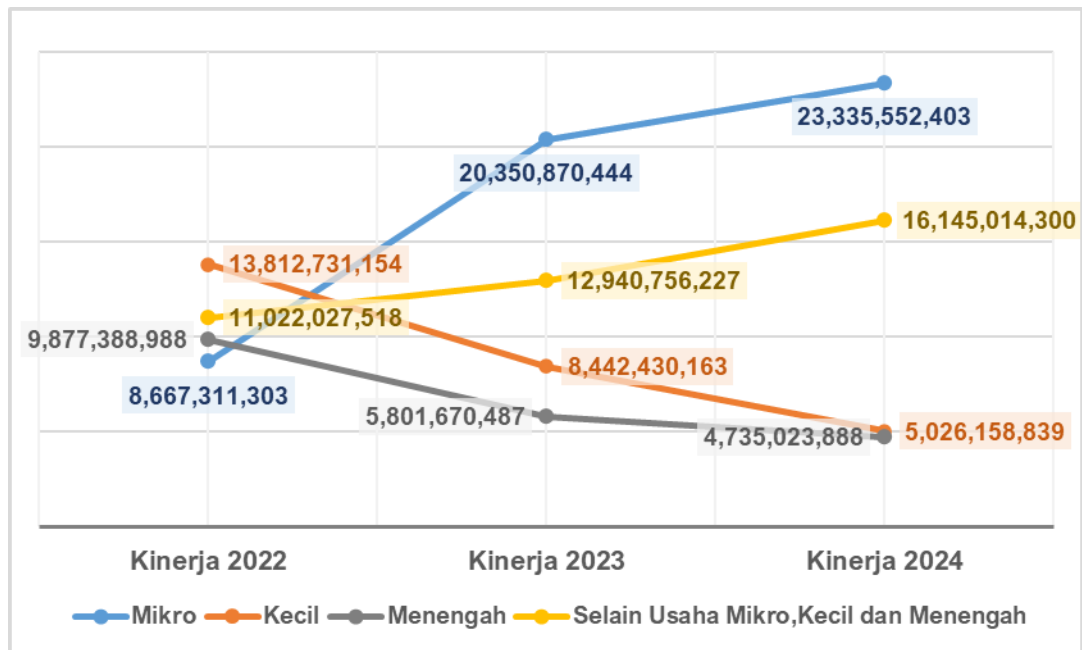
B. Target Pasar

Dalam menjalankan aktivitas usahanya, BPR Artha Mukti Santosa menetapkan strategi pemasaran yang berfokus pada segmen pasar yang sesuai dengan karakteristik dan kapasitas layanan yang dimiliki. Target pasar utama BPR adalah:

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Segmen ini merupakan tulang punggung perekonomian lokal dan memiliki potensi pertumbuhan yang besar. BPR secara aktif menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM, khususnya di sektor perdagangan, jasa, dan pertanian, dengan skema pembiayaan yang sederhana dan fleksibel.

Grafik berikut menyajikan tren penyaluran kredit BPR Artha Mukti Santosa berdasarkan klasifikasi jenis usaha selama tiga tahun terakhir.



Dari grafik terlihat bahwa segmen Usaha Mikro mengalami peningkatan signifikan dan konsisten, mencerminkan fokus utama BPR dalam mendukung sektor ekonomi rakyat.

Sebaliknya, segmen Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan penurunan berturut-turut sejak tahun 2022. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya risiko usaha pada segmen tersebut serta penyesuaian strategi penyaluran kredit untuk menjaga kualitas portofolio.

Sementara itu, kredit pada kelompok Selain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun, mengindikasikan adanya peluang pertumbuhan dari sektor lain yang mulai dijajaki oleh BPR.

Melalui grafik ini, BPR ingin menunjukkan arah fokus dan keberhasilan dalam memperluas inklusi keuangan, khususnya kepada usaha mikro yang tetap menjadi tulang punggung pengembangan ekonomi lokal.

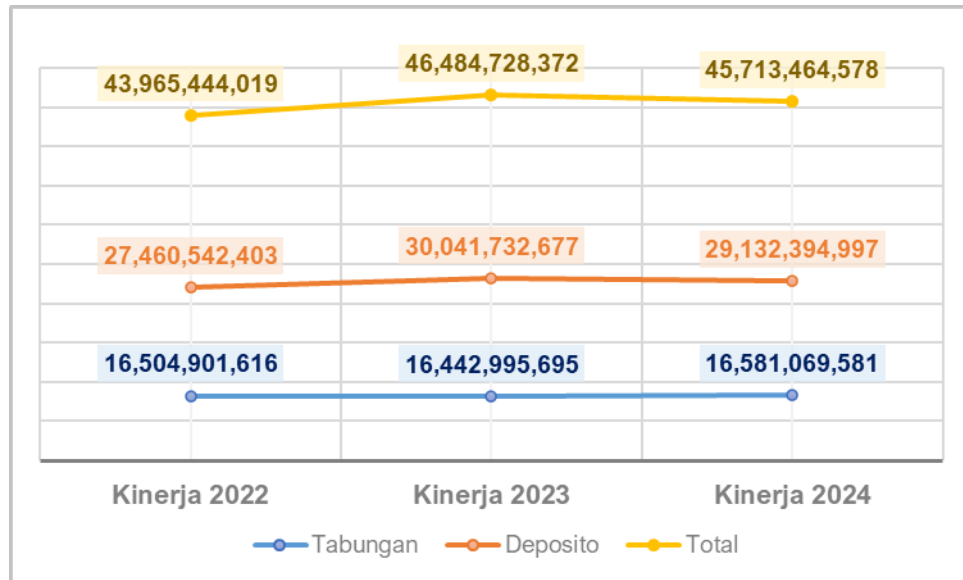
2. Masyarakat Produktif dan Komunitas Lokal

BPR menargetkan masyarakat yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap, termasuk pedagang pasar, pekerja informal, dan komunitas lokal lainnya yang membutuhkan akses layanan keuangan dasar dengan proses yang cepat dan mudah.

3. Nasabah Ritel dan Individu

Dalam penghimpunan dana, BPR menyasar segmen nasabah ritel dengan menawarkan produk tabungan dan deposito yang kompetitif, aman, dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

Grafik berikut menyajikan tren penghimpunan dana BPR Artha Mukti Santosa selama tiga tahun terakhir.



Berikut akan diuraikan kinerja dari produk tabungan dan deposito:

a. Tabungan

Tabel berikut menyajikan perkembangan nilai tabungan dari berbagai produk yang ditawarkan oleh BPR Artha Mukti Santosa selama tiga tahun terakhir. Meskipun secara total dana tabungan menunjukkan fluktuasi yang relatif stabil, terdapat dinamika menarik pada masing-masing produk tabungan.

No	Produk Tabungan	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
1	Tabungan Wajib Restu	2,153,919,514	2,321,031,867	2,292,689,110
2	Tabungan Restu	2,908,335,558	3,106,966,223	3,360,115,512
3	Tabungan Simapan	5,657,011,076	6,004,665,860	5,458,748,886
4	Tabungan Sifitri	1,274,400,000	1,872,800,000	2,383,801,000
5	Tabungan Qurban	156,562,691	176,981,405	203,583,726
6	Tab Karyawan	686,636,673	498,392,896	462,587,736
7	Tabungan Sitaru	927,000,000	1,041,200,000	840,400,000
8	Tabungan Harmoni	0	1,212,541,752	30,275,217
9	Tabungan Tarisa	1,440,600,000	11,400,000	0
10	Tabungan Tarisa 6	11,515,205	3,130,390	0
11	Tabungan Tarisa 8	0	0	1,403,401,648
12	Tabungan Umroh	3,534,948	0	0
13	Tabungan Satu Fortuna 2	1,107,221,132	15,300,438	0
14	Tabungan Simapan Akhir Tahun	5,400,000	5,200,000	0
15	Tabungan Simpel	172,764,820	173,384,863	145,466,746
Total		16,504,901,616	16,442,995,695	16,581,069,581

Dari tabel dapat diatas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- i. Tabungan Simapan, Tabungan Restu, dan Tabungan Sifitri konsisten menjadi kontributor terbesar terhadap total dana pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan. Ketiga produk ini mencerminkan preferensi masyarakat terhadap produk tabungan yang sederhana, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
- ii. Produk Tabungan Sifitri mengalami pertumbuhan yang signifikan, dimana meningkat dari Rp1.274.400.000,00 pada 2022 menjadi Rp2.383.801.000,00 pada 2024. Tabungan Sifitri dirancang untuk memenuhi kebutuhan kelompok nasabah tertentu, dengan fitur atau manfaat yang relevan yaitu untuk perencanaan keuangan untuk kebutuhan di saat perayaan Idul Fitri dan perolehan hadiah di akhir membuat produk ini berhasil menarik minat segmen tersebut secara konsisten. Selain itu strategi pemasaran yang terfokus, terutama melalui pendekatan langsung kepada komunitas atau nasabah potensial, ikut mendorong pertumbuhan. Keterlibatan seluruh jenjang organisasi di BPR Artha Mukti Santosa atau relasi yang kuat dengan nasabah turut menjadi kekuatan produk ini.
- iii. Begitupula Tabungan Qurban, yang terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan respon positif terhadap produk musiman dan berbasis tujuan.
- iv. Fluktuasi beberapa produk juga mencerminkan proses penyesuaian portofolio produk yang dilakukan manajemen, baik melalui penghentian produk yang kurang efektif maupun peluncuran produk baru yang lebih sesuai dengan karakteristik nasabah.

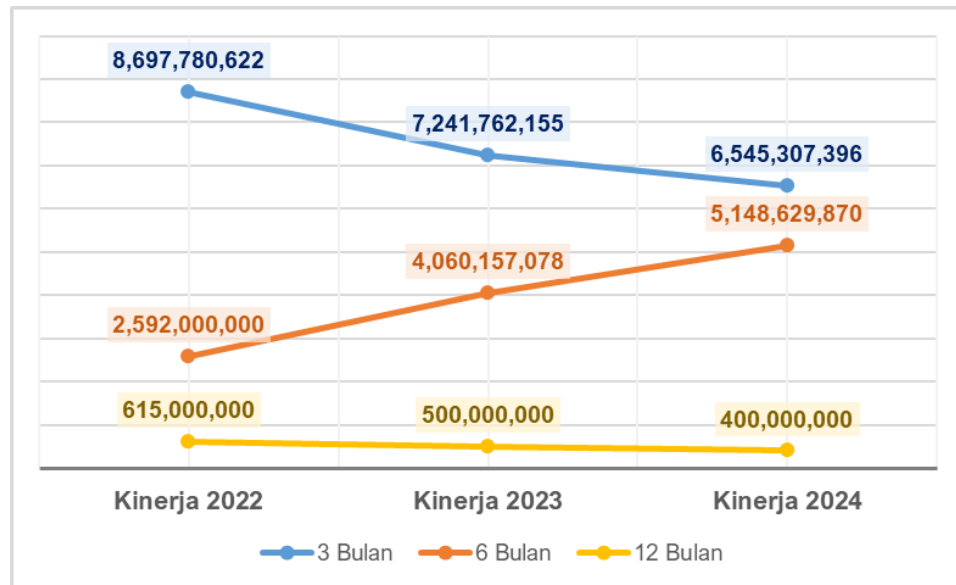
b. Deposito

Selama tahun 2024, produk deposito tetap menjadi salah satu sumber penghimpunan dana utama bagi BPR Artha Mukti Santosa. Di tengah dinamika ekonomi dan perubahan preferensi nasabah, deposito menunjukkan kinerja yang relatif stabil, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan imbal hasil yang ditawarkan oleh produk simpanan berjangka.

BPR terus berinovasi dalam menawarkan variasi tenor dan skema bunga yang kompetitif guna menjangkau berbagai segmen nasabah. Kinerja deposito juga mencerminkan upaya manajemen dalam menjaga likuiditas serta

memperkuat struktur pendanaan jangka menengah dan panjang secara berkelanjutan.

Grafik berikut menyajikan perkembangan dana deposito yang dihimpun oleh BPR Artha Mukti Santosa selama tiga tahun terakhir, berdasarkan jangka waktu (tenor) penempatan. Visualisasi ini menggambarkan pergerakan nilai deposito pada tenor 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari tahun 2022 hingga 2024.



Dari grafik di atas dapat dianalisa bahwa kinerja produk deposito berdasarkan jangka waktu selama tahun 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya pergeseran preferensi nasabah dari jangka pendek menuju jangka menengah, khususnya pada deposito berjangka 6 bulan.

i. Deposito 3 Bulan

Produk ini mencatat penurunan nilai secara bertahap, dari Rp8.697.780.622,00 pada tahun 2022 menjadi Rp7.241.762.155,00 pada 2023, dan kembali menurun ke Rp6.545.307.396,00 di tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran preferensi nasabah yang sebelumnya memilih fleksibilitas tenor pendek, menuju pilihan yang menawarkan imbal hasil lebih menarik.

ii. Deposito 6 Bulan

Sebaliknya, deposito dengan tenor 6 bulan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dari Rp2.592.000.000 di tahun 2022, meningkat menjadi Rp4.060.157.078,00 di 2023, dan terus naik menjadi Rp5.148.629.870,00 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan

keberhasilan strategi BPR dalam menawarkan produk jangka menengah yang menarik, serta meningkatnya kepercayaan nasabah untuk menempatkan dana dalam jangka waktu yang lebih panjang.

iii. Deposito 12 Bulan

Sementara itu, deposito dengan tenor 12 bulan mengalami tren penurunan dari tahun ke tahun, yakni dari Rp615.000.000,00 (2022) menjadi Rp500.000.000,00 (2023), dan turun lagi ke Rp400.000.000,00 (2024). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas nasabah cenderung menghindari penguncian dana dalam jangka panjang, kemungkinan karena kebutuhan likuiditas yang lebih tinggi atau ketidakpastian ekonomi.

Secara keseluruhan, analisa ini menunjukkan adanya perubahan pola simpanan nasabah, di mana tenor menengah semakin diminati karena memberikan keseimbangan antara imbal hasil dan fleksibilitas waktu. Untuk mendukung tren ini, BPR dapat terus mengembangkan produk deposito 6 bulan dengan fitur tambahan, seperti sistem bunga bertingkat atau bonus loyalitas.

Melalui pendekatan yang berbasis lokal dan personal, serta penguatan jaringan layanan, BPR Artha Mukti Santosa berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan pasar secara inklusif, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah operasionalnya.

FORM A.05.05
JUMLAH, JENIS, DAN LOKASI KANTOR
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Kantor	Koordinat	Alamat Kantor				Nama Pimpinan	No. Telp
		Nama Jalan dan No	Desa/Kecamatan	Kab./Kota	Kode Pos		
Kantor Pusat	-6.981297, 110.395672	Jl Jendral Sudirman No 167	Semarang Barat	Kota Semarang	50141	Toto Wijatmiko	024-7608811
Kantor Cabang	-6.966391, 110.078747	Jl Utama Ruko Griya Weleri Makmur Asri A1-A2	Weleri	Kab Kendal	51355	Subiyanti	0294-642828

Jumlah Pegawai												Jumlah Kantor Kas
Pegawai Tetap						Pegawai Tidak Tetap						
S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya	S3	S2	S1	D3	SLTA	Lainnya	
0	4	17	5	1	0	0	0	12	4	6	0	1
0	0	6	1	0	0	0	0	7	5	5	0	0

Status Kepemilikan Gedung	Jumlah Kas Mobil/Kas Terapung	Jumlah EDC			ATM		
		EDC Milik Sendiri	EDC Milik Bank Umum	EDC Milik BPR Lain	Jumlah Dikelola Sendiri	Jumlah Pihak yang Bekerjasama dengan BPR	Nama Pihak yang Bekerjasama dengan BPR
Sewa	0	0	0	0	0	0	-
Sewa dan Milik Sendiri	0	0	0	0	0	0	-

Perubahan Selama Bulan Posisi Laporan					Jumlah Pegawai		
Keterangan Data Kantor	Persetujuan OJK		Alamat Sebelumnya	Tanggal Pelaksanaan	Pegawai Tetap		
	No	Tanggal			Pemasaran	Pelayanan	Lainnya
-	-	-	-	-	4	5	18
-	-	-	-	-	0	3	4

FORM A.05.05

JUMLAH, JENIS, DAN LOKASI KANTOR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Jumlah Pegawai			Jumlah Pegawai						
Pegawai Tidak Tetap			Berdasarkan Jenis Kelamin		Berdasarkan Usia				
Pemasaran	Pelayanan	Lainnya	Laki-Laki	Perempuan	<25	>25-35	>35-45	>45-55	>55
12	3	18	30	19	3	21	17	7	1
11	2	4	15	9	1	14	7	2	0

FORM A.05.06
KERJASAMA BPR DENGAN BANK, LEMBAGA JASA KEUANGAN LAIN, ATAU LEMBAGA LAIN
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Bank/LJK Lain/Lembaga Lain	Sandi Bank	Jenis Kerjasama	Uraian Kerjasama	Tanggal Mulai Kerjasama
PT BPR Restu Artha Makmur	600783	Kredit Sindikasi	Kerjasama dengan PT BPR Restu Artha Makmur berupa kredit yang diberikan atas nama Soelistyaningsih	19-06-2019
PT Intisoft Mitra Sejahtera	-	Core Banking System	Kerjasama berupa penyediaan Core Banking System	01-01-2019

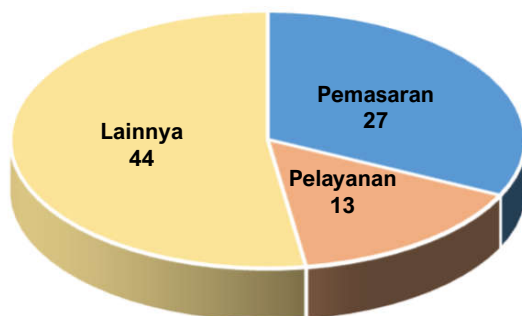
FORM A.05.07

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - BIDANG TUGAS DAN KOMPOSISI PEGAWAI

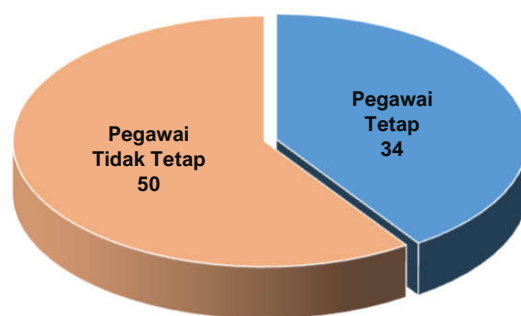
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

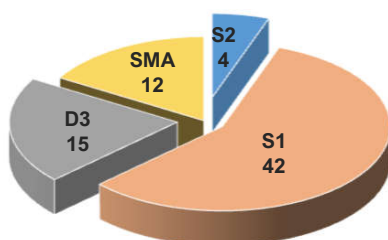
Bidang Tugas



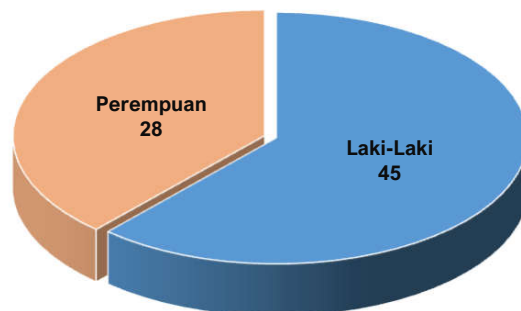
Status Kepegawaian



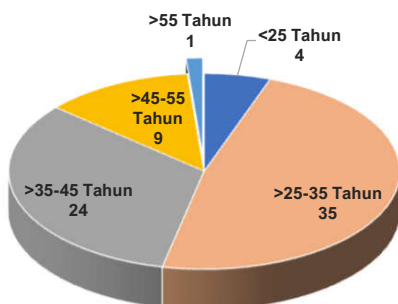
Tingkat Pendidikan



Jenis Kelamin



Usia Pegawai



FORM A.05.07

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEGIATAN PENGEMBANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
1	Maksimalisasi Laba dengan Teknik Rekrutasi ALMA yang Cerdas	23-10-2024	Eksternal	Pejabat Eksekutif	1	Pelatihan yang bertujuan untuk mengoptimalkan struktur neraca bank dengan tujuan memaksimalkan laba dan meminimalkan risiko pendekatan manajemen risiko. Ini melibatkan pengelolaan aset dan kewajiban secara efektif dan efisien untuk mencapai keuntungan yang optimal. Pelatihan ini diikuti oleh 1 Pejabat Eksekutif
2	Sosialisasi APU, PPPT dan PPPSPM	03-02-2024	Internal	Seluruh Pegawai	71	Sosialisasi yang dilakukan secara rutin setiap tahun sekali oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan, yang bertujuan untuk me-refresh program penerapan APU, PPT, dan PPPSPM. Pelatihan ini diikuti seluruh karyawan dimana untuk trainernya dari internal yaitu Pejabat Eksekutif APU, PPT dan PPPSPM.
3	Menghitung CKPN	29-02-2024	Eksternal	Seluruh Pegawai	5	Pelatihan ini untuk memberikan pengetahuan kepada karyawan terkait dengan ketentuan OJK yang baru yaitu Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Pelatihan ini diikuti oleh 2 Pejabat Eksekutif dan 1 Supervisor.
4	Public Speaking	08-03-2024	Eksternal	Seluruh Pegawai	1	Pelatihan "Public Speaking" diikuti oleh 5 (lima) staf operasional. Tujuan pelatihan ini adalah meningkatkan kemampuan berbicara kepada orang lain/nasabah sehingga pesan yang akan disampaikan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara dan untuk meningkatkan rasa percaya diri saat berinteraksi dengan orang lain.
5	Analisa Kredit Akurat Scoring Metode Paket 6 in 1	26-03-2024	Eksternal	Seluruh Pegawai	1	Pelatihan "Analisa Kredit Akurat Scoring Metode 6 in 1" diikuti oleh 1 orang Surveyor, diharapkan dengan mengikuti pelatihan ini yang bersangkutan memiliki kemampuan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi kelayakan kredit serta mengelola risiko kredit yang mungkin timbul. Ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar analisa kredit, teknik menganalisis laporan keuangan, menilai karakter dan kemampuan debitur, serta memahami berbagai aspek terkait dengan pemberian kredit.
6	Next Leader Training	03-05-2024	Eksternal	Seluruh Pegawai	3	"Next Leader Training" merupakan pelatihan kolaborasi dengan BPR dibawah naungan Restu Group. Pelatihan ini diikuti oleh 3 (tiga) Supervisor. Tujuan utama dari pelatihan tersebut adalah untuk mengembangkan kemampuan, ketrampilan dan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan.
7	Workshop Menghitung dan Menentukan Remunerasi Benefit untuk Tim Sales	18-05-2024	Eksternal	Seluruh Pegawai	3	Materi dari pelatihan ini terkait dengan sistem penggajian untuk tim sales. Tujuan utama dari pelatihan ini adalah memberikan pengetahuan terkait dengan perhitungan atau menciptakan skema gaji yang efektif, menarik, dan menguntungkan bagi tim sales dan perusahaan, serta memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja
8	Kumpul dan Sinau Bareng Pejabat Eksekutif BPR/S	24-05-2024	Eksternal	Pejabat Eksekutif	2	Materi dari "Kumpul dan Sinau Bareng" ini adalah pembahasan dan forum diskusi bagi Pejabat Eksekutif. Di pelatihan ini Pejabat Eksekutif melakukan diskusi terkait POJK baru ataupun issue terkait dengan BPR/BPRS. Kegiatan ini diikuti oleh 2 (dua) Pejabat Eksekutif.
9	Mitigasi Risiko Kredit dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen	06-06-2024	Eksternal	Seluruh Pegawai	4	Pelatihan ini diikuti oleh 1 (satu) orang Direksi dan 3 (tiga) orang Pejabat Eksekutif. Materi dari pelatihan ini adalah mitigasi risiko kredit disesuaikan dengan peraturan perlindungan konsumen. Tujuan utama pelatihan mitigasi risiko kredit dari perspektif hukum perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri dari praktik kredit yang merugikan, serta menciptakan rasa tanggung jawab pada pelaku usaha jasa keuangan dalam memberikan pelayanan yang aman dan adil. Pelatihan ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam pemberian kredit.

FORM A.05.07
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEGIATAN PENGEMBANGAN
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
10	Pelatihan Manajemen Risiko, Pengenalan Alat Kerja Risk Control Self Assessment (RSCA)	24-06-2024	Eksternal	Pejabat Eksekutif	1	Materi dari pelatihan "Manajemen Risiko, Pengenalan Alat Kerja Risk Control Self Assessment (RSCA)" adalah membudayakan sadar risiko di lingkungan kerja. Tujuan utama pelatihan manajemen risiko dan Risk Control Self Assessment (RSCA) adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan individu dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang mungkin mengancam pencapaian tujuan bisnis atau organisasi. Melalui RSCA, kita diberikan kemampuan untuk melakukan self-assessment untuk mengevaluasi efektivitas kontrol internal dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Lebih detailnya lagi, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran risiko, mampu mengidentifikasi risiko sejak dini, meningkatkan efektivitas kontrol, pengambilan keputusan yang lebih baik, mampu menganalisis risiko pada kegiatan operasional BPR dan kepatuhan terhadap ketentuan regulasi. Pelatihan ini merupakan kolaborasi Perbarindo, OJK Kantor Regional III dan Sparkassen.
11	Sosialisasi Manajemen Risiko	21-09-2024	Internal	Seluruh Pegawai	58	Sosialisasi Manajemen Risiko diikuti oleh seluruh pegawai dengan penyelenggara dari internal. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pengetahuan terkait dengan risiko yang mungkin timbul dari kegiatan operasional BPR dan memberikan pemahaman serta kesadaran terkait budaya sadar risiko.
12	Workshop Sistem Backup Data & Keamanan IT BPR	25-09-2024	Eksternal	Seluruh Pegawai	2	Materi dari pelatihan ini terkait dengan back up data untuk pelindungan data. Tujuan utama workshop tentang sistem backup data dan keamanan IT di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan BPR dalam hal perlindungan data dan sistem informasi mereka. Workshop ini bertujuan agar BPR memiliki sistem backup data yang efektif, serta dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman keamanan IT.
13	Pelatihan Tatap Muka Membuat Rencana Bisnis BPR Tahun 2025	01-11-2024	Eksternal	Seluruh Pegawai	2	Tujuan pelatihan rencana bisnis bank (RBB) adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penyusunan RBB yang tepat, menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi risiko, dan memastikan kapasitas organisasi bank untuk mencapai kinerja yang sehat dan berkelanjutan. Pelatihan ini juga bertujuan untuk memastikan bank memiliki RBB yang matang, realistis, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko. Pelatihan ini diikuti oleh 1 (satu) orang Direksi dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif.
14	Edukasi Cinta Bangsa Pahami Rupiah Kepada Cash Handlers	23-10-2024	Eksternal	Seluruh Pegawai	1	Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengenal karakteristik dan desain Rupiah, memperlakukan rupiah secara tepat, menjaga diri dari kejahatan uang palsu. Kegiatan edukasi ini diikuti oleh 1 (satu) orang Supervisor Operasional.
15	Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi BPR/S & Proses Eskalasi	28-10-2024	Eksternal	Pejabat Eksekutif	1	Materi dari pelatihan ini adalah penerapan Strategi Anti Fraud sesuai dengan POJK No 12 tahun 2024. Tujuan utama pelatihan penerapan strategi anti-fraud di BPR/S adalah untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon tindakan penipuan yang dapat merugikan keuangan dan non-keuangan lembaga tersebut. Proses eskalasi dalam strategi ini berfungsi untuk memastikan bahwa potensi fraud yang terdeteksi dilaporkan dan ditangani secara cepat dan efektif, dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang. Pelatihan ini diikuti oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal.
16	Penyesuaian Perjanjian Baku sesuai Mandat POJK No 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan	20-11-2024	Eksternal	Pejabat Eksekutif	1	Tujuan utama penyesuaian Perjanjian Baku sesuai POJK No. 22 Tahun 2023 adalah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, serta memastikan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Penyesuaian ini juga bertujuan untuk mendorong pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) menempatkan kepentingan konsumen sebagai prioritas utama. Pelatihan ini diikuti oleh Manajer Operasional.

FORM A.05.07

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - KEGIATAN PENGEMBANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kegiatan Pengembangan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
17	Workshop Peraturan Menteri Keuangan No 81 Tahun 2024	04-12-2024	Eksternal	Seluruh Pegawai	1	Tujuan dari program ini adalah memberikan pemahaman perpajakan terkait berlakunya PMK No 81 Tahun 2024. Pelatihan ini diikuti oleh staf Akunting.

FORM B.01.00
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Pos	Jumlah Posisi Desember Tahun Laporan	Jumlah Posisi Desember Tahun Sebelumnya
ASET		
Kas dalam Rupiah	119,606,800	132,766,500
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Penempatan pada Bank Lain	18,839,508,225	19,373,529,289
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	2,510,704
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	49,241,749,430	47,535,727,322
-/- Provisi Belum Diamortisasi	1,129,919,278	1,045,189,579
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	
-/- Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	148,049,975	235,789,128
-/- Cadangan Kerugian Restrukturisasi	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	464,564,702	193,103,620
Penyertaan Modal	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Agunan yang diambil alih	857,369,218	857,369,218
Properti Terbengkalai	0	0
Aset Tetap dan Inventaris	2,943,819,985	1,250,645,321
-/- Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai	1,220,199,182	1,107,832,693
Aset Tidak Berwujud	302,769,976	302,769,976
-/- Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai	278,191,657	256,495,407
Aset Antarkantor	0	0
Aset Keuangan Lainnya	0	0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	0
Aset Lainnya	1,072,318,169	1,015,289,345
TOTAL ASET	70,136,217,009	67,627,175,840
LIABILITAS		
Liabilitas Segera	88,267,562	133,887,378
Simpanan		
a. Tabungan	16,581,069,581	16,442,995,695
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0

FORM B.01.00
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Pos	Jumlah Posisi Desember Tahun Laporan	Jumlah Posisi Desember Tahun Sebelumnya
b. Deposito	29,132,394,997	30,041,732,677
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Simpanan dari Bank Lain	1,266,400,912	0
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Pinjaman yang Diterima	0	0
-/- Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
-/- Diskonto Belum Diamortisasi	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Antarkantor	0	0
Liabilitas Lainnya	854,657,679	857,296,626
TOTAL LIABILITAS	47,922,790,731	47,475,912,376
EKUITAS		
Modal Disetor		
a. Modal Dasar	16,000,000,000	16,000,000,000
b. Modal yang Belum Disetor -/-	12,000,000,000	12,000,000,000
Tambahan Modal Disetor		
a. Agio	0	0
b. Modal Sumbangan	0	0
c. Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
d. Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Ekuitas Lain		
a. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
c. Lainnya	0	0
d. Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan		
a. Umum	800,000,000	800,000,000
b. Tujuan	0	0
Laba (Rugi)		
a. Tahun-Tahun Lalu	15,351,263,464	12,932,231,004
b. Tahun Berjalan	2,062,162,814	2,419,032,460

FORM B.01.00

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Pos	Jumlah Posisi Desember Tahun Laporan	Jumlah Posisi Desember Tahun Sebelumnya
TOTAL EKUITAS	22,213,426,278	20,151,263,464
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	70,136,217,009	67,627,175,840

FORM B.02.00
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Pos	Jumlah Posisi Desember Tahun Laporan	Jumlah Posisi Desember Tahun Sebelumnya
Pendapatan Operasional	12,280,401,272	12,482,537,593
1 Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual		
i. Surat Berharga	0	0
ii. Penempatan pada Bank Lain		
Giro	112,282,001	107,747,786
Tabungan	16,198,099	50,917,484
Deposito	802,744,255	792,051,268
Sertifikat Deposito	0	0
iii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	9,663,090,047	9,730,219,628
b. Provisi Kredit		
i. Kepada Bank Lain	0	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	779,092,739	878,738,751
c. Biaya Transaksi -/-		
i. Surat Berharga	0	0
ii. Kredit yang Diberikan		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	15,698,500	0
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-	0	0
2 Pendapatan Lainnya		
a. Pendapatan Jasa Transaksi	310,000	1,058,060
b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	0	0
c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	0	0
d. Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku	130,000,000	50,500,000
e. Pemulihan CKPN	30,469,819	75,572,354
f. Dividen	0	0
g. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0	0
h. Keuntungan penjualan AYDA	0	0
i. Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	0	0

FORM B.02.00
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Pos	Jumlah Posisi Desember Tahun Laporan	Jumlah Posisi Desember Tahun Sebelumnya
j. Pemulihan penurunan nilai AYDA	0	0
k. Lainnya	761,912,812	795,732,262
Beban Operasional	9,827,920,518	9,618,627,082
1 Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual		
i. Tabungan	405,479,582	413,283,328
ii. Deposito	1,885,175,998	1,885,189,615
iii. Simpanan dari bank lain	15,770,226	0
iv. Pinjaman yang diterima		
1) Dari Bank Indonesia	0	0
2) Dari Bank Lain	0	0
3) Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
4) Berupa Pinjaman Subordinasi	0	0
v. Lainnya	0	0
b. Biaya Transaksi		
i. Kepada Bank Lain	0	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
2 Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
3 Beban Kerugian Penurunan Nilai		
a. Surat Berharga	0	0
b. Penempatan pada Bank Lain	14,272,528	10,396,467
c. Kredit yang Diberikan		
i. Kepada Bank Lain	0	0
ii. Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	285,147,669	38,115,714
d. Penyertaan Modal	0	0
e. Aset Keuangan Lainnya	0	0
4 Beban Pemasaran	225,933,809	192,338,069
5 Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
6 Beban Administrasi dan Umum		
a. Beban Tenaga Kerja		
i. Gaji dan Upah	4,738,611,182	4,731,470,100

FORM B.02.00
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Pos	Jumlah Posisi Desember Tahun Laporan	Jumlah Posisi Desember Tahun Sebelumnya
ii. Honorarium	213,928,103	149,756,250
iii. Lainnya	5,400,000	4,000,000
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	158,906,600	399,024,449
c. Beban Sewa		
i. Gedung Kantor	277,592,790	264,581,513
ii. Lainnya	269,262,000	269,262,347
d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	137,002,740	78,996,625
e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	0
f. Beban Premi Asuransi	7,216,200	4,170,001
g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	87,572,397	82,106,541
h. Beban Barang dan Jasa	925,762,410	917,733,976
i. Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	0	0
j. Kerugian terkait risiko operasional		
i. Kecurangan internal	0	0
ii. Kejahatan eksternal	0	0
k. Pajak-pajak	15,217,053	14,486,053
7 Beban Lainnya		
a. Kerugian Penjualan Valuta Asing	0	0
b. Kerugian Penjualan Surat Berharga	0	0
c. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0	0
d. Kerugian penjualan AYDA	0	0
e. Kerugian penurunan nilai AYDA	0	0
f. Lainnya	159,669,231	163,716,034
Laba (Rugi) Operasional	2,452,480,754	2,863,910,511
Pendapatan Non Operasional	101,202,256	106,825,820
1 Keuntungan Penjualan		
a. Aset Tetap dan Inventaris	600,000	0
2 Pemulihan Penurunan Nilai		
a. Aset Tetap dan Inventaris	0	0
b. Lainnya	0	0
3 Bunga Antar Kantor	0	0

FORM B.02.00
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Pos	Jumlah Posisi Desember Tahun Laporan	Jumlah Posisi Desember Tahun Sebelumnya
4 Selisih Kurs	0	0
5 Lainnya	100,602,256	106,825,820
Beban Non Operasional	51,028,150	38,437,855
1 Kerugian Penjualan/Kehilangan		
a. Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2 Kerugian Penurunan Nilai		
a. Aset Tetap dan Inventaris	0	0
b. Lainnya	0	0
3 Bunga Antar Kantor	0	0
4 Selisih Kurs	0	0
5 Lainnya	51,028,150	38,437,855
Laba (Rugi) Non Operasional	50,174,106	68,387,965
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	2,502,654,860	2,932,298,476
Taksiran Pajak Penghasilan	440,492,046	513,266,016
Pendapatan Pajak Tangguhan	0	0
Beban Pajak Tangguhan	0	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	2,062,162,814	2,419,032,460
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	0	0
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	2,062,162,814	2,419,032,460

FORM B.03.00
LAPORAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Rekening	Jumlah Posisi Desember Tahun Laporan	Jumlah Posisi Desember Tahun Sebelumnya
Tagihan Komitmen		
a. Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	0	0
b. Tagihan Komitmen Lainnya	3,864,323,700	3,895,823,700
Kewajiban Komitmen		
a. Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	0	0
b. Penerusan Kredit	0	0
c. Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit yang Diberikan	1,336,245,200	716,762,226
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Surat Berharga	0	0
4) Lainnya	0	0
b. Aset Produktif yang dihapusbuku		
1) Kredit yang Diberikan	2,002,165,025	2,175,910,625
2) Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	0	0
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku	0	0
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	212,053,181	212,053,181
Kewajiban Kontinjensi	0	0
Rekening Administratif Lainnya	0	0

FORM B.04.00
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Rekening	Modal Disetor	Tambahan Modal	Modal Sumbangan	DSM Ekuitas	Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	Surplus Revaluasi Aset Tetap	Cadangan Tujuan	Cadangan Umum	Saldo Laba yang Belum Ditentukan	Jumlah
Saldo per 31 Des 2022	4,000,000,000							800,000,000	12,932,231,004	17,732,231,004
Dividen										
Pembentukan Cadangan										
Setoran Modal										
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi										
Revaluasi Aset Tetap										
Laba/Rugi Periode Berjalan									2,419,032,460	2,419,032,460
Pos Penambah/Pengurang Lainnya										
Saldo per 31 Des 2023	4,000,000,000	0	0	0	0	0	0	800,000,000	15,351,263,464	20,151,263,464
Dividen										
Pembentukan Cadangan										
Setoran Modal										
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi										
Revaluasi Aset Tetap										
Laba/Rugi Periode Berjalan									2,062,162,813	2,062,162,813
Pos Penambah/Pengurang Lainnya										
Saldo per 31 Des 2024	4,000,000,000	0	0	0	0	0	0	800,000,000	17,413,426,277	22,213,426,277

FORM B.05.00
LAPORAN ARUS KAS
Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Pos	Saldo 31 Desember Tahun Laporan	Saldo 31 Desember Tahun Sebelumnya
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan pendapatan bunga	(170,569,276)	985,382,989
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	(99,646,012)	185,489,428
Penerimaan beban klaim asuransi	0	0
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	79,500,000	42,433,700
Pendapatan operasional lainnya	(170,045)	(670,248,492)
Pembayaran beban bunga	7,952,863	356,413,971
Beban gaji dan tunjangan	72,712,935	609,192,192
Beban umum dan administrasi	(79,116,381)	852,788,369
Beban operasional lainnya	(4,046,803)	25,757,003
Pendapatan non operasional lainnya	18,825,479	157,445,278
Beban non operasional lainnya	37,039,339	112,780,063
Pembayaran pajak penghasilan	(72,773,970)	(152,337,983)
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	0	0
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional	0	0
Penempatan pada bank lain	(534,021,064)	186,023,141
Kredit yang diberikan	1,706,022,108	4,156,318,059
Agunan yang diambil alih	0	407,102,018
Aset lain-lain	57,028,824	(373,961,582)
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	0	0
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional	0	0
Liabilitas segera	0	0
Tabungan	138,073,886	(61,905,921)
Deposito	(909,337,680)	2,581,190,274
Simpanan dari bank lain	1,266,400,912	0
Pinjaman yang diterima	0	0
Liabilitas imbalan kerja	0	0

FORM B.05.00

LAPORAN ARUS KAS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Pos	Saldo 31 Desember Tahun Laporan	Saldo 31 Desember Tahun Sebelumnya
Liabilitas lain-lain	(2,638,947)	415,603,055
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0	0
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi	1,511,238,191	9,815,467,584
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	1,693,174,664	56,964,900
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	0	2,220,000
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0	0
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	1,693,174,664	59,184,900
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	0	0
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	0	0
Pembayaran dividen	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari Aktivitas Pendanaan	0	0
Kas dan setara Kas awal periode	132,766,500	117,267,400
Kas dan setara Kas akhir periode	119,606,800	132,766,500
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	13,159,700	(15,499,100)

LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Nama BPR : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 2024

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, BPR Artha Mukti Santosa telah menjalani proses audit eksternal oleh kantor akuntan publik (KAP) Ida Nurhayati yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan No STTD.KAP-15/PM.021/2024. Audit atas laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 dilakukan secara independen sesuai dengan standar auditing yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil audit, KAP Ida Nurhayati memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan BPR Artha Mukti Santosa. Opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Audit oleh akuntan publik ini meliputi evaluasi atas pengendalian internal, pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dalam laporan keuangan, serta asesmen atas kebijakan akuntansi yang diterapkan.

Melalui audit tahunan ini, BPR berkomitmen untuk terus menjaga tata kelola keuangan yang transparan, patuh terhadap peraturan, dan memberikan kepercayaan kepada seluruh pemangku kepentingan.



PT BPR ARTHA MUKTI SANTOSA

KOTA SEMARANG

LAPORAN KEUANGAN

BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA

31 DESEMBER 2024

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Direksi

Laporan Posisi Keuangan..... 1

Laporan Laba Rugi..... 2

Laporan Perubahan Ekuitas..... 3

Laporan Arus Kas..... 4

Catatan Atas Laporan Keuangan..... 5

Gambaran Umum..... 5

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi..... 6

Penjelasan Pos-pos Neraca..... 10

Penjelasan Pos-pos Laba Rugi..... 15

Lampiran

Laporan Auditor Independen

SURAT PERNYATAAN DIREKSI



ARTHA MUKTI SANTOSA

pt. bank perekonomian rakyat

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Toto Wijatmiko, S.E
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No.167 Semarang
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Yuni Mardiaty, S.E., M.M
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No.167 Semarang
Jabatan : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT. BPR Artha Mukti Santosa;
2. Laporan Keuangan PT. BPR Artha Mukti Santosa telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP);
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BPR Artha Mukti Santosa telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan PT. BPR Artha Mukti Santosa tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal dalam PT. BPR Artha Mukti Santosa.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya.

Semarang, 17 April 2025

PT. BPR Artha Mukti Santosa


The blue circular stamp contains the text "ARTHA MUKTI SANTOSA pt. bank perekonomian rakyat". The red rectangular stamp contains the text "MATERAI TEMPEL Rp. 10.000 No. 100AMX238954173".

Toto Wijatmiko, S.E
Direktur Utama

Pusat : Jl. Jend. Sudirman 167 Semarang
Telp. (024) 7603323, (024) 7604267, (024) 7608811.
Cabang : Weleri (0294) 642828.
Kas : Jatisari (024) 76673322.
Website : www.bprams.com

Solusi Keuangan

LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

Dengan Angka Pembanding Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Kas dan Setara Kas	2b, 3	119.606.800	132.766.500
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	2c, 4	790.046.957	790.888.668
Penempatan pada Bank Lain	2d, 5	18.839.508.225	19.371.018.585
Kredit Yang Diberikan	2e, 6	47.499.215.475	46.061.644.995
Agunan Yang Diambil Alih	2g, 7	857.369.218	857.369.218
Aset Tetap dan Inventaris	2h, 8	1.723.620.803	142.812.628
Aset Tidak Berwujud	2i, 9	24.578.319	46.274.569
Aset Lain-lain	2j, 10	282.271.212	224.400.677
JUMLAH ASET		70.136.217.009	67.627.175.840
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN			
Kewajiban Segera	2k, 11	88.267.562	133.887.378
Utang Bunga	2l, 12	84.121.302	82.135.611
Utang Pajak	2m, 13	102.275.661	145.862.624
Simpanan Nasabah	2n, 14	45.713.464.578	46.484.728.372
Simpanan dari Bank Lain	2o, 15	1.266.400.912	-
Kewajiban Imbalan Kerja	2q, 16	198.894.222	230.894.222
Kewajiban Lain-lain	2r, 17	469.366.495	398.404.169
Jumlah Kewajiban		47.922.790.732	47.475.912.376
EKUITAS			
Modal	18	4.000.000.000	4.000.000.000
Cadangan Umum	19	800.000.000	800.000.000
Saldo Laba	20	17.413.426.277	15.351.263.464
Jumlah Ekuitas		22.213.426.277	20.151.263.464
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		70.136.217.009	67.627.175.840

Semarang, 17 April 2025

Menyetujui,


ARTHA MUKTI SANTOSA
pt. bank perkecambahan rakyat
Toto Wijatmiko, SE
Direktur Utama

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2024	2023
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Bunga	2u, 21	11.357.708.642	11.559.674.917
Pendapatan Operasional Lainnya	2u, 22	922.692.631	922.862.677
Jumlah Pendapatan Operasional		12.280.401.272	12.482.537.594
Beban Operasional			
Beban Bunga	2u, 23	2.397.873.162	2.386.680.076
Beban Penyisihan Kerugian	2u, 24	299.420.197	48.512.181
Beban Pemasaran	2u, 25	225.933.809	192.338.069
Beban Administrasi Umum	2u, 26	6.904.693.349	6.991.096.757
Jumlah Beban Operasional		9.827.920.518	9.618.627.083
Laba (Rugi) Usaha		2.452.480.755	2.863.910.511
Pendapatan dan (Beban) Non-Operasional			
Pendapatan Non-Operasional	2u, 27	101.202.255	106.825.820
Beban Non-Operasional	2u, 27	51.028.151	38.437.854
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional		50.174.105	68.387.965
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan		2.502.654.859	2.932.298.476
Taksiran Pajak Penghasilan	2p, 28	(440.492.046)	(513.266.016)
Laba (Rugi) Neto		2.062.162.813	2.419.032.460

Semarang, 17 April 2025
Menyetujui,


PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
 pt. bpr artha mukti santosa
 PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
Toto Wilatmiko, SE
 Direktur Utama

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dan laporan keuangan secara keseluruhan.*

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
Dengan Angka Pembanding Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Modal	Cadangan Umum	Saldo Laba	Jumlah
Saldo 31 Desember 2022	4,000,000,000	800,000,000	12,932,231,004	17,732,231,004
Pembagian Dividen				-
Koreksi dari kantor pajak				-
Laba Ditahan				-
Penambahan Cadangan				-
Laba (Rugi) Periode Berjalan			2,419,032,460	2,419,032,460
Saldo 31 Desember 2023	4,000,000,000	800,000,000	15,351,263,464	20,151,263,464
Pembagian Dividen	-	-	-	-
Koreksi dari Kantor Pajak	-	-	-	-
Laba Ditahan	-	-	-	-
Penambahan Cadangan	-	-	-	-
Laba (Rugi) Periode Berjalan	-	-	2,062,162,813	2,062,162,813
Saldo 31 Desember 2024	4,000,000,000	800,000,000	17,413,426,277	22,213,426,277

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024
Dengan Angka Pembanding Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2024	2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi :		
Laba netto	2,062,162,813	2,419,032,460
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba netto menjadi kas bersih:		
Penyusutan Aset Tetap	112,366,489	57,323,502
Penyusutan Aset Tidak Berwujud	21,696,250	21,673,125
Penurunan (kenaikan) aktivitas operasi:		
Pendapatan bunga yang akan diterima	841,711	12,325,216
Penempatan Pada Bank Lain	534,021,064	(186,023,141)
PPKA Penempatan Pada Bank Lain	(2,510,704)	(18,341,456)
Kredit Yang Diberikan	(1,621,292,411)	(3,998,344,888)
Pendapatan Ditangguhkan	(87,739,152)	(178,582,861)
PPKA Kredit yang Diberikan	271,461,082	(8,718,717)
Agunan yang Diambil Alih	-	(407,102,018)
Aset Lain-lain	(57,870,535)	(86,337,819)
Penurunan (Kenaikan) aktivitas operasi:		
Kewajiban Segera Dibayar	(45,619,816)	(54,223,477)
Utang Bunga	1,985,691	16,166,527
Utang Pajak	(43,586,963)	(124,199,637)
Simpanan Nasabah	(771,263,795)	2,519,284,352
Simpanan dari Bank Lain	1,266,400,912	-
Kewajiban Imbalan Kerja	(32,000,000)	-
Kewajiban Lain-lain	70,962,326	90,752,833
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi	1,680,014,963	74,684,001
Arus Kas dari Aktivitas Investasi :		
Kenaikan Aset Tetap & Inventaris	(1,693,174,664)	(56,964,900)
Kenaikan Aset Tidak Berwujud	-	(2,220,000)
Arus Kas Neto untuk Aktivitas Investasi	(1,693,174,664)	(59,184,900)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan:		
Laba Ditahan	-	-
Koreksi dari kantor pajak	-	-
Pembagian Dividen	-	-
Pembulatan	-	(1)
Arus Kas Neto untuk Aktivitas Pendanaan	-	(1)
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas	(13,159,700)	15,499,100
Kas pada Awal Periode	132,766,500	117,267,400
Kas pada Akhir Periode	119,606,800	132,766,500
Selisih Kenaikan (Penurunan) Kas	(13,159,700)	15,499,100

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2023
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM

a. Sejarah

PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Mukti Santosa didirikan pada tahun 2004 di Semarang berdasarkan akta nomor: 3 tanggal 17 Mei 2004 dari Notaris Bambang Soegianto, SH., dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: C-15524.HT.01.01 TH.2004 tanggal 21 Juni 2004.

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir mengenai perubahan pengurus yang dinyatakan dengan akta No. 18 tanggal 23 Juni 2023 dari Notaris Dr. Edith Ratna, SH., perubahan anggaran dasar ini telah dilaporkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan jawaban penerimaan surat No. AHU-AH.01.09-0131100 tanggal 23 Juni 2023.

b. Tempat Kedudukan dan Jaringan Kantor

PT. BPR Artha Mukti Santosa berkantor pusat di Jl. Jenderal Sudirman No.167, Krobokan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan memiliki 1 Kantor Cabang di .Ruko Griya Weleri Makmur Asri, Jl. Utama Timur A1-A2, Sari Pandan, Weleri, Kec. Weleri, Kabupaten Kendal serta memiliki 1 kantor kas di Jl. Jatisari Permai Blok B No. 1, Mijen,

c. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dirikan PT. BPR Artha Mukti Santosa didirikan dengan maksud untuk melakukan usaha sebagai Bank Perekonomian Rakyat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT. BPR Artha Mukti Santosa menyelenggarakan

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa Deposito Berjangka, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit / pinjaman bagi pedagang, pengusaha kecil, dan atau masyarakat perdesaan;
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Giro, atau jenis lainnya pada Bank Lain;

d. Visi dan Misi

Visi

Menjadi penyedia jasa yang terkemuka dan profesional yang memberikan nilai lebih kepada konsumen, karyawan dan para pemegang saham.

Misi

Menyediakan jasa yang berkualitas dengan menjunjung tinggi terwujudnya :

- Kepuasan Konsumen
- Proses yang cost effective
- Sumber daya manusia yang produktif dan berkomitmen

e. Susunan Pengurus

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Tn. Catur Budi Pamungkas, S.Kom
Komisaris	: Tn. Andri Eko Harseno, S.Kom

Direksi :

Direktur Utama	: Tn. Toto Wijatmiko, SE
Direktur Operasional dan YMFK	: Ny. Yuni Mardiaty, SE., MM

Berdasarkan SK OJK Nomor : SR-48/KR.0313/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Keputusan Pencalonan Komisaris Utama PT BPR Artha Mukti Santosa menyatakan laporan pengangkatan Sdr. Catur Budi Pamungkas sebagai Komisaris Utama PT BPR Artha Mukti Santosa.

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2023
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. GAMBARAN UMUM (LANJUTAN)

f. Pemegang Saham

Susunan pemegang saham per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Lembar	Nominal (Rp)	%
1	Ny. Irma Wardhani, SE	200	2,000,000,000	50%
2	PT. Yasaniaga Utama Mulia	200	2,000,000,000	50%
Total		400	4,000,000,000	100%

Berdasarkan Akta Notaris nomor 9 tanggal 06 September 2024 yang dibuat oleh Notaris DR. Edith Ratna Mulyaningrum tentang perubahan anggaran dasar PT BPR Artha Mukti Santosa. Pencatatan perubahan anggaran dasar sudah dicatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai surat nomor:S-258/KO.13/2024 tanggal 22 Oktober 2024. .

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Pedoman Akuntansi Bank Perekonomian Rakyat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan Bank berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Pedoman Akuntansi Bank Perekonomian Rakyat (PA-BPR) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Peraturan Bank Indonesia.

Dasar pengukuran laporan keuangan adalah berdasarkan biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, nilai sekarang, dan nilai wajar. Sedangkan, dasar penyusunan laporan keuangan adalah dasar akrual kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung, dalam metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengkoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut di klasifikasikan sebagai komponen kas dan setara kas.

b. Kas dan Setara Kas

Kas adalah mata uang kertas dan logam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin Anjungan Tunai Mandiri dan kas dalam perjalanan.

Kas dan setara kas adalah meliputi kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi likuid jangka pendek lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya"

c. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

Pendapatan bunga yang akan diterima terdiri dari pendapatan bunga dari kualitas kredit dengan kualitas lancar dan dalam perhatian khusus yang telah diakui sebagai pendapatan tapi belum diterima pembayarannya, termasuk pengakuan bunga dari penempatan pada bank lain.

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2023
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

d. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktifitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*.

Giro pada bank umum adalah rekening giro BPR pada bank umum dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional.

Tabungan bank lain adalah rekening tabungan BPR pada bank umum dan BPR lain dalam mata uang rupiah dengan tujuan untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional.

Deposito bank lain adalah penempatan dana BPR pada bank umum dan BPR lain dalam bentuk deposito berjangka dengan tujuan untuk menunjang aktivitas operasional.

e. Kredit yang Diberikan

Kredit Yang Diberikan merupakan penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-meminjam antara BPR dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar pokok kredit dan digolongkan atas Kredit Lancar (L), Dengan Perhatian Khusus (DPK), Kredit Kurang Lancar (KL), Kredit Diragukan (D) dan Macet (M). Kualitas Kredit dinilai berdasarkan Rasio Kualitas aktiva Produktif dan Rasio Non Performing Loan (NPL).

Kredit yang diberikan dinyatakan sebesar produk kredit. Untuk kredit yang direstrukturisasi dalam pokok kredit termasuk bunga dan biaya lain yang dialihkan menjadi pokok kredit. Bunga yang dialihkan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan, sedang bagian kredit yang belum digunakan oleh nasabah dicatat dan dilaporkan dalam laporan komitmen dan kontijensi.

Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit/baki debet dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi.

Provisi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga.

Di dalam kredit tidak termasuk bentuk-bentuk pembiayaan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah.

f. Penyisihan Kerugian

Penyisihan kerugian aset produktif serta estimasi kerugian komitmen dan kontijensi dibentuk berdasarkan penelaahan manajemen terhadap kualitas masing-masing aset produktif pada akhir tahun dengan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai pembentukan penyisihan kerugian aset produktif.

Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) yang dibentuk untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2024 menggunakan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif sebagai acuan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 10 Januari 2024 yang diberlakukan mulai 11 Januari 2024.

Penggolongan	Persentase penyisihan
• Lancar	: 0.50%
• Dalam Perhatian Khusus	: 3% setelah dikurangi agunan
• Kurang Lancar	: 10% setelah dikurangi agunan
• Diragukan	: 50% setelah dikurangi agunan
• Macet	: 100% setelah dikurangi agunan

g. Agunan Yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih merupakan aset yang diperoleh PT BPR Artha Mukti Santosa baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada PT BPR Artha Mukti Santosa.

Agunan yang diambil alih disajikan secara terpisah dari aset lainnya sebesar nilai tercatat atas nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, mana yang lebih rendah.

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2023
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

h. Aset Tetap dan Inventaris

Aset tetap inventaris merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau untuk administratif dan diharapkan akan digunakan lebih dari 1 periode. Aset tetap dan Inventaris meliputi antara lain: tanah, bangunan, dan inventaris (peralatan, perlengkapan, dan kendaraan).

Aset tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan dan penyajian di neraca dengan dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali tanah dinyatakan berdasarkan nilai perolehan. Bank menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dalam menghitung penyusutan sesuai dengan umur ekonomis aset. Pengelompokan umur masing-masing aset tetap disesuaikan dengan jenis aset.

Tarif penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line methode*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap	Tahun	Persentase Penyusutan
Tanah	-	-
Bangunan	20 tahun	5%
Inventaris I	4 tahun	25%
Inventaris II	8 tahun	12.50%

i. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Aset tidak berwujud diamortisasikan secara sistematis selama umur manfaat. Penurunan nilai aset tidak berwujud diakui sebagai kerugian periode terjadinya. Aset tidak berwujud disajikan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai (jika ada).

j. Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri. Komponen aset lain-lain, antara lain:

- Pajak dibayar dimuka.
- Biaya dibayar dimuka sebagai contoh premi pinjaman simpanan.
- Mata uang kertas dan logam yang ditarik dari peredaran dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah namun masih dalam masa tenggang pertukaran.
- Piutang dari perusahaan asuransi.
- Lainnya, misalnya *Commemorative coins/notes*.

Aset lain-lain diakui pada saat terjadinya sebesar biaya perolehan.

k. Kewajiban Segera

Kewajiban segera merupakan kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Kewajiban segera dibayar meliputi: saldo rekening tabungan yang sudah ditutup dan deposito yang sudah jatuh tempo namun belum diambil oleh pemilik, kiriman uang masuk/keluar, kredit yang diberikan yang bersaldo kredit ketika nasabah melakukan pembayaran yang melebihi jumlah terutang secara kontraktual, selisih hasil penjualan agunan yang dikuasai BPR yang merupakan hak debitur, dividen yang sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan dan denda/sanksi kewajiban membayar kepada instansi terkait.

l. Utang Bunga

Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo.

m. Utang Pajak

Utang pajak diakui sebesar jumlah yang harus disetorkan ke Kas Negara.

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2023
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

n. Simpanan

Saldo tabungan disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR kepada nasabah.

Deposito disajikan sebesar jumlah nominal atau sebesar kewajiban BPR yang diperjanjikan. Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan pos utang bunga.

o. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain merupakan kewajiban bank kepada bank lain dalam bentuk tabungan dan deposito.

Tabungan disajikan sebesar kewajiban bank kepada bank lain pemilik tabungan. Deposito disajikan sebesar jumlah nominalnya atau sebesar kewajiban bank yang diperjanjikan sedangkan kewajiban bunga deposito yang belum atau yang sudah jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.

p. Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 24 tentang pajak penghasilan, beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

q. Imbalan Pasca Kerja

Bank mempunyai kewajiban untuk memberi Imbalan Pasca Kerja yang didasarkan atas masa kerja (Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-150/Men/2000). Undang-undang No. 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan menggantikan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja di atas. Imbalan Pasca Kerja adalah jumlah dari manfaat masa datang yang akan diterima karyawan sebagai imbalan dari jasa mereka saat ini dan masa lalu. Perusahaan sudah mencadangkan Imbalan Pasca Kerja berdasarkan SK Direksi Nomor : 002/SK-DIR/BPR-AMS/DIR III/2021 tertanggal 25 Maret 2021.

r. Kewajiban Lain-lain

Kewajiban lainnya merupakan pos yang dimaksud untuk menampung kewajiban bank yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos kewajiban yang ada, dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri termasuk Kewajiban lain-lain diakui sebesar jumlah yang harus diselesaikan dan disajikan secara gabungan.

s. Modal Disetor

Modal disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal bank berupa kas maupun aset non-kas. Modal disetor berdasarkan:

- Jumlah uang yang diterima
- Setoran saham dalam bentuk uang, sesuai transaksi nyata
- Besarnya utang yang dikonversi menjadi modal
- Setoran saham dalam dividen saham dilakukan dengan harga wajar saham, yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham
- Nilai wajar aset non-kas yang diterima

t. Saldo Laba

Saldo laba merupakan akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus, revaluasi aset tetap.

Saldo laba dikelompokkan menjadi:

- Cadangan tujuan yaitu cadangan yang dibentuk dari laba netto setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.
- Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari laba netto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal.
- Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya terdiri dari laba periode lalu yang belum ditetapkan penggunaannya dalam laba-rugi periode berjalan.

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2023
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (LANJUTAN)

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Pendapatan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara handal.

Pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainnya dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet (*Non Performing Loan*) diakui apabila pendapatan benar-benar diterima pendapatan bunga dengan klasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet yang belum diterima dilaporkan sebagai pendapatan bunga dalam penyelesaian dalam laporan komitmen dan kontijensi. Pengakuan beban digunakan metode *accrual basis*.

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

3. Kas dan Setara Kas

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Akun ini terdiri dari		
Kas	119,606,800	132,766,500
Jumlah Kas dan Setara Kas	119,606,800	132,766,500

4. Pendapatan Bunga yang Akan Diterima

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Akun ini terdiri dari:		
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima - Kredit	741,894,903	744,062,296
Pendapatan Bunga yang Akan Diterima - ABA	48,152,054	46,826,372
Jumlah Pendapatan Bunga yang Akan Diterima	790,046,957	790,888,668

5. Penempatan pada Bank Lain

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Akun ini terdiri dari:		
Giro		
PT. Bank Mayapada Tbk	201,065,572	1,140,822
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	466,130,413	202,951,580
PT. Bank Danamon Indonesia Tbk	1,340,265,199	87,880,674
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	353,398,741	391,744,248
PT. Bank Central Asia Tbk	251,626,522	138,037,202
PT. Bank Mayapada	805,000	2,501,000,000
PT. Bank Capital Indonesia Tbk	1,994,444,910	-
Jumlah Giro	4,607,736,357	3,322,754,526
Tabungan		
PT. BPR Lestari Bali	-	925,561
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,906,438,717	77,755,781
PT. Bank Danamon Indonesia Tbk	162,624,042	197,352,672
PT. Bank UOB Buana	45,747,675	153,864,640
PT. Bank Jateng Kantor Pusat	38,484,229	24,940,763
PT. Bank Permata Tbk	38,420,055	14,326,247
PT. Bank BTN Syariah	-	1,609,099
PT. Bank Jateng Cabang Weleri	10,057,150	-
Jumlah Tabungan	2,201,771,868	470,774,763

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Dengan Angka Pembanding Tahun 2023

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. Penempatan pada Bank Lain (Lanjutan)

Akun ini terdiri dari:

Deposito

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PT. BPR Kedung Arto	2,000,000,000	2,000,000,000
PT. BPR Fianka Rezalina Fatma	-	1,300,000,000
PT. Bank Jateng	30,000,000	30,000,000
PT. BPR Ukabima Nindya Raharja	1,000,000,000	2,000,000,000
PT. BPR Panasayu Arthalayan Sejahtera	1,500,000,000	2,000,000,000
PT. BPR Weleri Jaya Persada	-	250,000,000
PT. BPR Restu Tawangmangu Jaya	-	500,000,000
PT. BPR Arto Moro	-	2,000,000,000
PT. BPR Modern Express	2,000,000,000	2,000,000,000
PT. BPR Bumi Pandawa Raharja	-	1,000,000,000
PT. BPRS Unisia Insan Indonesia	1,500,000,000	500,000,000
PT. BPR Lawu Artha	2,000,000,000	1,000,000,000
PT. BPR Dassa	-	1,000,000,000
PT. BPR Mekar Nugraha	1,000,000,000	-
PT. BPRS Dana Amanah	1,000,000,000	-
Jumlah Deposito	12,030,000,000	15,580,000,000
Jumlah Penempatan pada PT. Bank lain	18,839,508,225	19,373,529,289
Penyisihan Kerugian Penempatan	-	(2,510,704)
Jumlah	18,839,508,225	19,371,018,585

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian penempatan adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	2,510,704	20,852,160
Beban PPAP	14,272,528	38,115,714
Pemulihan PPAP	(16,783,232)	(56,457,170)
Jumlah	-	2,510,704

6. Kredit yang Diberikan

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan Jenis Penggunaan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kredit Modal Kerja	29,853,193,396	31,478,038,936
Kredit Konsumtif	14,604,909,230	12,791,815,980
Kredit Investasi	4,783,646,805	3,265,872,405
Provisi	(1,129,919,277)	(1,045,189,579)
Pendapatan Ditangguhkan	(148,049,975)	(235,789,127)
Penyisihan Kerugian Kredit	(464,564,702)	(193,103,620)
Jumlah	47,499,215,475	46,061,644,995

b. Berdasarkan Kolektabilitas

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Lancar	31,971,734,009	33,626,939,751
Dalam Perhatian Khusus	9,878,279,257	10,171,527,709
Kurang Lancar	2,023,888,500	426,602,800
Diragukan	654,131,200	80,964,200
Macet	4,713,716,464	3,229,692,861
Provisi	(1,129,919,277)	(1,045,189,579)
Pendapatan Ditangguhkan	(148,049,975)	(235,789,127)
Jumlah	47,963,780,178	46,254,748,615
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)	(464,564,702)	(193,103,620)
Jumlah (Netto)	47,499,215,475	46,061,644,995

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
 Dengan Angka Pembanding Tahun 2023
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. Kredit yang Diberikan (Lanjutan)

31 Desember 2024

Akun ini terdiri dari:

c. Berdasarkan Keterkaitan 2024

Pihak Terkait	404,183,200
Pihak Tidak Terkait	48,837,566,230
Provisi	(1,129,919,277)
Pendapatan Ditangguhkan	(148,049,975)
Jumlah	47,963,780,178
Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA)	(464,564,702)
Jumlah (Netto)	47,499,215,475

Catatan sehubungan akun ini:

Berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas kredit yang diberikan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan kredit yang diberikan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan. Sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Manajemen wajib mengungkapkan Kredit berdasarkan Kolektibilitas, Jangka Waktu Kredit, Sektor Ekonomi dan Suku Bunga.

Berikut ini adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan:

1. Tingkat suku bunga rata-rata pada tahun 2024 adalah sebesar 20,74%.
2. Kredit yang diberikan dijamin agunan yang diikat dengan hak-hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lainnya yang umumnya diterima oleh perbankan.
3. Kredit modal kerja diberikan kepada debitur untuk kepentingan modal kerja dan barang-barang modal.
4. Kredit konsumsi terdiri atas kredit pembelian rumah, kendaraan dan perabot rumah serta keperluan konsumsi

Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian penempatan adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	193,103,620	201,822,337
Beban PPAP	285,147,669	10,396,467
Pemulihan PPAP	(13,686,587)	(19,115,184)
Jumlah	464,564,702	193,103,620

7. Agunan Yang Diambil Alih

31 Desember 2024

31 Desember 2023

Akun ini terdiri dari:

Agunan yang diambil alih

Jumlah

857,369,218

857,369,218

857,369,218

857,369,218

8. Aset Tetap dan Inventaris

Akun ini terdiri dari:

31 Desember 2024

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Harga Perolehan:

Gedung	-	1,618,118,664	-	1,618,118,664
Kendaraan	49,675,000	-	-	49,675,000
Peralatan	1,200,970,321	77,996,000	2,940,000	1,276,026,321
Jumlah	1,250,645,321	1,696,114,664	2,940,000	2,943,819,985

Akumulasi Penyusutan:

Akm Peny Gedung	-	56,273,753	-	56,273,753
Akm Peny Kendaraan	49,675,000	-	-	49,675,000
Akm Peny Peralatan	1,058,157,693	59,032,735	2,940,000	1,114,250,428
Jumlah	1,107,832,693	115,306,488	2,940,000	1,220,199,181
Nilai Buku:	142,812,628			1,723,620,804

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Dengan Angka Pembanding Tahun 2023

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. Aset Tetap dan Inventaris (Lanjutan)

Akun ini terdiri dari:

31 Desember 2023	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan:				
Kendaraan	49,675,000	-	-	49,675,000
Peralatan	1,144,005,421	56,964,900		1,200,970,321
Jumlah	1,193,680,421	56,964,900	-	1,250,645,321
Akumulasi Penyusutan:				
Akm Peny Kendaraan	48,225,000	1,450,000	-	49,675,000
Akm Peny Peralatan	1,002,284,191	55,873,502	-	1,058,157,693
Jumlah	1,050,509,191	57,323,502	-	1,107,832,693
Nilai Buku:	143,171,230			142,812,628

Catatan sehubungan akun ini:

Terdapat pengurangan harga perolehan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp 2.940.000 berasal dari penjualan aset berupa AC Ops Ruang Server.

9. Aset Tidak Berwujud

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Tidak Berwujud	302,769,976	302,769,976
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(278,191,657)	(256,495,407)
Jumlah Aset Tidak Berwujud	24,578,319	46,274,569

10. Aset Lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Sewa Kantor	173,611,109	222,900,677
Persediaan Materai	1,500,000	1,500,000
Biaya Dibayar Dimuka - Pemeliharaan CBS	10,785,500	-
Lainnya	96,374,603	-
Jumlah Aset Lainnya	282,271,212	224,400,677

11. Kewajiban Segera

Akun ini terdiri dari :

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Titipan Angsuran	26,363,500	60,447,488
PPh Pasal 4 Ayat 2	35,152,677	37,694,487
PPh Pasal 21	16,054,490	16,553,566
Titipan Premi Asuransi	7,739,543	16,251,406
PPh Pasal 23	717,952	804,496
Kewajiban BPJS	2,239,400	2,135,935
Jumlah Kewajiban Segera Dibayar	88,267,562	133,887,378

12. Utang Bunga

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Akrual Bunga Deposito	82,494,966	80,555,647
Akrual Bunga Tabungan	1,626,336	1,579,964
Jumlah Utang Bunga	84,121,302	82,135,611

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Dengan Angka Pembanding Tahun 2023

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

13. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PPH Pasal 25	48,770,002	67,239,218
Utang PPh Pasal 25/29	53,505,659	78,623,406
Jumlah Utang Pajak	102,275,661	145,862,624

14. Simpanan

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tabungan		
Pihak Ketiga	15,983,617,759	16,269,610,832
Pihak Terkait	597,451,822	173,384,863
Jumlah Tabungan	16,581,069,581	16,442,995,695
Deposito		
Deposito 1 Bulan	6,545,307,396	7,241,762,155
Deposito 3 Bulan	17,038,457,731	18,239,813,444
Deposito 6 Bulan	5,148,629,870	4,060,157,078
Deposito 12 Bulan	400,000,000	500,000,000
Jumlah Deposito	29,132,394,997	30,041,732,677
Jumlah Simpanan Nasabah	45,713,464,578	46,484,728,372

15. Simpanan Dari Bank Lain

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PT. BPR Panasayu Arthalayan Sejahtera	1,266,400,912	-
Jumlah Simpanan Dari Bank Lain	1,266,400,912	-

16. Kewajiban Imbalan Kerja

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Imbalan Pasca Kerja	198,894,222	230,894,222
Jumlah Kewajiban Imbalan Kerja	198,894,222	230,894,222

17. Kewajiban Lain-lain

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Titipan Bunga Deposito	-	5,754,169
Lainnya	469,366,495	392,650,000
Jumlah Kewajiban Lain-lain	469,366,495	398,404,169

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Dengan Angka Pembanding Tahun 2023

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

18. Modal

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Akun ini terdiri dari:		
Modal Disetor	4,000,000,000	4,000,000,000
Jumlah Modal Disetor	4,000,000,000	4,000,000,000
Susunan pemegang saham per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:		
	Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
1. Ny. Irma Wardhani, SE	2,000,000,000	50%
2. PT. Yasaniaga Utama Mulia	2,000,000,000	50%
Jumlah	4,000,000,000	100%

Catatan sehubungan akun ini:

Berdasarkan Akta Notaris nomor 9 tanggal 06September 2024 yang dibuat oleh Notaris DR. Edith Ratna Mulyaningrum tentang perubahan anggaran dasar PT BPR Artha Mukti Santosa. Pencatatan perubahan anggaran dasar sudah dicatat dalam aministrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai surat nomor:S-258/KO.13/2024 tanggal 22 Oktober 2024. .

19. Cadangan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Akun ini terdiri dari:		
Cadangan Umum	800,000,000	800,000,000
Jumlah Cadangan	800,000,000	800,000,000

20. Saldo Laba

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Akun ini terdiri dari:		
Laba Belum Ditentukan Tujuannya	15,351,263,464	12,932,231,004
Laba Tahun Berjalan	2,062,162,813	2,419,032,460
Jumlah Laba Rugi	17,413,426,277	15,351,263,464

21. Pendapatan Bunga

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Akun ini terdiri dari:		
Pendapatan Bunga Kontraktual		
Bunga Kredit	9,663,090,048	9,730,219,628
Bunga Deposito Berjangka	802,744,255	792,051,268
Bunga Tabungan dan Jasa Giro	128,480,100	158,665,270
Jumlah Pendapatan Bunga Kontraktual	10,594,314,403	10,680,936,166
Provisi dan Administrasi	779,092,739	878,738,751
Biaya Transaksi Yang Ditangguhkan	(15,698,500)	-
Jumlah Pendapatan Bunga	11,357,708,642	11,559,674,917

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Dengan Angka Pembanding Tahun 2023

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

22. Pendapatan Operasional Lainnya

Akun ini terdiri dari:

Penyesuaian Kelebihan Penyisihan
Denda Keterlambatan Angsuran
Administrasi Kredit
Administrasi Lainnya
Penerimaan Kembali Penghapusbukuan
Tutup Rekening
Jasa Transaksi
Pinalti
Administrasi Tabungan Bulanan
Roya
PPOB Bank Lain
Lainnya
Jumlah

**Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember**

2024	2023
30,469,819	75,572,354
546,100,062	512,807,278
50,650,000	64,300,000
80,852,900	130,568,518
130,000,000	50,500,000
8,682,621	12,199,387
310,000	1,058,060
1,540,083	-
48,994,646	-
25,000,000	-
92,500	-
-	75,857,080
922,692,631	922,862,677

23. Beban Bunga

Akun ini terdiri dari:

Simpanan dari Bank Lain
Kepada Pihak Ketiga
Deposito Berjangka
Tabungan
Premi Simpanan

Jumlah Beban Bunga**Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember**

2024	2023
15,770,226	-
1,885,175,998	1,885,189,615
405,479,582	413,283,328
91,447,357	88,207,133
2,397,873,162	2,386,680,076

24. Beban Penyisihan Kerugian

Akun ini terdiri dari:

Beban Penyisihan Kerugian Kredit
Beban Penyisihan Kerugian Penempatan Pada Bank Lain
Jumlah Beban Penyisihan Kerugian

**Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember**

2024	2023
285,147,669	10,396,467
14,272,528	38,115,714
299,420,197	48,512,181

25. Beban Pemasaran

Akun ini terdiri dari:

Beban Promosi

Jumlah Beban Pemasaran**Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember**

2024	2023
225,933,809	192,338,069
225,933,809	192,338,069

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Dengan Angka Pembanding Tahun 2023

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

26. Beban Administrasi Umum

Akun ini terdiri dari:

Beban Gaji, Upah dan Honorarium Pegawai
Beban Sewa
Beban Barang dan Jasa Lainnya
Beban Premi - BPJS
Beban Transport
Beban Telepon, Listrik, dan Air
Beban Pemeliharaan dan Perbaikan
Beban Konsumsi
Beban Pendidikan
Beban Pajak Non Pajak Penghasilan
Beban Penagihan dan Penarikan
Beban Rumah Tangga
Beban Percetakan, Foto copy dan Alat Tulis
Beban Administrasi
Beban Prestasi
Beban Asuransi Kas
Beban Asuransi Kendaraan Inventaris
Beban Asuransi Kebakaran
Beban Peralatan Kantor
Beban Penyusutan
Beban Penyusutan Aset Tak Berwujud
Beban Literasi
Beban Seragam
Lainnya

**Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember****2024****2023**

4,666,043,659	4,604,775,344
546,854,790	533,843,860
257,497,762	244,452,598
286,495,626	276,451,006
241,574,797	264,673,080
184,838,157	180,924,900
88,552,897	82,106,541
93,643,396	99,742,595
158,906,600	399,024,449
15,217,053	14,486,053
46,504,525	56,012,100
27,333,918	24,011,606
113,188,385	100,525,797
16,292,344	15,096,800
5,400,000	4,000,000
4,670,400	3,915,800
230,800	254,201
2,315,000	-
6,705,495	920,000
115,306,490	57,323,501
21,696,250	21,673,125
-	2,483,400
425,000	-
5,000,005	4,400,001

Jumlah Beban Administrasi Umum**6,904,693,349** **6,991,096,757****27. Pendapatan dan (Beban) Non-Operasional**

Akun ini terdiri dari:

Pendapatan Non-Operasional

Jasa Notaris
Jasa Asuransi
Selisih Kas
Keuntungan atas Penjualan Aset tetap
Lainnya

**Tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember****2024****2023**

67,553,300	86,453,605
19,762,228	8,335,584
5,556	6,789
600,000	-
13,281,171	12,029,842

Jumlah Pendapatan Non Operasional**101,202,255** **106,825,820****Beban Non-Operasional**

Beban Pungutan Oleh OJK
Beban Olahraga/Rekreasi
Beban CSR
Selisih Kas

38,442,293	24,154,283
6,708,045	5,832,000
5,871,900	8,445,823
5,913	5,748

Jumlah Beban Non Operasional**51,028,151** **38,437,854****Jumlah Pendapatan dan (Beban) Non Operasional****50,174,105** **68,387,965**

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Dengan Angka Pembanding Tahun 2023

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

28 Taksiran Pajak Penghasilan

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Laba Sebelum Pajak	2,502,654,859	2,932,298,476
Koreksi Fiskal		
Olahraga/Rekreasi	6,708,045	5,832,000
Beban CSR	5,871,900	8,445,823
Seragam	425,000	-
Pembayaran Pesangon	(32,000,000)	(14,027,823)
Penerimaan Kredit Hapus Buku	-	(50,000,000)
Jumlah Koreksi Fiskal	(18,995,055)	(49,750,000)
Penghasilan Kena Pajak	2,483,659,804	2,882,548,476
Jumlah Laba (Rugi) Fiskal	2,483,659,000	2,882,548,000
Omzet	12,381,603,527	12,589,363,414
Taksiran Pajak Penghasilan		
Peredaran bruto yang mendapatkan fasilitas	105,912,934	120,894,544
Peredaran Bruto yang tidak mendapatkan fasilitas	334,579,113	392,371,473
Jumlah Taksiran Pajak	440,492,046	513,266,016
Pajak Penghasilan Badan	440,492,046	513,266,016
Uang Muka Pajak Penghasilan PPh 25	386,986,387	434,642,610
Pajak Lebih (Kurang) Bayar psl 29	(53,505,659)	(78,623,406)

Catatan sehubungan akun ini :

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Perusahaan menyetorkan dan melaporkan pajaknya berdasarkan self-assessment system. Fiskus dapat melakukan koreksi dan menerapkan pajak-pajak Perusahaan tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

29. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA

Rincian pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai berikut :

a. Kredit Yang Diberikan

Nama	Jabatan	Plafond	Baki Debet	Suku Bunga
Hertanto	Manager Remedial	11,000,000	9,166,400	9.60%
Dwi Retno A	PE Kepatuhan & Manris	13,000,000	13,000,000	9.60%
Toto Wijatmiko	Direktur Utama	18,000,000	18,000,000	0%
Toto Wijatmiko	Direktur Utama	100,000,000	74,999,200	12%
S Damar Prabowo	PE Audit Intern	2,000,000	1,000,000	0%
Rohadi	Kerabat Pejabat Inti	467,341,200	288,017,600	23.73%

b. Tabungan**Tabungan Restu**

Nama	Jabatan	Saldo	Suku Bunga
Novianti Widia Maharani	Kerabat Pejabat Inti	4,119,279	1.00%
Novianti Widia Maharani	Kerabat Pejabat Inti	20,212,405	1.00%
Endang Lestari	Kerabat Pejabat Inti	3,590,655	1.00%

Tabungan Simapan

Nama	Jabatan	Saldo	Suku Bunga
Eko Wiwoho	Kerabat Pejabat Inti	133,037,963	4.00%
Novianti Widia Maharani	Kerabat Pejabat Inti	121,795,684	4.00%
Toto Wijatmiko	Direktur Utama	5,049,860	3.50%
Dian Apriyani	Kerabat Pejabat Inti	209,307	3.00%
Winda Trisnawati	Manager Operasional	138,601	3.00%

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

Dengan Angka Pembanding Tahun 2023

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

29. TRANSAKSI PIHAK-PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA (Lanjutan)**b. Tabungan (Lanjutan)****Tabungan Sifitri**

Nama	Jabatan	Saldo	Suku Bunga
Novianti Widia Maharani	Kerabat Pejabat Inti	2,000,000	0%
Novianti Widia Maharani	Kerabat Pejabat Inti	2,000,000	0%
Novianti Widia Maharani	Kerabat Pejabat Inti	2,000,000	0%
Novianti Widia Maharani	Kerabat Pejabat Inti	2,000,000	0%
Novianti Widia Maharani	Kerabat Pejabat Inti	2,000,000	0%
S Damar Prabowo	PE Audit Intern	2,000,000	0%
Hertanto	Manager Remedial	2,000,000	0%

Tabungan Qurban

Nama	Jabatan	Saldo	Suku Bunga
Toto Wijatmiko	Direktur Utama	2,115,580	4.00%

Tabungan Karyawan

Nama	Jabatan	Saldo	Suku Bunga
Yuni Mardiati	Direktur Operasional dan YMFK	18,777,692	1.00%
Toto Wijatmiko	Direktur Utama	457,134	1.00%
Dwi Retno Andayani	PE Kepatuhan & Manrisk	699,161	1.00%
Hertanto	Manager Remedial	30,632,300	1.00%
Yuni Mardiati	Direktur Operasional	66,508,261	1.00%
Toto Wijatmiko	Direktur Utama	59,744,947	1.00%
Dwi Retno Andayani	PE Kepatuhan & Manrisk	28,888,385	1.00%
Hertanto	Manager Remedial	643,171	1.00%
Winda Trisnawati	Manager Operasional	8,615,067	1.00%
Winda Trisnawati	Manager Operasional	452,335	1.00%
Pt Yasaniaga Utama Mulia	Pemegang Saham	47,881,680	1.00%
S Damar Prabowo	PE Audit Intern	1,262,826	1.00%
Toto Wijatmiko	Direktur Utama	10,123,900	1.00%
S Damar Prabowo	PE Audit Intern	1,052,091	1.00%
Subiyanti	Kepala Cabang	234,954	1.00%

Tabungan Sitaru

Nama	Jabatan	Saldo	Suku Bunga
Andri Eko Harseno	Komisaris	2,400,000	0%
Novianti Widia Maharani	Kerabat Pejabat Inti	2,400,000	0%
Novianti Widia Maharani	Kerabat Pejabat Inti	2,400,000	0%

Tabungan Tarisa 8

Nama	Jabatan	Saldo	Suku Bunga
Novianti Widia Maharani	Kerabat Pejabat Inti	2,502,309	1.00%
Novianti Widia Maharani	Kerabat Pejabat Inti	2,502,309	1.00%
Novianti Widia Maharani	Kerabat Pejabat Inti	2,501,983	1.00%
Novianti Widia Maharani	Kerabat Pejabat Inti	2,501,983	1.00%

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
Dengan Angka Pembanding Tahun 2023
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

30. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

	<u>31 Desember 2024</u>	<u>31 Desember 2023</u>
Akun ini terdiri dari:		
Tagihan Komitmen :		
Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum ditarik	-	-
Lain-lain	3,864,323,700	3,895,824,000
Jumlah Komitmen	<u>3,864,323,700</u>	<u>3,895,824,000</u>
Tagihan Komitmen :		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	1,336,245,200	716,762,000
Aset Produktif yang dihapusbukukan	2,002,165,025	2,175,911,000
Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain	212,053,181	-
Lain-lain	-	212,053,000
Jumlah Komitmen	<u>3,550,463,406</u>	<u>3,104,726,000</u>

31. TANGGUNGJAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 yang diselesaikan dan disetujui untuk terbit pada tanggal 17 April 2025.

JURNAL KOREKSI
PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
KOTA SEMARANG
PER 31 DESEMBER 2024

NO.	URAIAN	DEBET	KREDIT
1.	Pendapatan Bunga Antar Kantor Beban Bunga Antar Kantor (Jurnal Eliminasi Bunga Antar Kantor)	868,823,086	868,823,086
2.	Utang Pajak Penghasilan Badan (PPh 29) Taksiran Pajak Penghasilan (Jurnal Koreksi Perhitungan Taksiran Pajak Penghasilan Badan, rincian perhitungan di CALK point 28)	2,486,740	2,486,740
	JUMLAH	871,309,826	871,309,826

Auditor :
1. Ida Nurhayati
2. Rachmad Ariashad
3. Adi Priguno
4. Zahrina Ghassani Amalina

Mengetahui
PT. BPR Artha Mukti Santosa

Toto Wijatmiko, SE
Direktur Utama

LAMPIRAN

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(Dengan Angka Pembanding untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023)

1. PERKEMBANGAN USAHA

a. Total Asset

Total asset PT. BPR Artha Mukti Santosa per 31 Desember 2024, mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2024

Total Asset Tahun 2024	70,136,217,010
Total Asset Tahun 2023	67,627,175,840
Kenaikan (Penurunan)	2,509,041,170
Persentase Peningkatan (Penurunan)	3.71%

31 Desember 2023

Total Asset Tahun 2023	67,627,175,840
Total Asset Tahun 2022	62,760,362,783
Kenaikan (Penurunan)	4,866,813,057
Persentase Peningkatan (Penurunan)	7.75%

b. Penghimpunan Dana

31 Desember 2024

Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun PT. BPR Artha Mukti Santosa per 31 Desember 2024, yaitu Deposito dan Tabungan dengan rincian sebagai berikut :

	Deposito	Tabungan
Dana yang Dihimpun Tahun 2024	29,132,394,997	16,581,069,581
Dana yang Dihimpun Tahun 2023	30,041,732,677	16,442,995,695
Peningkatan (Penurunan)	(909,337,680)	138,073,886
Persentase Peningkatan (Penurunan)	-3.03%	0.84%

31 Desember 2023

Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun PT. BPR Artha Mukti Santosa per 31 Desember 2023, yaitu Deposito dan Tabungan dengan rincian sebagai berikut :

	Deposito	Tabungan
Dana yang Dihimpun Tahun 2023	30,041,732,677	16,442,995,695
Dana yang Dihimpun Tahun 2022	27,460,542,403	16,504,901,617
Peningkatan (Penurunan)	2,581,190,274	(61,905,922)
Persentase Peningkatan (Penurunan)	9.40%	-0.38%

c. Pemberian Kredit

31 Desember 2024

Jumlah pinjaman yang diberikan PT. BPR Artha Mukti Santosa per 31 Desember 2024, mengalami kenaikan dengan rincian sebagai berikut :

Pinjaman yang diberikan tahun 2024 (bruto)	48,111,830,153
Pinjaman yang diberikan tahun 2023 (bruto)	46,490,537,742
Peningkatan (Penurunan)	1,621,292,411
Persentase Peningkatan (Penurunan)	3.49%

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(Dengan Angka Pembanding untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023)

1. PERKEMBANGAN USAHA (LANJUTAN)

c. Pemberian Kredit (Lanjutan)

31 Desember 2023

Jumlah pinjaman yang diberikan PT. BPR Artha Mukti Santosa per 31 Desember 2024, mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut :

Pinjaman yang diberikan tahun 2023 (bruto)	46,490,537,742
Pinjaman yang diberikan tahun 2022 (bruto)	42,492,192,854
Peningkatan (Penurunan)	3,998,344,888
Persentase Peningkatan (Penurunan)	9.41%

2. PERMODALAN

a. Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (Rincian Terlampir)

Bank akan selalu memenuhi ketentuan Bank Indonesia termasuk dalam bidang permodalan sehingga apabila terdapat perubahan ketentuan dalam perbankan Indonesia, manajemen akan segera menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Bilamana bank tidak memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan yang memengaruhi operasi bank.

b. Ratio Kecukupan Modal (Rincian Terlampir)

Bank diwajibkan memenuhi persyaratan ratio kewajiban penyediaan modal (KPM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang ditetapkan Bank Indonesia, yang mempertimbangkan secara kuantitatif seperti aset, kewajiban dan akun *of balance sheet* tertentu juga pertimbangan secara kualitatif tentang komponen dan risiko tertimbang.

3. ANALISA LIKUIDITAS

a. *Cash Ratio*

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas	119,606,800	132,766,500
Penempatan Pada Bank Lain (Giro dan Tabungan) minus ABP	5,543,107,313	3,793,529,289
Jumlah	5,662,714,113	3,926,295,789
Hutang Lancar		
Kewajiban Segera Dibayar	88,267,562	133,887,378
Tabungan	16,581,069,581	16,442,995,695
Deposito berjangka	29,132,394,997	30,041,732,677
Utang Bunga	84,121,302	-
Utang Pajak	102,275,661	-
Kewajiban Imbalan Kerja	198,894,222	-
Kewajiban Lainnya	469,366,495	-
Jumlah	46,656,389,820	46,618,615,750
Cash Ratio	12.14%	8.42%

b. *Loan To Debt Ratio*

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Loan		
Kredit yang Diberikan	49,241,749,431	47,535,727,321
Debt		
Simpanan pihak ketiga (bukan bank)	-	-
Tabungan	16,581,069,581	16,442,995,695
Deposito berjangka	29,132,394,997	30,041,732,677
Jumlah	45,713,464,578	46,484,728,372
Loan To Debt Ratio	107.72%	102.26%

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

(Dengan Angka Pembandingan untuk Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023)

4. RASIO RENTABILITAS

a. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Operasional	9.827.920.518	9.618.627.083
Pendapatan Operasional	12.280.401.272	12.482.537.594
BOPO	80,03%	77,06%

b. Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK)

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Modal Inti	20.753.660.262	18.716.613.634
Modal Pelengkap	159.492.896	170.503.817
Jumlah Modal	20.913.153.158	18.887.117.451
Pihak Terkait (10%)	2.091.315.316	1.888.711.745
Pihak Tidak Terkait (20%)	4.182.630.632	3.777.423.490
Penyertaan BPR dan BPRS Lain (30%)	6.273.945.947	5.666.135.235

c. Return on Asset

Rata-rata Aset Bulanan

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Januari	66.933.044.000	62.003.977.031
Februari	68.170.498.000	62.521.378.187
Maret	65.478.875.000	63.985.831.063
April	65.585.046.000	60.570.244.820
Mei	66.329.735.000	63.412.302.195
Juni	65.644.645.000	64.234.349.134
Juli	65.157.555.000	64.730.138.366
Agustus	66.062.885.000	65.570.144.434
September	68.206.097.000	66.367.502.308
Oktober	68.599.324.000	67.080.063.443
November	68.710.189.000	67.819.059.232
Desember	70.136.217.000	67.627.175.840
Jumlah	805.014.110.000	775.922.166.053
Rata-rata Aset	67.084.509.167	64.660.180.504
Laba Sebelum Pajak	2.502.654.859	2.932.298.476
Return on Asset (ROA)	3,73%	4,53%

5. ASET PRODUKTIF (Rincian Terlampir)

Tabel dibawah ini menunjukkan perhitungan kualitas aset produktif bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
PERHITUNGAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

NO	KOMPONEN	NOMINAL	PPAP KHUSUS	NOMINAL SETELAH DIKURANGI PPAP KHUSUS	BOBOT RISIKO (%)	ATMR (Rp)
1	K a s	119,606,800	0	119,606,800	0.00%	0
2	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	0	0	0	0.00%	0
3	Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debit.	73,154,900	0	73,154,900	0.00%	0
4	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	857,369,218	0	857,369,218	0.00%	0
5	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan	0	0	0	15.00%	0
6	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lain kepada bank lain	18,839,508,225	0	18,839,508,225	20.00%	3,767,901,645
7	Kredit kepada atau bagian kredit yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	0	0	0	20.00%	0
	a. Kredit kepada bank lain					
	b. Kredit kepada pemerintah daerah					
	c. Bagian kredit yang dijamin oleh bank lain					
	d. Bagian kredit yang dijamin oleh pemerintah daerah					
8	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit	0	0	0	20.00%	0
9	Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	38,417,713,523	1,360,167	38,416,353,356	30.00%	11,524,906,007
10	Kredit kepada BUMN/BUMD	0	0	0	50.00%	0
11	Bagian dari kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberi bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen)	0	0	0	50.00%	0
12	Kredit kepada pegawai/pensiunan yang memenuhi persyaratan	0	0	0	50.00%	0
13	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	587,958,493	0	587,958,493	50.00%	293,979,247
14	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria	402,456,900	3,174,563	399,282,337	70.00%	279,497,636
15	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	4,350,788,850	37,488	4,350,751,362	70.00%	3,045,525,953
16	Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas	636,299,000	543,018	635,755,982	100.00%	635,755,982
17	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	4,773,377,764	288,726,016	4,484,651,748	100.00%	4,484,651,748
	a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	3,036,666,600	196,432,246	2,840,234,354		
	b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	1,736,711,164	92,293,770	1,644,417,394		
18	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud.	1,748,199,122	0	1,748,199,122	100.00%	1,748,199,122
19	AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	0	0	0	100.00%	0
20	Aset lain, selain angka 1 s.d. angka 19	1,072,318,169		1,072,318,169	100.00%	1,072,318,169
Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum		71,878,750,964	293,841,252	71,584,909,712		26,852,735,509

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
PERHITUNGAN AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023

NO	KOMPONEN	NOMINAL	PPAP KHUSUS	NOMINAL SETELAH DIKURANGI PPAP KHUSUS	BOBOT RISIKO (%)	ATMR (Rp)
1	K a s	132,766,500	0	132,766,500	0.00%	0
2	Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	0	0	0	0.00%	0
3	Kredit yang diberikan dengan agunan bersifat likuid berupa SBI, surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tabungan dan/atau deposito yang diblokir pada BPR yang bersangkutan berdasarkan perjanjian antara BPR dan nasabah disertai dengan surat kuasa pencairan, dan logam mulia, sebesar nilai terendah antara agunan dan baki debet.	28,317,100	0	28,317,100	0.00%	0
4	Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang telah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan.	450,267,200	0	450,267,200	0.00%	0
5	Kredit yang diberikan dengan agunan berupa emas perhiasan	0	0	0	15.00%	0
6	Penempatan pada bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan tagihan lain kepada bank lain	19,373,529,289	0	19,373,529,289	20.00%	3,874,705,858
7	Kredit kepada atau bagian kredit yang dijamin oleh bank lain atau Pemerintah Daerah	0	0	0	20.00%	0
	a. Kredit kepada bank lain					
	b. Kredit kepada pemerintah daerah					
	c. Bagian kredit yang dijamin oleh bank lain					
	d. Bagian kredit yang dijamin oleh pemerintah daerah					
8	Bagian dari kredit yang dijamin oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit	0	0	0	20.00%	0
9	Kredit dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal/rumah toko/rumah kantor yang memiliki sertifikat yang dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	37,792,213,660	748,830	37,791,464,830	30.00%	11,337,439,449
10	Kredit kepada BUMN/BUMD	0	0	0	50.00%	0
11	Bagian dari kredit yang dijamin oleh BUMN/BUMD yang melakukan usaha sebagai penjamin kredit namun tidak memenuhi persyaratan untuk diberi bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen)	0	0	0	50.00%	0
12	Kredit kepada pegawai/pensiunan yang memenuhi persyaratan	0	0	0	50.00%	0
13	Kredit dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang memiliki sertipikat namun tidak dibebani dengan hak tanggungan atau fidusia	754,434,500	93,807	754,340,693	50.00%	377,170,347
14	Kredit yang diberikan kepada usaha mikro dan kecil yang memenuhi seluruh kriteria	4,065,926,000	607,692	4,065,318,308	70.00%	2,845,722,816
15	Kredit dengan agunan berupa kendaraan bermotor, kapal atau perahu bermotor, alat berat, dan/atau mesin yang menjadi satu kesatuan dengan tanah yang disertai dengan bukti kepemilikan dan telah dilakukan pengikatan hipotek atau fidusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	814,926,600	225,000	814,701,600	70.00%	570,291,120
16	Tagihan atau kredit lain yang tidak memenuhi kriteria bobot risiko di atas	844,175,600	594,678	843,580,922	100.00%	843,580,922
17	Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo atau dengan kualitas macet	3,235,733,861	22,840,500	3,212,893,361	100.00%	3,212,893,361
	a. Tagihan atau kredit yang telah jatuh tempo	6,041,000	800,500	5,240,500		
	b. Tagihan atau kredit dengan kualitas macet	3,229,692,861	22,040,000	3,207,652,861		
18	Aset tetap, inventaris, dan aset tidak berwujud.	189,087,197	0	189,087,197	100.00%	189,087,197
19	AYDA yang belum melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal pengambilalihan	407,102,018	0	407,102,018	100.00%	407,102,018
20	Aset lain, selain angka 1 s.d. angka 19	1,015,289,345		1,015,289,345	100.00%	1,015,289,345
Jumlah ATMR Sebelum Perhitungan Selisih Lebih PPAP Umum		69,103,768,870	25,110,507	69,078,658,363		24,673,282,432

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

KETERANGAN	31 Desember 2024	
	Jumlah Setiap Komponen (Rp)	Jumlah (Rp)
A. MODAL		
1. Modal Inti		
1.1 Modal Disetor	4.000.000.000	4.000.000.000
1.2 Agio	-	-
1.3 Disagio -/-	-	-
1.4 Modal sumbangan	-	-
1.5 Dana setoran modal	-	-
1.6 Cadangan umum	800.000.000	800.000.000
1.7 Cadangan tujuan	-	-
1.8 Laba ditahan	-	-
1.9 Laba tahun-tahun lalu	15.351.263.464	15.351.263.464
1.10 Rugi tahun lalu -/-	-	-
1.11 Laba tahun berjalan (50% setelah THP)	2.062.162.813	1.031.081.407
1.12 Rugi tahun berjalan -/-	-	-
1.13 Sub total	22.213.426.277	-
1.14 Goodwill		-
AYDA lebih dari setahun	(857.369.218)	(428.684.609)
Kekurangan PPKA -/-		-
1.15 Jumlah modal inti		20.753.660.262
2. Modal Perlengkapan		
2.1 Cadangan revaluasi aktiva tetap	-	-
2.2 Penyisihan penghapusan aktiva produktif umum (maksimum 1,25% ATMR)	159.492.896	159.492.896
2.3 Modal kuasi/modal pinjaman	-	-
2.4 Pinjaman subordinasi (maksimum 50% dan modal inti)	-	-
2.5 Jumlah Modal Pelengkap	159.492.896	-
2.6 Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan		159.492.896
3. Jumlah modal (1.15+2.6)		20.913.153.158
B. MODAL MINIMUM (12% X ATMR)	26.852.735.509	3.222.328.261
C. KELEBIHAN MODAL		17.690.824.896
D. RASIO MODAL = $\frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$		77,88%

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
PERHITUNGAN KEBUTUHAN MODAL MINIMUM
TANGGAL 31 DESEMBER 2023

KETERANGAN	31 Desember 2023	
	Jumlah Setiap Komponen (Rp)	Jumlah (Rp)
A. MODAL		
1. Modal Inti		
1.1 Modal Disetor	4.000.000.000	4.000.000.000
1.2 Agio	-	-
1.3 Disagio -/-	-	-
1.4 Modal sumbangan	-	-
1.5 Dana setoran modal	-	-
1.6 Cadangan umum	800.000.000	800.000.000
1.7 Cadangan tujuan	-	-
1.8 Laba ditahan	-	-
1.9 Laba tahun-tahun lalu	12.932.231.004	12.932.231.004
1.10 Rugi tahun lalu -/-	-	-
1.11 Laba tahun berjalan (50% setelah THP)	2.419.032.460	1.209.516.230
1.12 Rugi tahun berjalan -/-	-	-
1.13 Sub total	20.151.263.464	-
1.14 Goodwill		-
AYDA lebih dari setahun	450.267.200	(225.133.600)
Kekurangan PPKA -/-		-
1.15 Jumlah modal inti		18.716.613.634
2. Modal Perlengkapan		
2.1 Cadangan revaluasi aktiva tetap	-	-
2.2 Penyisihan penghapusan aktiva produktif umum (maksimum 1,25% ATMR)	170.503.817	170.503.817
2.3 Modal kuasi/modal pinjaman	-	-
2.4 Pinjaman subordinasi (maksimum 50% dan modal inti)	-	-
2.5 Jumlah Modal Pelengkap	170.503.817	-
2.6 Jumlah modal pelengkap yang diperhitungkan		170.503.817
3. Jumlah modal (1.15+2.6)		18.887.117.451
B. MODAL MINIMUM (12% X ATMR)	24.673.282.432	2.960.793.892
C. KELEBIHAN MODAL		15.926.323.559
D. RASIO MODAL = $\frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$		76,55%

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
TANGGAL 31 DESEMBER 2024

Keterangan	Lancar (Rp)	Dalam Perhatian Khusus (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Jumlah (Rp)
1. Aktiva Produktif						
a. Kredit yang diberikan	31.971.734.009	9.878.279.257	2.023.888.500	654.131.200	4.713.716.464	49.241.749.430
b. Penempatan pada bank lain yang dijamin LPS						-
c. Penempatan pada bank lain yang tidak dijamin LPS	18.839.508.225					18.839.508.225
Jumlah Aktiva Produktif	50.811.242.234	9.878.279.257	2.023.888.500	654.131.200	4.713.716.464	68.081.257.655
2. Jumlah aktiva produktif yang diklasifikasikan	-	0%	50%	75%	100%	
3. Nilai agunan kredit	-	-	1.011.944.250	490.598.400	4.713.716.464	6.216.259.114
4. Kredit Back to Back	-	9.814.461.357	2.023.888.500	644.404.200	4.415.422.694	16.898.176.751
5. Dasar Perhitungan PPKAWD	50.811.242.234	63.817.900	-	9.727.000	298.293.770	51.183.080.904
6. Prosentase PPKAWD	0,5%	3%	10%	50%	100%	
7. Jumlah PPKAWD	254.056.211	1.914.537	-	4.863.500	298.293.770	559.128.018
8. Jumlah PPKAWD yang telah dibentuk	254.056.211	1.914.537	-	4.863.500	298.293.770	559.128.018
9. Jumlah lebih (kurang) pembentukan PPKA	-	-	-	-	-	-
10. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif (2:1) x 100%						9,13%
11. Rasio PPKA terhadap PPKAWD (8:7) x 100%						100%
12. Prosentase kolektibilitas Kredit	64,93%	20,06%	4,11%	1,33%	9,57%	100%
13. Rasio NPL						15,01%
			2.023.888.500	649.267.700	4.415.422.694	7.088.578.894
14. Rasio NPLs (Netto)						14,40%

PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF
TANGGAL 31 DESEMBER 2023

Keterangan	Lancar (Rp)	Dalam Perhatian Khusus (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	Jumlah (Rp)
1. Aktiva Produktif						
a. Kredit yang diberikan	33.626.939.751	10.171.527.709	426.602.800	80.964.200	3.229.692.861	47.535.727.321
b. Penempatan pada bank lain yang dijamin LPS						-
c. Penempatan pada bank lain yang tidak dijamin LPS	502.140.822					502.140.822
Jumlah Aktiva Produktif	34.129.080.573	10.171.527.709	426.602.800	80.964.200	3.229.692.861	48.037.868.143
2. Jumlah aktiva produktif yang diklasifikasikan	-	0%	50%	75%	100%	
3. Nilai agunan kredit	-	-	213.301.400	60.723.150	3.229.692.861	3.503.717.411
4. Kredit Back to Back	28.317.100	10.095.860.809	424.727.800	79.738.200	3.207.652.861	13.807.979.670
5. Dasar Perhitungan PPKAWD	34.100.763.473	75.666.900	1.875.000	1.226.000	22.040.000	28.317.100
6. Prosentase PPKAWD	0,5%	3%	10%	50%	100%	34.201.571.373
7. Jumlah PPKAWD	170.503.817	2.270.007	187.500	613.000	22.040.000	195.614.324
8. Jumlah PPKAWD yang telah dibentuk						195.614.324
9. Jumlah lebih (kurang) pembentukan PPKA						-
10. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif (2:1) x 100%						7,29%
11. Rasio PPKA terhadap PPKAWD (8:7) x 100%						100%
12. Prosentase kolektibilitas Kredit	70,74%	21,40%	0,90%	0,17%	6,79%	100%
13. Rasio NPL						7,86%
			426.415.300	80.351.200	3.207.652.861	3.714.419.361
14. Rasio NPLs (Netto)						7,81%

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 00082/2.1439/AU.2/07/1384-1/1/IV/2025

Kepada Yth.

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

PT. BPR Artha Mukti Santosa

Jl. Jenderal Sudirman No.167, Krobokan, Kec. Semarang Barat,
Kota Semarang

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT. BPR Artha Mukti Santosa, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Laporan Keuangan PT. BPR Artha Mukti Santosa tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Auditor Independen Lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 17 April 2024.



Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.



Registered Public Accountant

Izin Akuntan Publik No. 634/KM.1/2017
Izin Menkeu No. 533/KM.1/2023
Izin BPK RI No. 514/STT/XII/2023
Izin OJK No. STTD.KAP-15/PM.021/2024

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Ida Nurhayati
Pimpinan

Ida Nurhayati, S.E., M.Si., Ak., CPA., CAAT

NIAP : AP.1384

NIU-KAP : 533/KM.1/2023

17 April 2025



FORM C.02.00

OPINI DARI AKUNTAN PUBLIK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Opini Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik
Wajar Tanpa Pengecualian	Ida Nurhayati, S.E., M.Si., Ak., CPA., CAAT

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

Nama BPR : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 2024

Sesuai POJK nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, dengan ini Direksi PT BPR Artha Mukti Santosa menyatakan bahwa:

1. Direksi bertanggung jawab dalam penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, antara lain:
 - a. Penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan.
 - b. Kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan.
 - c. Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan.
 - d. Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
2. Untuk itu telah ditunjuk seorang penanggung jawab pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan BPR tahun 2024 telah diaudit oleh Akuntan Publik Ida Nurhayati dari Kantor Akuntan Publik Ida Nurhayati
4. Seluruh informasi yang disampaikan dalam laporan tahunan 2024 adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
5. Pengendalian yang dilakukan adalah memastikan laporan disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu. Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaporan keuangan melakukan validasi data dan informasi yang disajikan adalah benar dan sesuai dengan kondisi BPR yang sebenarnya.
6. Pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan dinilai cukup efektif dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Semarang, 25 April 2025

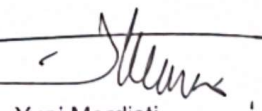
PT BPR Artha Mukti Santosa



Toto Wijatmiko
Direktur Utama



ARTHA MUKTI SANTOSA
pt. bank perekonomian rakyat
SEMARANG



Yuni Mardiaty
Direktur

FORM E.01.00

RINGKASAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Nama Lembaga Jasa Keuangan	: PT BPR Artha Mukti Santosa
Posisi Laporan	: 31 Desember 2024
Alamat	: Jl Jendral Sudirman No 167 Semarang, Jawa Tengah
No Telepon	: 024-7608811
Penjelasan Umum	: Penerapan tata kelola diberikan peringkat komposit 2,00 (Baik) menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan praktik-praktik tata kelola (GCG) secara memadai, dengan fondasi yang kuat namun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan. Secara umum dapat diuraikan sebagai berikut: a. Struktur dan Peran: Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite telah dibentuk sesuai ketentuan, menjalankan tugas pengawasan dan penetapan kebijakan secara jelas, meski koordinasi antarlembaga dapat terus ditingkatkan; b. Pengawasan & Akuntabilitas: proses rapat, pelaporan, dan evaluasi kinerja berjalan rutin; keputusan strategis diambil berdasar data dan mekanisme persetujuan yang cukup transparan; c. Kepatuhan & Manajemen Risiko: kebijakan kepatuhan dan manajemen risiko telah diimplementasikan termasuk pencegahan fraud dan penanganan benturan kepentingan namun perlu penguatan di beberapa area untuk menjamin efektivitas penuh; d. Transparansi & Pelaporan: informasi keuangan dan non-keuangan disampaikan kepada pemangku kepentingan secara teratur, dengan cakupan yang memadai; penajaman detail dan kedalaman data akan meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas. Dengan kata lain, skor 2 menandakan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diadopsi secara luas, tetapi perusahaan sebaiknya melanjutkan upaya penyempurnaan terutama pada mekanisme koordinasi, mitigasi risiko, dan kedalaman transparansi agar tata kelola dapat mencapai tingkat "Baik" atau "Sangat Baik" di masa mendatang.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	: 2 (Baik)
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	: Self-assessment tata kelola dengan peringkat 2 (Baik) menunjukkan bahwa perusahaan telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dengan tingkat yang memadai, namun masih terdapat beberapa area yang memerlukan perhatian. Peringkat 2,00 mencerminkan bahwa mayoritas aspek tata kelola, seperti: a. Pengelolaan Struktur Organisasi: Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan kedepannya komunikasi dan koordinasi akan selalu menjadi perhatian yang utama; b. Pengawasan dan evaluasi, Fungsi pengawasan sudah berjalan dengan baik, dan akan selalu berupaya ditingkatkan dalam memastikan pengawasan lebih mendalam dan responsif terhadap dinamika yang ada; c. Kepatuhan terhadap Regulasi: Kebijakan kepatuhan sudah memadai, namun mungkin ada beberapa area yang perlu diperhatikan lebih lanjut agar sepenuhnya sesuai dengan perkembangan regulasi dan standar industri, d. Manajemen Risiko: Bank atau perusahaan memiliki kebijakan manajemen risiko yang baik, namun prosedur mitigasi dan pemantauan risiko tertentu bisa lebih diperkuat untuk menghadapi potensi risiko yang lebih kompleks. e. Transparansi dan Akuntabilitas: Informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan sudah cukup baik, namun masih ada potensi untuk meningkatkan tingkat keterbukaan dan detail informasi yang diberikan, terutama yang berkaitan dengan aspek finansial dan operasional. Secara keseluruhan, peringkat 2 (Baik) menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan prinsip GCG dengan baik, perbaikan dan peningkatan kinerja akan selalu dilakukan agar tata kelola yang diterapkan dapat lebih optimal dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang.

FORM E.02.01
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Toto Wijatmiko	Direktur Utama	a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan Bank, dimana anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank akibat kelalaian anggota Direksi; b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: i. menghimpun dana, ii. menyalurkan kredit, iii. menempatkan dana pada bank lain, iv. menerima penempatan dana dari bank lain, v. menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Deewan Komisaris; c. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan prinsip tata kelola; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat di bidang kepegawaian kepada pegawai; h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Yuni Mardiaty	Direktur	a. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan Bank, dimana anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank akibat kelalaian anggota Direksi; b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: i. menghimpun dana, ii. menyalurkan kredit, iii. menempatkan dana pada bank lain, iv. menerima penempatan dana dari bank lain, v. menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Deewan Komisaris; c. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan prinsip tata kelola; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat di bidang kepegawaian kepada pegawai; h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

FORM E.02.02
PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Catur Budi Pamungkas	Komisaris Utama	a. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya; b. Wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; c. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank; d. Meningkatkan kompetensi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank; e. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank; f. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PEAI dan OJK; g. Memastikan bahwa kecukupan organisasi sesuai dengan tata kelola; h. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi dan untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris; h. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan pelaksanaan kebijakan strategis selama tahun buku; i. Anggota Dewan Komisaris menghadiri semua rapat Dewan Komisaris dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya; j. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris; k. Bertanggungjawab atas ketaatan pelaksanaan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.; l. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan jika terdapat pelanggaran di bidang keuangan dan perbankan serta adanya keadaan atau kemungkinan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2	Andrie Eko Harseno	Komisaris	Bersama-sama dengan Komisaris Utama memastikan bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris dapat terlaksana sesuai dengan peraturan tata kelola maupun peraturan-peraturan lainnya.

FORM E.02.03

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, PROGRAM KERJA, DAN REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

BPR tidak memiliki komite

FORM E.02.04

STRUKTUR, KEANGGOTAAN, KEAHLIAN, DAN INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

BPR tidak memiliki komite

FORM E.03.01

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham di BPR

FORM E.03.02
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

1 Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
Anggota Direksi tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR				

2 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR				

2 Kepemilikan Saham Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

No	Nama Pemegang Saham	Nama Perusahaan dalam Kelompok Usaha BPR	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan Tahun Sebelumnya (%)
1	PT Yasaniaga Utama Mulia	PT. BPR Restu Klepu Makmur	50.00	50.00
2	PT Yasaniaga Utama Mulia	PT. BPR Restu Artha Makmur	50.00	50.00
3	PT Yasaniaga Utama Mulia	PT. BPR Restu Artha Abadi	77.60	98.00
4	Irma Wardhani	PT. BPR Restu Artha Abadi	10.69	0.00

FORM E.03.03

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain

FORM E.04.01
HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

1 Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Toto Wijatmiko	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yuni Mardiaty	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2 Hubungan Keuangan Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Catur Budi Pamungkas	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Andri Eko Harseno	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3 Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

No	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	PT Yasaniaga Utama Mulia	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Irma Wardhani	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

FORM E.04.02
HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

1 Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Toto Wijatmiko	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Yuni Mardiaty	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

2 Hubungan Keluarga Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Catur Budi Pamungkas	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Andri Eko Harseno	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

3 Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

No	Nama Pemegang Saham	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	PT Yasaniaga Utama Mulia	Tidak Ada	Tidak Ada	Pemilik saham dari PT Yasaniaga Utama Mulia yaitu Ratnawati dan Santoso Soegiarto, dimana Ratnawati adalah istri dari Santoso Soegiarto dan kakak kandung dari Irma Wardhani
2	Irma Wardhani	Tidak Ada	Tidak Ada	Irma Wardhani memiliki hubungan kekerabatan dengan Ratnawati, salah satu pemegang saham PT Yasaniaga Utama Mulia

FORM E.05.00
PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

Nama Lembaga Jasa Keuangan

: PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan

: 31 Desember 2024

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	300,000,000	2	126,000,000
2	Tunjangan	2	291,900,500	2	85,973,000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
Total Remunerasi		4	591,900,500	4	211,973,000
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	0	0	0	0
2	Transportasi	2	0	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
4	Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain		2	0	0	0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		6	591,900,500	4	211,973,000

Penjelasan Lebih Lanjut

Kebijakan remunerasi merupakan wujud dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam praktik Good Corporate Governance. Bank telah menetapkan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Remunerasi yang diberikan telah mempertimbangkan kinerja individual, pencapaian kinerja perusahaan, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan besaran remunerasi mengacu pada keputusan RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024, di mana Pemegang Saham telah menyetujui remunerasi dan/atau wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rinciannya. Bank senantiasa memastikan bahwa kebijakan remunerasi mendukung tercapainya tujuan strategis perusahaan, memperhatikan asas kewajaran, serta selaras dengan kondisi dan kemampuan keuangan Bank.

FORM E.06.00
RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Keterangan	Perbandingan
		(a/b)
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3.74
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.08
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.17
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.72
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2.45

Penjelasan Lebih Lanjut

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi dalam *Good Corporate Governance* (GCG), Bank melaporkan informasi mengenai rasio gaji sebagai salah satu indikator kewajaran dan kesetaraan dalam kebijakan remunerasi. Pada tahun laporan, rasio antara total remunerasi tertinggi dengan total remunerasi terendah adalah sebesar 3,74. Rasio ini mencerminkan komitmen Bank untuk menjaga keseimbangan antara kompensasi manajemen dan kesejahteraan seluruh karyawan. Kebijakan remunerasi Bank disusun dengan mempertimbangkan kinerja, tanggung jawab jabatan, serta kondisi keuangan Bank, tanpa mengabaikan prinsip keadilan internal dan eksternal. Bank juga secara berkala melakukan peninjauan terhadap struktur gaji untuk memastikan kesesuaian dengan standar industri dan peraturan yang berlaku.

FORM E.07.01
PELAKSANAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Materi Pembahasan
1	08/01/2024	2	Evaluasi kinerja Bulan Desember 2024 dan memberikan saran kepada Direksi untuk meningkatkan promosi dengan program KSM (Keluarga, Sahabat, dan Mitra)
2	01/02/2024	2	Pembahasan penundaan pencairan deposito BPR yang ditempatkan di BPR Panasayu Arthalayan Sejahtera, dimana menyarankan Direksi untuk melakukan kunjungan ke BPR tersebut guna mengetahui akar permasalahan dan sebagai bentuk pendekatan.
3	03/04/2024	2	Evaluasi kinerja Bulan Maret 2024 dan pembahasan lebih lanjut terkait penundaan pencairan deposito BPR yang ditempatkan di BPR Panasayu Arthalayan Sejahtera
4	05/07/2024	2	Evaluasi kinerja semester I; rekomendasi untuk menindaklanjuti POJK No 7 tahun 2024 tentang Bank Perkreditan Rakyat khusus pada pasal yang membahas terkait perubahan nomenklatur dan memberikan masukan untuk melakukan pencadangan PPAP untuk Debitur atas nama Soelistyaningsih.
5	04/10/2024	2	Evaluasi kinerja September 2024, evaluasi terkait penerapan budaya sadar risiko dan pembahasan Rencana Bisnis Bank

Penjelasan Lebih Lanjut

Selama tahun buku 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Rapat diselenggarakan secara berkala dan dihadiri oleh seluruh atau sebagian besar anggota Dewan Komisaris, dengan tingkat kehadiran yang mencerminkan komitmen aktif terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Agenda rapat meliputi evaluasi kinerja manajemen, pengawasan atas implementasi kebijakan strategis, serta pembahasan aspek kepatuhan dan risiko operasional Bank.

FORM E.07.02

KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Lembaga Jasa Keuangan

: PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan

: 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Catur Budi Pamungkas	5		100.00
2	Andri Eko Harseno	5		100.00

Penjelasan Lebih Lanjut

Selama tahun buku 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan 5 (lima) kali rapat. Seluruh rapat dihadiri secara penuh oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota mencapai 100%. Tingginya tingkat kehadiran ini mencerminkan komitmen aktif Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis guna memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

FORM E.08.00
KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa
 Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Penyimpangan Internal	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
		Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
		Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
1	Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Telah Diselesaikan		-		-		-		-
3	Dalam Proses Penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Belum Diupayakan Penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		-		-		-		-

Penjelasan Lebih Lanjut

Selama tahun buku 2024, Bank tidak mengalami kejadian fraud atau tindakan kecurangan yang berdampak material terhadap operasional maupun laporan keuangan perusahaan. Bank selalu berupaya menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai serta membangun budaya kepatuhan dan integritas di seluruh tingkatan organisasi. Selain itu, mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) telah tersedia dan berfungsi secara efektif sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi kecurangan. Komitmen terhadap prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko secara konsisten mendukung terciptanya lingkungan kerja yang bebas dari praktik fraud.

FORM E.08.00
PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Nama Lembaga Jasa Keuangan

: PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan

: 31 Desember 2024

No	Permasalahan Hukum	Jumlah Satuan	
		Perdata	Pidana
1	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
2	Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total		0	0

Penjelasan Lebih Lanjut

Selama tahun buku 2024, tidak terdapat perkara hukum, baik perdata maupun pidana, yang melibatkan Bank, anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau pihak-pihak terkait lainnya yang dapat memengaruhi kegiatan usaha Bank secara material. Hal ini mencerminkan komitmen Bank dalam menjalankan operasional sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan secara konsisten di seluruh lini usaha.

FORM E.10.00
PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Dalam Jutaan)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Santoso Soegiarto	Pemegang saham PT Yasaniaga Utama Mulia	Toto Wijatmiko	Direktur Utama	Sewa gedung dan mobil	477	Tn Santoso Soegiarto merupakan pemegang saham dari PT Yasaniaga Utama Mulia (PT YUM), dimana PT YUM memiliki saham di BPR. Selain itu Tn Santoso adalah Direktur dari CV Sekawan Putra Sedaya dan CV Sekawan Putra Usaha yang merupakan vendor yang menyewakan mobil di BPR
2	Kevin Adi Rasanto	Direktur CV Kereta Amerta	Toto Wijatmiko	Direktur Utama	Sewa mobil	36	Tn Kevin Adi Rasanto adalah putra dari Tn Santoso Soegiarto, dimana Tn Kevin Adi Rasanto adalah Direktur dari CV Kereta Amerta sebagai penyedia mobil operasional BPR

Penjelasan Lebih Lanjut

Selama tahun buku 2024, terdapat transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan, namun seluruh transaksi tersebut telah dilakukan secara transparan, wajar, dan sesuai dengan prinsip kewajaran serta tata kelola perusahaan yang baik. Bank memastikan bahwa setiap transaksi yang berpotensi mengandung benturan kepentingan telah melalui mekanisme persetujuan internal sesuai dengan kebijakan yang berlaku, termasuk keterlibatan pihak independen jika diperlukan. Selain itu, pihak-pihak yang berkepentingan tidak turut serta dalam proses pengambilan keputusan terhadap transaksi tersebut. Bank terus berkomitmen untuk mengelola dan memitigasi risiko benturan kepentingan secara efektif guna menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan bisnis.

FORM E.11.00**PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	14/06/2024	Kegiatan Sosial	Pembelian hewan qurban	Masjid Al-Fath Jatisari Mijen Semarang	3,417,000

Penjelasan Lebih Lanjut

Selama tahun buku 2024, Bank telah menyalurkan sumbangan dan/atau bantuan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR). Seluruh sumbangan diberikan secara selektif dan transparan, dengan tetap memperhatikan prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumbangan yang diberikan ditujukan untuk mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, dan tidak bertujuan untuk memengaruhi keputusan pihak ketiga secara tidak etis. Bank memastikan bahwa seluruh proses pemberian sumbangan didokumentasikan dengan baik dan telah melalui prosedur persetujuan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal Bank.

DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN TAHUNAN

Nama BPR : PT BPR Artha Mukti Santosa

Posisi Laporan : 2024

Sebagai pelengkap dari penyajian kinerja dan informasi strategis dalam laporan tahunan ini, BPR Artha Mukti Santosa menyajikan **data pendukung** yang bersifat kuantitatif dan informatif, untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan usaha sepanjang tahun 2024.

Data pendukung mencakup berbagai aspek operasional dan keuangan, antara lain:

1. Pertumbuhan kredit berdasarkan segmen usaha dan produk

a. Tabel kinerja penyaluran kredit berdasarkan jenis kredit

No	Jenis Kredit	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
1	Modal Kerja	29,639,797,714	32,021,550,589	30,361,858,149
2	Investasi	2,938,408,932	2,815,605,205	4,333,379,605
3	Konsumsi	10,801,252,318	12,698,571,527	14,546,511,676
Total		43,379,458,963	47,535,727,321	49,241,749,430

b. Tabel kinerja penyaluran kredit berdasarkan produk kredit

No	Segmen Usaha	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
1	MK Reg Msm Eff Normal	5,448,530,900	8,140,993,749	6,536,243,749
2	MK Reg Angs Flat Normal	5,061,760,289	3,103,920,421	1,956,476,228
3	MK Reg Angs Eff Normal	19,117,962,155	20,679,838,220	21,807,186,872
4	KS Reg Msm Eff Normal	9,000,000	55,500,000	120,000,000
5	KS Reg Angs Flat Normal	2,079,383,967	1,808,520,200	1,510,585,200
6	KS Reg Angs Eff Normal	8,707,068,721	10,882,599,627	12,911,295,176
7	Konsumtif-Karyawan	17,344,000	48,749,900	66,582,600
8	IS Reg Msm Eff Skema 2	655,000,000	500,000,000	500,000,000
9	IS Reg Angs Flat Normal	100,482,200	339,928,100	216,665,800
10	IS Reg Angs Eff Normal	2,182,926,732	975,677,105	2,416,713,805
Total		43,379,458,963	46,535,727,321	48,041,749,430

c. Tabel kinerja penyaluran kredit berdasarkan segmen usaha

No	Segmen Usaha	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
1	Mikro	8,667,311,303	20,350,870,444	23,335,552,403
2	Kecil	13,812,731,154	8,442,430,163	5,026,158,839
3	Menengah	9,877,388,988	5,801,670,487	4,735,023,888
4	Selain Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	11,022,027,518	12,940,756,227	16,145,014,300
Total		43,379,458,963	47,535,727,321	49,241,749,430

2. Komposisi portofolio kredit

a. Tabel kredit bermasalah berdasarkan jenis kredit

No	Jenis Kredit	NPL 2022	NPL 2023	NPL 2023
1	Modal Kerja	5.04%	7.23%	13.36%
2	Investasi	0.00%	0.00%	1.05%
3	Konsumsi	0.27%	0.63%	1.14%

b. Tabel kinerja kredit bermasalah 5 terbesar yang mempengaruhi NPL

i. Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	NPL	
		2023	2024
1	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Ybdi	4.57%	4.41%
2	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	0.83%	3.28%
3	Peternakan Unggas	0.07%	1.46%
4	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	0.44%	1.10%
5	Aktivitas Hukum Dan Akuntansi	0.00%	1.02%

ii. Area Pemasaran

No	Wilayah		NPL
	Kecamatan	Kota/Kabupaten	
1	Baturetno	Kab. Wonogiri-Jawa Tengah	4.41%
2	Kaliwungu	Kendal-Jawa Tengah	2.93%
3	Tersono	Batang-Jawa Tengah	1.29%
4	Semarang Tengah	Semarang-Jawa Tengah	1.02%
5	Semarang Utara	Semarang-Jawa Tengah	0.77%

c. Tabel kinerja kredit bermasalah 5 terbesar yang mengalami kenaikan NPL

i. Sektor Ekonomi

No	Sektor Ekonomi	Perkembangan NPL
1	Perdagangan Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toko	2.45%
2	Peternakan Unggas	1.39%
3	Aktivitas Hukum Dan Akuntansi	1.02%
4	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	0.65%
5	Angkutan Bus Bertrayek	0.64%

ii. Area Pemasaran

No	Wilayah		NPL
	Kecamatan	Kota/Kabupaten	
1	Kaliwungu	Kendal-Jawa Tengah	2.93%
2	Semarang Tengah	Semarang-Jawa Tengah	1.02%
3	Semarang Utara	Semarang-Jawa Tengah	0.77%
4	Ngaliyan	Semarang-Jawa Tengah	0.73%
5	Candiroto	Temanggung-Jawa Tengah	0.73%

3. Data simpanan berdasarkan jenis tabungan dan deposito

a. Tabungan

No	Produk Tabungan	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
1	Tabungan Wajib Restu	2,153,919,514	2,321,031,867	2,292,689,110
2	Tabungan Restu	2,908,335,558	3,106,966,223	3,360,115,512
3	Tabungan Simapan	5,657,011,076	6,004,665,860	5,458,748,886
4	Tabungan Sifitri	1,274,400,000	1,872,800,000	2,383,801,000
5	Tabungan Qurban	156,562,691	176,981,405	203,583,726
6	Tab Karyawan	686,636,673	498,392,896	462,587,736
7	Tabungan Sitaru	927,000,000	1,041,200,000	840,400,000
8	Tabungan Harmoni	0	1,212,541,752	30,275,217
9	Tabungan Tarisa	1,440,600,000	11,400,000	0
10	Tabungan Tarisa 6	11,515,205	3,130,390	0
11	Tabungan Tarisa 8	0	0	1,403,401,648
12	Tabungan Umroh	3,534,948	0	0
13	Tabungan Satu Fortuna 2	1,107,221,132	15,300,438	0
14	Tabungan Simapan Akhir Tahun	5,400,000	5,200,000	0
15	Tabungan Simpel	172,764,820	173,384,863	145,466,746
Total		16,504,901,616	16,442,995,695	16,581,069,581

b. Deposito

No	Produk Deposito	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
1	Deposito Berjangka 1 Bln Cap	1,885,280,622	1,646,513,083	1,538,558,324
2	Deposito Berjangka 3 Bln	13,655,500,000	15,132,000,000	13,382,000,000
3	Deposito Berjangka 1 Bln	6,812,500,000	5,595,249,072	5,006,749,072
4	Deposito Berjangka 3 Bln Cap	1,900,261,781	3,107,813,444	3,656,457,731
5	Deposito Berjangka 6 Bln	2,592,000,000	3,229,500,000	3,609,000,000
6	Deposito Berjangka 6 Bln Cap	0	830,657,078	1,539,629,870
7	Deposito Berjangka 12 Bln	615,000,000	500,000,000	400,000,000
Total		27,460,542,403	30,041,732,677	29,132,394,997

4. Kinerja aset dan kewajiban
a. Kinerja Aset

Keterangan	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
Penempatan pada Bank Lain	19,187,506,148	19,373,529,289	18,839,508,225
Giro pada Bank Lain	3,549,591,782	3,322,754,526	4,607,736,357
Tabungan pada Bank Lain	3,307,914,366	470,774,763	2,201,771,868
Deposito pada Bank Lain	12,330,000,000	15,580,000,000	12,030,000,000
Kredit Yang Diberikan	43,379,409,263	47,535,727,322	49,241,749,431
Aset Tetap dan Inventaris	208,907,858	189,087,198	1,748,199,122

b. Kinerja Kewajiban

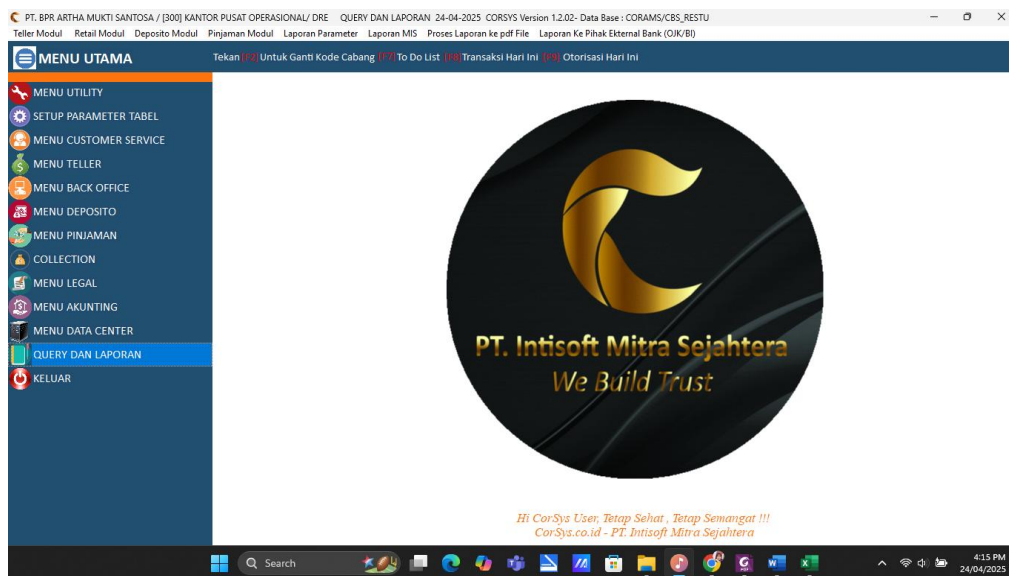
Keterangan	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
Kewajiban	45,423,673,516	47,483,718,463	47,925,277,471
Kewajiban segera	120,037,705	133,887,378	88,267,562
Tabungan	16,504,901,616	16,442,995,695	16,581,069,581
Deposito	27,460,542,403	30,041,732,677	29,132,394,997

5. Jumlah nasabah aktif serta distribusi jaringan kantor

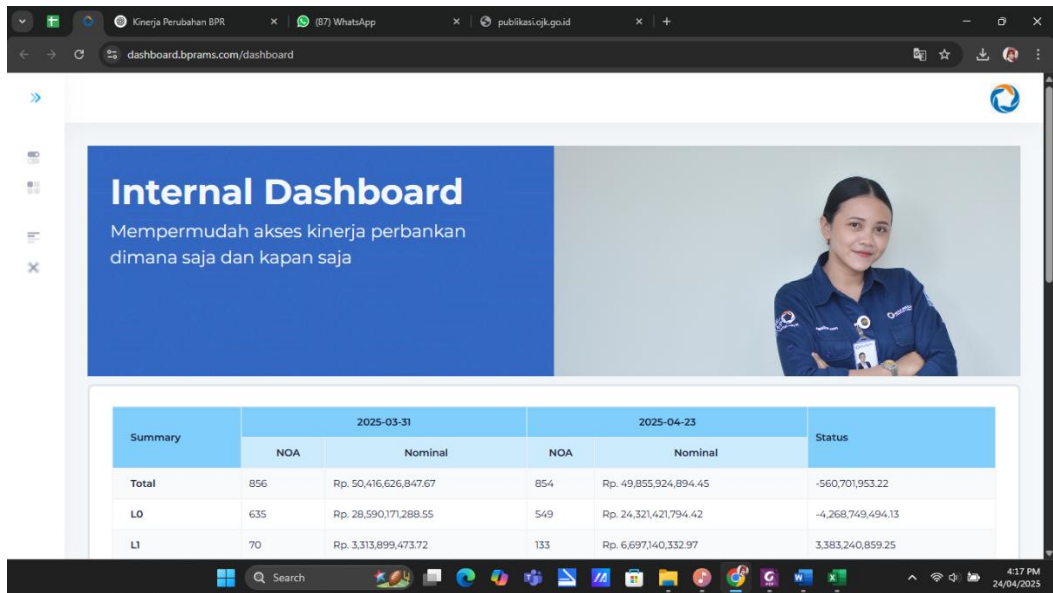
No	Keterangan	Kinerja 2022	Kinerja 2023	Kinerja 2024
1	Kredit yang Diberikan	826	847	830
	Kantor Pusat Operasional	525	511	507
	Kantor Cabang	301	336	323
2	Deposito	196	206	197
	Kantor Pusat Operasional	191	199	191
	Kantor Cabang	5	7	6
3	Tabungan	6,869	5,784	5,995
	Kantor Pusat Operasional	4,919	4,227	4,347
	Kantor Cabang	1,950	1,557	1,648

6. Penggunaan teknologi informasi dalam mendukung operasional

a. Core Banking System (CBS)



b. Dashboard Internal



Summary	2025-03-31		2025-04-23		Status
	NOA	Nominal	NOA	Nominal	
Total	856	Rp. 50,416,626,847.67	854	Rp. 49,855,924,894.45	-560,701,953.22
LO	635	Rp. 28,590,171,288.55	549	Rp. 24,321,421,794.42	-4,268,749,494.13
LI	70	Rp. 3,313,899,473.72	133	Rp. 6,697,140,332.97	3,383,240,859.25

7. Laporan Penerapan Tata Kelola

Sebagai bagian dari komitmen terhadap penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), bersama ini kami lampirkan Laporan Penerapan Tata Kelola sebagai dokumen pendukung yang memuat informasi lengkap mengenai struktur, proses, dan hasil evaluasi tata kelola selama periode pelaporan, termasuk hasil self-assessment dengan peringkat komposit 2 (Baik). Laporan ini disusun sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas perusahaan.

a. Faktor 1

PELAKSANAAN ASPEK PEMEGANG SAHAM		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan khususnya Bab IV terkait Perbankan jo Pasal 23 yang berbunyi "BPR didirikan oleh: Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia". Pemegang saham BPR adalah Irma Wardhani yang berwarga negara Indonesia dan PT Yasaniaga Utama Mulia yang berbadan hukum Indonesia, dengan komposisi saham masing-masing 50% dan sebagai Pemegang Saham Pengendali adalah PT. Yasaniaga Utama Mulia. Hal ini telah sesuai dengan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dimana Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan paling sedikit 25%.
2.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai dengan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, POJK No 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, bahwa setiap pengambilan keputusan melalui RUPS yang tercantum di Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT BPR Artha Mukti Santosa No 3 tanggal 13 Mei 2008 serta telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris melalui Rencana Bisnis Bank namun hal tersebut belum terdokumentasikan dengan baik.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemantauan atas perkembangan BPR tidak melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris namun disampaikan pada saat RUPS tahunan BPR dan belum terdokumentasi dengan baik
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham mendukung secara sangat memadai dalam pengembangan BPR baik berupa perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain, dimana hal tersebut tercantum pada RUPS tahunan BPR.
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham mendukung secara cukup memadai terkait tata kelola yang sehat terutama terkait benturan kepentingan, dimana terdapat transaksi yang berpotensi mengakibatkan benturan kepentingan yaitu sewa kantor pusat operasional dan kantor cabang Weleri, namun hal tersebut dapat dimitigasi dengan adanya harga pembandingan.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan melalui RUPS selalu memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari Dewan Komisaris dan pendapat dari seluruh pemegang saham.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, bahwa setiap pemegang saham mendukung penuh kesetaraan hak bagi seluruh pemegang saham dimana setiap pemegang saham memiliki hak dan perlakuan yang setara dan wajar tanpa pemberian perlakuan istimewa kepada salah satu pemegang saham.
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, bahwa pemegang saham mendukung secara memadai perkembangan kinerja BPR dengan rencana strategis seperti melalui realisasi permodalan dimana hal tersebut tercantum pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BPR.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham cukup memadai tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dimana setiap pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dan terkait dengan transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan, BPR memitigasinya dengan adanya harga pembandingan.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian dividen selalu memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, dimana setiap hal terkait dengan penggunaan laba maupun pembagian dividen disampaikan dan tercantum dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.

KESIMPULAN FAKTOR 1		
a. Struktur <u>Faktor positif:</u> a. Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah memenuhi sangat memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS telah tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <u>Faktor negatif:</u>		
b. Proses <u>Faktor positif:</u> a. Pemegang saham mendukung secara memadai dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.; b. Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham. <u>Faktor negatif:</u> a. Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah tersampaikan namun tidak terdokumentasi dengan baik; b. Pemegang saham melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris yang disampaikan pada RUPS tahunan namun tidak terdokumentasi dengan baik; c. Pemegang saham telah memastikan cukup memadai pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.		
c. Hasil <u>Faktor positif:</u> a. Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi; b. Perkembangan kinerja BPR telah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.; c. Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal <u>Faktor negatif:</u> Pemegang saham secara cukup memadai tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.		
Hasil Penilaian Faktor 1	Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]	2	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola

b. Faktor 2

PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Jumlah anggota Direksi telah sesuai dengan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 10 dimana saat ini sesuai dengan modal inti BPR yang kurang dari Rp50.000.000.000,00 dan sesuai dengan POJK Nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 44 ayat (1) maka BPR memiliki 2 anggota Direksi yaitu Sdr. Toto Wijatmiko sebagai Direktur Utama dan Sdr. Yuni Mardiaty sebagai Direktur yang juga merangkap sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Dokumen pendukung berupa Akta Notaris perpanjangan jabatan Yuni Mardiaty.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan kantor pusat operasional BPR yaitu kota Semarang provinsi Jawa Tengah, hal ini telah sesuai dengan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 15 yang berbunyi "Seluruh anggota Direksi Wajib bertempat tinggal di provinsi yang sama atau kabupaten/kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota pada lokasi kantor pusat BPR atau BPR Syariah". Dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Domisili BPR dari OJK dan KTP anggota Direksi
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi BPR Artha Mukti Santosa tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 18 yang berbunyi "Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan BPR Syariah dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan BPR Syariah sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR dan BPR Syariah."

PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi BPR Artha Mukti Santosa sangat memadai telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham seperti yang diatur dalam POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 17.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi telah memadai, termasuk telah menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas sangat memadai namun secara kualitas masih cukup memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Direksi telah menunjuk 2 (dua) Pejabat Eksekutif yang bersifat independen yaitu Dwi Retno Andayani sebagai Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang telah memiliki sertifikasi Pemantau Risiko serta Sketsa Damar Prabowo sebagai Pejabat Eksekutif Audit Internal. Hal ini telah sesuai dengan POJK No 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 22. Dokumen pendukung berupa SK penunjukan dan sertifikat certif Pemantau Risiko
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Sesuai dengan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 28, bahwa Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit sesuai dengan ketentuan tersebut. Dokumen pendukung berupa tata tertib anggota Direksi
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi belum menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR sesuai dengan POJK No 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 23.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional tenaga ahli atau konsultan kecuali persyaratan sesuai dengan POJK No 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 27. Direksi menggunakan jasa profesional KJPP untuk analisa agunan yang akan di lelang dengan minimal nilai Rp500.000.000,00
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Seluruh anggota Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan POJK No 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 16, dan terkait dengan kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan dilakukan secara memadai
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Dalam proses penerapan tata kelola, Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi dengan memadai
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan cukup memadai
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain dengan cukup memadai.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi selalu berupaya menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dengan memadai
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja secara memadai, dimana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan memadai.

PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi telah memastikan dengan memadai bahwa Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, dimana salah satu anggota Direksi menerima fasilitas pinjaman dari BPR dengan persetujuan Dewan Komisaris namun tidak menyebabkan dampak yang signifikan secara finansial.
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi selalu berupaya membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, baik yang dilaksanakan oleh pihak eksternal maupun internal dengan memadai.
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai dengan memadai, namun tidak seluruh pegawai memahami hal tersebut dan ini tidak berdampak secara signifikan.
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah mengungkapkan bahwa Direksi tidak memiliki saham pada BPR Artha Mukti Santosa dan perusahaan lain dan tidak ada hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR. Dokumen pendukung Akta Notaris terbaru serta Data Matrik keluarga anggota Direksi
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Anggota Direksi senantiasa mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi telah melaksanakan secara sangat memadai pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi dan namun evaluasi hanya dilakukan jika ada peraturan ketentuan perundang-undangan yang berpengaruh pada aktivitas bisnis BPR secara signifikan.
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi belum melakukan evaluasi bahkan belum menyusun kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR sesuai ketentuan perundang-undangan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dengan memadai yang tertuang dalam RUPS namun belum dilengkapi dengan risalah rapat. Dokumen pendukung berupa RUPS Tahunan BPR.
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai telah mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR dengan cukup memadai dimana tidak sepenuhnya pegawai memahami tentang kebijakan strategis
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi, dimana jika terjadi deviasi atas suatu kebijakan merupakan keputusan dari Direktur Utama dengan sepengetahuan anggota Direksi lainnya.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dengan sangat memadai, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati secara memadai. Dokumen pendukung berupa risalah rapat anggota Direksi
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR secara memadai, namun pencapaian hasil belum sesuai ekspektasi stakeholders, hal tersebut tertuang dalam realisasi rencana bisnis bank dimana terdapat kinerja yang tidak dapat tercapai sesuai dengan rencana bisnis bank.
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi belum secara memadai menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, dimana laporan tata kelola belum disampaikan kepada pemegang saham pengendali.

KESIMPULAN FAKTOR 2		
a. Struktur <u>Faktor positif:</u> a. Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan; b. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah yang sama dengan kantor pusat BPR yaitu Kota Semarang; c. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; d. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sesuai dengan POJK Tata Kelola; e. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; f. Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara sangat memadai, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan dengan memadai <u>Faktor negatif:</u> a. Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi telah cukup memadai, termasuk telah menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas yang sangat memadai namun dengan kualitas yang cukup memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.; b. Direksi belum menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.		
b. Proses <u>Faktor positif:</u> a. Direksi telah melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi dengan memadai; b. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris secara memadai; c. Pengambilan keputusan Direksi yang telah diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja; d. Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi telah memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat; e. Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.; f. Anggota Direksi berupaya membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya; g. Anggota Direksi berupaya membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan memadai; h. Direksi tidak memiliki saham pada BPR Artha Mukti Santosa maupun perusahaan lain serta tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham.; i. Direksi telah berupaya mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.; j. Anggota Direksi senantiasa mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan sangat memadai. <u>Faktor negatif:</u> a. Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dengan cukup memadai; b. Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain dengan cukup memadai; c. Direksi melaksanakan tata tertib kerja anggota Direksi dengan memadai namun mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi belum secara konsisten.; d. Direksi belum mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.		
c. Hasil <u>Faktor positif:</u> a. Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dengan memadai ada kelemahan yang akan diperbaiki; b. Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi telah dilaksanakan dengan memadai, dimana pemutus tertinggi adalah Direktur Utama dengan sepengetahuan anggota Direksi lainnya; c. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati. <u>Faktor negatif:</u> a. Seluruh pegawai tidak sepenuhnya mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.; b. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR secara cukup memadai, namun pencapaian hasil belum sesuai ekspektasi stakeholders; c. Direksi belum secara memadai menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.		
Hasil Penilaian Faktor 1	Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]	2	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

c. Faktor 3

PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah Dewan Komisaris telah sesuai dengan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 37 dimana saat ini sesuai dengan modal inti BPR yang kurang dari Rp50.000.000.000,00 dan sesuai dengan POJK Nomor 7 tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 45 ayat (1) maka BPR memiliki 2 Dewan Komisaris dan sesuai dengan permodalan, BPR belum memiliki Komisaris Independen. Dewan Komisaris terdiri dari Sdr. Catur Budi Pamungkas sebagai Komisaris Utama dan Sdr. Andri Eko Harseno sebagai Komisaris. Dokumen pendukung berupa Akta Notaris Pengangkatan Catur Budi Pamungkas.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan kantor pusat operasional BPR yaitu provinsi Jawa Tengah, hal ini telah sesuai dengan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 37 yang berbunyi "Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR dan BPR Syariah". Dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Domisili BPR dari OJK dan KTP anggota Dewan Komisaris
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Sesuai dengan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 48, bahwa Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris yang memuat paling sedikit sesuai dengan ketentuan tersebut. Dokumen pendukung berupa tata tertib anggota Dewan Komisaris
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Artha Mukti Santosa merangkap jabatan pada 1 (satu) BPR yaitu BPR Restu Mranggen Makmur, hal ini sesuai dengan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi "Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPR Syariah lain."
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Komisaris BPR Artha Mukti Santosa sangat memadai telah memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham seperti yang diatur dalam POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 39.
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Sesuai dengan modal inti BPR yang kurang dari Rp50.000.000,00, BPR Artha Mukti Santosa tidak memiliki Komisaris Independen.
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Seluruh anggota Dewan Direksi telah memiliki kompetensi sesuai dengan POJK No 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 38, dan terkait dengan kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris belum menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris BPR sesuai dengan POJK No 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 46.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktidat baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktidat baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS dengan cukup memadai.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan dengan cukup memadai

PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dalam hal pengambilan keputusan kegiatan operasional Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut namun keputusan tersebut diketahui oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris berhak untuk mengambil keputusan terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan	Dewan Komisaris belum memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain termasuk memastikan bahwa Direksi telah menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris secara memadai berupaya meminta Direksi untuk memberikan penjelasan atas hasil kinerja, permasalahan yang mungkin timbul, dan kebijakan operasional yang telah diputuskan oleh Direksi.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris dengan cukup memadai, dimana evaluasi tata tertib dilakukan jika ada perubahan ketentuan perundang-undangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan usaha BPR. Tata tertib kerja Dewan Komisaris telah dilakukan pengkajian atas permintaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, dimana Dewan Komisaris secara berkala setiap 2 kali dalam seminggu ber Kantor di Kantor pusat BPR, serta setiap sebulan sekali melakukan kunjungan ke Kantor Cabang.
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali dan jika terdapat hal yang bersifat insidental maka Dewan Komisaris akan menyelenggarakan rapat, dalam pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 kali.
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Anggota Dewan Komisaris dengan sangat memadai tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dengan memadai yang tertuang dalam risalah rapat dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris dengan cukup memadai.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris mengajukan RUPS jika terdapat perubahan yang terkait dengan kepengurusan, kebijakan remunerasi dan nominasi bagi pengurus BPR serta permodalan.
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Sesuai dengan permodalan BPR, BPR belum memiliki Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dikarenakan Dewan Komisaris belum menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dengan memadai
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan minimal 4 kali dalam setahun dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dengan sangat memadai.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris belum disusun dan dibuat oleh Dewan Komisaris.
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Dewan Komisaris secara memadai telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dengan cukup memadai dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, namun dalam hal kinerja BPR dan pencapaian hasil belum sesuai dengan ekspektasi stakeholders, dimana hingga akhir 2024 kinerja BPR seperti tingkat kredit bermasalah mengalami penurunan kinerja secara signifikan dan kemampuan BPR tidak tercapai sesuai dengan rencana.

KESIMPULAN FAKTOR 3		
a. Struktur <u>Faktor positif:</u> a. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen telah sangat memadai sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; b. Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu di provinsi yang sama dengan kedudukan kantor pusat BPR, yaitu provinsi Jawa Tengah.; c. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang telah sesuai dengan POJK tata kelola; d. Dewan Komisaris melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.; e. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. <u>Faktor negatif:</u> a. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR dengan cukup memadai; b. Dewan Komisaris belum kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.		
b. Proses <u>Faktor positif:</u> a. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.; b. Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR dengan memadai; c. Dewan Komisaris secara memadai telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.; d. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan dalam pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.; e. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.; f. Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris dengan memadai. <u>Faktor negatif:</u> a. Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS dengan cukup memadai.; b. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan dengan cukup memadai.; c. Dewan Komisaris kurang memadai dalam memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.; d. Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris dengan cukup memadai.; e. Dewan Komisaris belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.		
c. Hasil <u>Faktor positif:</u> a. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.; b. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris secara sangat memadai; c. Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu secara memadai dan konsisten. <u>Faktor negatif:</u> a. Dewan komisaris belum menyusun kebijakan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris; b. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		
Hasil Penilaian Faktor 1	Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]	2	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

d. Faktor 4

Faktor kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite tidak dinilai dalam laporan ini karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPR dengan modal inti di bawah Rp50.000.000.000,00 tidak diwajibkan membentuk Komite. Oleh karena itu, fungsi pengawasan tetap dilaksanakan langsung oleh Dewan Komisaris tanpa adanya struktur Komite khusus, dan pelaksanaan tugas pengawasan tetap berjalan secara efektif sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan perusahaan.

e. Faktor 5

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR yang memadai, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi. Dokumen pendukung berupa kebijakan benturan kepentingan dan SK Direksi benturan kepentingan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan, dimana dalam penanganan benturan kepentingan BPR selalu mengedepankan prinsip keadilan dan tidak ada diskriminatif. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris berupaya memastikan bahwa setiap jenjang organisasi menghindari adanya benturan kepentingan namun belum secara konsisten melakukan sosialisasi kepada karyawan. Terjadi transaksi yang menyebabkan benturan kepentingan yaitu transaksi sewa gedung dan mobil operasional BPR dimana pihak yang menyewakan adalah Bpk. Santoso Soegiarto yang merupakan salah satu pemegang saham di PT Yasaniaga Utama Mulia, namun hal itu tidak mempengaruhi financial BPR secara signifikan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan, dimana setiap jenjang organisasi wajib mempelajari, memahami, mentaati dan melaksanakan ketentuan untuk menghindari benturan kepentingan dan apabila satu dan lain hal benturan kepentingan tidak dapat dihindari maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada atasan langsung.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan secara memadai dengan mengedepankan prinsip keadilan tanpa kehilangan obyektivitas dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan memadai.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	BPR dengan cukup memadai menangani benturan kepentingan dengan mengedepankan prinsip keadilan tanpa kehilangan obyektivitas.

KESIMPULAN FAKTOR 5	
a. Struktur	Faktor positif: BPR telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang memadai yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi. Faktor negatif:

KESIMPULAN FAKTOR 5		
b. Proses <u>Faktor positif:</u> <u>Faktor negatif:</u> Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai selalu berupaya dengan cukup memadai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.		
c. Hasil <u>Faktor positif:</u> Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dengan memadai. <u>Faktor negatif:</u> a. Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan cukup memadai; b. BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan cukup memadai		
Hasil Penilaian Faktor 1	Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]	3	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik.

f. Faktor 6

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 73, dan berdasarkan Akta Notaris No 19 tertanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Suyanto
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai dengan permodalan BPR yang kurang dari Rp50.000.000.000,00, maka BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang independen yang menangani fungsi kepatuhan yaitu Dwi Retno Andayani, hal ini telah sesuai dengan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 72 yang berbunyi "BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menugaskan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan."
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dengan memadai pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, dimana pengkinian pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dilakukan jika terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha BPR secara signifikan.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dimana Pejabat Eksekutif telah memiliki sertifikasi kepatuhan dan pemantau risiko.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu berupaya merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR dengan cukup memadai antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang memadai yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini yang dilakukan secara cukup memadai dan belum konsisten.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu berupaya memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memberikan sosialisasi terkait budaya kepatuhan kepada seluruh jenjang organisasi namun tidak sepenuhnya jenjang organisasi tersebut memahaminya
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dengan cukup memadai, dimana terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki di masa datang.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR dinilai belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran ketentuan dimana dari hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan untuk tahun 2024, ditemukan pelanggaran POJK yang menimbulkan sanksi dimana sanksi tersebut lebih besar daripada pemeriksaan sebelumnya.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan secara memadai laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

KESIMPULAN FAKTOR 6		
a. Struktur <u>Faktor positif:</u> a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan dengan sangat memadai sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.; b. Sesuai permodalannya, BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.; c. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dengan memadai.; d. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang sangat memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. <u>Faktor negatif:</u>		
b. Proses <u>Faktor positif:</u> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan secara memadai. <u>Faktor negatif:</u> a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dengan cukup memadai; b. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dengan cukup memadai.		
c. Hasil <u>Faktor positif:</u> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. <u>Faktor negatif:</u> BPR dinilai belum berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		
Hasil Penilaian Faktor 1	Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]	2	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

g. Faktor 7

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR memiliki permodalan kurang dari Rp50.000.000.000,00, sesuai dengan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 79 ayat (3) yang berbunyi "BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib mengangkat 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional. sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.", maka BPR telah mengangkat Sketsa Damar Prabowo sebagai Pejabat Eksekutif Audit Internal.
2	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki secara cukup memadai dan belum menginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Penginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dilakukan dalam hal terdapat perubahan signifikan peraturan perundang-undangan

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Sesuai dengan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 79 ayat (3), untuk fungsi audit yang optimal dan menghindari adanya benturan kepentingan maka Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Sesuai dengan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah jo Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi "Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama", Pejabat Eksekutif Audit Internal BPR secara cukup memadai telah bertanggungjawab langsung kepada direktur utama.
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan sumber daya manusia sebagai Pejabat Eksekutif audit internal dengan kuantitas yang memadai sesuai dengan permodalan BPR namun secara kualitas Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, dimana dalam melakukan audit Pejabat Eksekutif audit internal masih bersifat administratif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR telah cukup memadai menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan namun tidak sepenuhnya seluruh aspek tersebut memahaminya namun hal tersebut tidak memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat secara signifikan.
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara independen dan cukup memadai yang dimana persiapan audit dan penyusunan program audit dilaksanakan cukup memadai, serta untuk pelaksanaan audit dinilai cukup memadai karena dalam hal akan melakukan audit, Pejabat Eksekutif tidak memperoleh surat penugasan, serta untuk pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit dinilai cukup memadai karena sebagian besar audit masih dilakukan sebatas administratif
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dengan memadai, walaupun pada saat ini Pejabat Eksekutif Audit Internal belum memiliki sertifikasi Pejabat Eksekutif Audit Internal, namun pelatihan yang diikuti oleh PEAL cukup memadai untuk meningkatkan kompetensinya.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit internal tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara memadai
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu secara berkala dan konsisten.

KESIMPULAN FAKTOR 7	
a. Struktur	
<u>Faktor positif:</u> a. BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; b. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	
<u>Faktor negatif:</u> a. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris secara cukup memadai; b. Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama secara cukup memadai; c. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif dengan cukup memadai.	
b. Proses	
<u>Faktor positif:</u> BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	
<u>Faktor negatif:</u> a. BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat dengan cukup memadai; b. BPR belum menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.; c. Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara independen dan cukup memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	

KESIMPULAN FAKTOR 7		
c. Hasil <u>Faktor positif:</u> a. BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan secara memadai.; b. BPR telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. <u>Faktor negatif:</u>		
Hasil Penilaian Faktor 1	Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]	2	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

h. Faktor 8

PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Dalam penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP), pemenuhan aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai menjadi faktor utama BPR untuk melakukan penugasan AP dan KAP.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, dalam rangka penunjukan AP dan KAP BPR memperhatikan apakah AP dan KAP tersebut terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dimana penunjukan tersebut berdasarkan persetujuan dan rekomendasi dan usulan dari Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan memadai dan tepat waktu.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter oleh AP dan KAP dinilai memadai namun belum sepenuhnya menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas dengan memadai.
11	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit oleh AP dan KAP telah memuat paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan memadai

KESIMPULAN FAKTOR 8		
a. Struktur <u>Faktor positif:</u> Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh BPR telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai. <u>Faktor negatif:</u>		
b. Proses <u>Faktor positif:</u> a. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR selalu menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).; b. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. <u>Faktor negatif:</u>		
c. Hasil <u>Faktor positif:</u> a. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas; b. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. <u>Faktor negatif:</u>		
Hasil Penilaian Faktor 1	Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]	2	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

i. Faktor 9

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai dengan permodalan BPR yang kurang dari Rp50.000.000.000,00, maka BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko yang juga berfungsi sebagai fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, POJK Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM bagi Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan, dan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dimana Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Pejabat Eksekutif manajemen risiko, strategi anti fraud dan program APU, PPT, dan PPPSPM. Dokumen Pendukung SK Penunjukan Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan, manajemen risiko, strategi anti fraud dan program APU, PPT dan PPPSPM
2	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko secara memadai namun terkait pengkinian dilakukan jika terdapat kondisi dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan usaha BPR.
3	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun pengkiniannya dilakukan jika terdapat kondisi dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap produk dan aktivitas baru BPR.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah cukup memadai melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan namun belum sepenuhnya menjalankan fungsinya secara optimal dan efektif.
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dengan memadai, telah melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi dengan konsisten, melakukan penerapan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan memadai, serta memastikan penerapan dan evaluasi kebijakan anti fraud dan program APU, PPT dan PPPSPM dengan cukup memadai.
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan kebijakan manajemen risiko namun dalam hal melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko, pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko serta memastikan dan mengevaluasi penerapan manajemen risiko dilakukan cukup memadai oleh Dewan Komisaris.
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko namun pelaksanaannya belum secara optimal.
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan cukup memadai secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan yang disusun secara memadai
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR selalu berupaya menerapkan secara memadai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dimana seluruh jenjang organisasi telah menerapkan program tersebut dengan memadai
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif dengan sangat memadai sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dimana BPR selalu mensosialisasikan tentang anti fraud bahkan sebelum POJK Strategi Anti Fraud berlaku dan BPR telah memitigasi terkait fraud dengan melakukan kebijakan untuk mencegah terjadinya fraud
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh secara memadai namun tidak seluruh unit kerja memahami terkait hal tersebut dan ini tidak berdampak signifikan.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu 4 risiko yang terdiri dari risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas dengan memadai, namun selain 4 risiko tersebut BPR juga menerapkan 2 risiko lainnya yaitu risiko reputasi dan risik strategi cukup konsisten

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh dengan cukup memadai yang mendukung Direksi dan Pejabat Eksekutif membuat laporan untuk kepentingan eksternal maupun internal.
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko dengan cukup memadai namun belum seluruh jenjang organisasi memahami terkait budaya sadar risiko tersebut
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan sangat memadai, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik dengan konsisten dan memadai.
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan memadai dan optimal.
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR akan menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan jika terdapat kejadian anti fraud yang memiliki dampak signifikan.

KESIMPULAN FAKTOR 8		
a. Struktur <u>Faktor positif:</u> a. BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.; b. BPR telah memiliki dan menginkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.; c. BPR telah memiliki dan menginkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memadai. <u>Faktor negatif:</u>		
b. Proses <u>Faktor positif:</u> a. Direksi telah menyusun dengan memadai kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik, dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.; b. BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko dengan memadai.; c. BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan memadai.; d. BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan memadai.; e. BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dengan memadai.; f. BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. <u>Faktor negatif:</u> a. Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab cukup optimal dan cukup konsisten terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.; b. Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, melakukan dengan cukup memadai evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, evaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris serta melakukan pengawasan secara aktif dan cukup memadai terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.; c. BPR telah menerapkan cukup memadai tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.; d. BPR memiliki sistem informasi yang cukup memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.; e. Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko dengan cukup memadai.		
c. Hasil <u>Faktor positif:</u> a. BPR telah menyusun dengan sangat memadai laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.; b. BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan memadai.; c. BPR telah menyusun dan menyampaikan dengan memadai laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan. <u>Faktor negatif:</u>		
Hasil Penilaian Faktor 1	Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]	2	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

j. **Faktor 10**

BATAS MAKSIMAL PEMBERIAN KREDIT		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan POJK Nomor 1 tahun 2024 tentang Kualitas Aset dan POJK No 23 tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	BPR dengan memadai secara berkala melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar sesuai dengan POJK Nomor 23 tahun 2022 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR dan Batas Maksimum Penyaluran Dana BPRS, dimana terkait BMPK dituangkan dalam Pedoman, Kebijakan dan Prosedur Perkreditan.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Dalam proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar, BPR selalu memperhatikan dan memenuhi BMPK dengan memadai berdasarkan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan, dimana BPR memiliki kebijakan yang tidak tertulis bahwa batas maksimal pemberian kredit yang dapat dimitigasi risikonya sebesar Rp2.000.000.000,00.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR selama tahun 2024 tidak pernah menyusun laporan pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, karena BPR dalam proses penyaluran kredit selalu memperhatikan nilai BMPKnya.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sepanjang tahun 2024, BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

KESIMPULAN FAKTOR 10		
a. Struktur <u>Faktor positif:</u> BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara memadai <u>Faktor negatif:</u>		
b. Proses <u>Faktor positif:</u> a. BPR secara berkala dan memadai mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.; b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi secara memadai sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian <u>Faktor negatif:</u>		
c. Hasil <u>Faktor positif:</u> a. BPR belum pernah melakukan pelaporan pelanggaran BMPK; b. BPR tidak pernah melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. <u>Faktor negatif:</u>		
Hasil Penilaian Faktor 1	Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]	1	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang sangat baik.

k. Faktor 11

INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang dinilai cukup memadai yang sesuai dengan ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris yang dilakukan setidaknya satu kali dalam setahun.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah memadai memiliki kebijakan dan prosedur sistem teknologi informasi namun untuk kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan masih dalam proses penyusunan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR berupaya selalu memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi agar tidak menimbulkan kerugian secara financial maupun non financial bagi BPR.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan memadai, berkala dan tepat waktu dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah menyusun laporan tahunan secara berkala, memadai dan tepat waktu dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan laporan tahunan.
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR secara memadai dan konsisten dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi secara lengkap, akurat, kini, utuh, memadai dan tepat waktu dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	BPR telah menyampaikan seluruh laporan dengan sangat memadai dimana telah sesuai kondisi sebenarnya, tidak terjadi window dressing, penetapan kualitas kredit sesuai dengan POJK Nomor 1 tahun 2024 tentang kualitas aset, perhitungan PPKA maupun pencatatannya sesuai dengan SAK dan POJK tentang kualitas aset.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Seluruh jenjang organisasi BPR tidak pernah melakukan penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu dengan sangat memadai dan konsisten kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	BPR berupaya dengan memadai menyampaikan laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan menindaklanjuti setiap laporan pengaduan sesegera mungkin serta menindaklanjuti pelayanan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan secara tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR pernah menanggapi pengaduan konsumen yang dikirim via Kontak 157 melebihi batas waktu yang dipersyarat dikarenakan kelalaian fungsi yang bertanggung jawab atas pengaduan konsumen, namun hal tersebut tidak berdampak signifikan pada risiko reputasi BPR, dimana permasalahan yang menjadi tema pengaduan sebenarnya telah terselesaikan.

KESIMPULAN FAKTOR 11		
a. Struktur <u>Faktor positif:</u> a. Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.; b. BPR telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris. <u>Faktor negatif:</u> BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait sistem teknologi informasi namun untuk kebijakan dan prosedur integritas pelaporan dalam proses penyusunan.		
b. Proses <u>Faktor positif:</u> a. BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi secara konsisten.; b. BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan sangat memadai dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.; c. BPR menyusun laporan tahunan secara sangat memadai dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.; d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR secara memadai dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.; e. BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi secara sangat memadai dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.; f. Seluruh laporan yang disampaikan BPR sangat memadai telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja. <u>Faktor negatif:</u> -		
c. Hasil <u>Faktor positif:</u> a. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.; b. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.; c. Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dan memadai. <u>Faktor negatif:</u>		
Hasil Penilaian Faktor 1	Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]	1	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan sangat memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang sangat baik.

I. Faktor 12

RENCANA BISNIS		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1.	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dengan sangat memadai memproyeksikan dan memberikan gambaran rencana bisnis BPR untuk 1 (satu) tahun ke depan.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR telah menggambarkan secara sangat memadai rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai POJK Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Seluruh pemegang saham mendukung sepenuhnya secara konsisten dan memadai atas Rencana bisnis BPR dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan memadai dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko, dimana dalam penyusunan rencana bisnisnya, Direksi meminta masukan rencana kerja dan komitmen dari setiap unit kerja yang ada di BPR.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dengan memadai dan berkala terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR yang dituangkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.

RENCANA BISNIS		
No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara utuh, lengkap dan tepat waktu.
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum sepenuhnya tercapai sesuai target yang ditetapkan, dimana dari aktivitas bisnisnya untuk kinerja penyaluran dana baik secara kuantitas maupun kualitas belum mencapai target rencana bisnis dan untuk kinerja laba juga belum tercapai sesuai rencana bisnis.

KESIMPULAN FAKTOR 11		
a. Struktur <u>Faktor positif:</u> a. Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dengan sangat memadai; b. Rencana bisnis BPR telah menggambarkan secara sangat memadai rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.; c. Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur. <u>Faktor negatif:</u> -		
b. Proses <u>Faktor positif:</u> a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis dan memadai, komprehensif dan terukur (achievable); b. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan dengan memadai terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR. <u>Faktor negatif:</u>		
c. Hasil <u>Faktor positif:</u> Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. <u>Faktor negatif:</u> Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum sepenuhnya tercapai sesuai target yang ditetapkan		
Hasil Penilaian Faktor 1	Nilai	Kondisi Penilaian
Nilai Faktor [1 2 3 4 5]	1	Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang baik.

m. Kesimpulan

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT. BPR ARTHA MUKTI SANTOSA

Posisi : 31 - 12 - 2024

[illegible]

Kesimpulan Akhir
Berisikan kesimpulan akhir penilaian pelaksanaan tata kelola yang dikaitkan dengan definisi nilai peringkat komposit.
Penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan bank perekonomian rakyat yang stabil dan berkelanjutan serta seiring dengan perkembangan inovasi produk dan teknologi informasi akan meningkatkan risiko pada bank perekonomian rakyat. Penerapan tata kelola di BPR Artha Mukti Santosa sepanjang tahun 2024 diberikan informasi 2, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Faktor Positif
Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur b. Proses c. Hasil a. Secara struktur, jumlah, komposisi dan persyaratan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi telah terpenuhi sangat memadai sesuai permodalan dan ketentuan; Pejabat Eksekutif Audit Internal dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah terpenuhi; Direksi tidak merangkap jabatan, namun terdapat rangkap jabatan pada posisi Dewan Komisaris; BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, audit internal, manajemen risiko, BMPK, tata tertib Direksi, dan Dewan Komisaris serta sistem teknologi informasi; penugasan AP KAP telah memenuhi seluruh aspek dalam mempertimbangkan penunjukan AP KAP; sistem pelaporan didukung sistem informasi manajemen yang memadai. b. Dilihat dari proses, Pemegang Saham mendukung penuh pengembangan BPR dimana pelaksanaan komunikasi visi dan misi melalui Dewan Komisaris dan/atau Direksi memadai; Pengambilan keputusan melalui RUPS dengan memperhatikan masukan dari pengurus dan pemegang saham lainnya; Direksi menjalankan tugas dan tanggungjawab secara memadai, seperti dalam hal penyediaan data dan informasi kepada pihak yang berhak, tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keputusan sesuai tata tertib Direksi, membudayakan pembelajaran yang berkelanjutan, tidak memiliki saham di BPR dan hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan anggota Direksi lain dan/atau Dewan Komisaris, menjaga integritas keuangan dan reputasi keuangannya; Dewan Komisaris bersifat independen tidak terlibat dalam keputusan kegiatan operasional BPR dan menyediakan waktu yang memadai untuk pelaksanaan tugasnya, meminta penjelasan Direksi atas kinerja, permasalahan dan kebijakan operasional, pengambilan keputusan secara mufakat, tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi.; Fungsi Kepatuhan: Direksi YMFK selalu berupaya memastikan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Fungsi Audit Intern: BPR berupaya secara memadai meningkatkan kompetensi PEAI; Penunjukan AP KAP berdasarkan RUPS atas rekomendasi Dewan Komisaris; BMPK: Kebijakan dan prosedur BMPK dikinikan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan serta pemberian kredit selalu memperhatikan BMPK; Integritas Pelaporan dan Sistem TI: BPR memperhatikan prinsip manajemen risiko dan tata kelola dalam penggunaan dan pemanfaatan TI, menyusun laporan keuangan publikasi secara triwulan dengan sangat memadai, menyusun laporan tahunan dengan sangat memadai, pelaksanaan perlindungan konsumen dengan sangat memadai seperti transparansi informasi produk dan layanan, penyusunan dan penyajian laporan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. c. Hasil penerapan tata kelola: Seluruh pemegang saham memperoleh hak dan kewajiban yang setara dan mendukung rencana pengembangan BPR melalui realisasi rencana kerja khususnya permodalan dan penggunaan dividen yang mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal BPR, Direksi telah menuangkan hasil rapat pada risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan memadai serta keputusan direksi mengikat dan menjadi tanggungjawab seluruh Direksi; Dewan Komisaris, hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan telah menyampaikan laporan terkait fungsinya secara tepat waktu; Seluruh jenjang organisasi menghindari adanya benturan kepentingan; Fungsi Kepatuhan, Direksi YMFK telah menyampaikan laporan kepada OJK secara memadai; Fungsi Audit Intern, BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK secara sangat memadai; Audit Eksternal, Hasil audit dan management letter telah menggambarkan kondisi BPR secara memadai serta cakupan hasil audit sesuai dengan ketentuan OJK; Manajemen Risiko, laporan profil risiko, laporan produk dan aktivitas baru disusun dan dilaporkan ke OJK dengan sangat memadai serta laporan strategi anti fraud BPR belum memiliki kewajiban untuk menyampaikan; BPR tidak pernah melakukan pelanggaran atas BMPK; Integritas Keuangan dan Sistem Teknologi Informasi, tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, laporan tahunan, laporan publikasi dan laporan pengaduan konsumen disampaikan secara tepat waktu dan memadai, jika ada kesalahan minor dapat segera diperbaiki; RBB dan perubahannya disampaikan sesuai ketentuan OJK
Faktor Negatif
Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola. a. Struktur b. Proses c. Hasil a. Secara struktur, Direksi telah memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi dengan cukup memadai; Direksi belum menyusun kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai; Dewan Komisaris: cukup memadai dalam melakukan pembelajaran dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahlian serta kurang memadai dalam menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris; Fungsi Audit Intern: PEAI telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja namun belum dikinikan serta kuantitas dan pelaksanaan audit dipenuhi secara cukup memadai; Integritas Pelaporan dan Sistem TI: BPR masih dalam proses penyusunan kebijakan dan prosedur integritas pelaporan. b. Secara proses, Pemegang Saham: pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris cukup memadai serta memastikan pelaksanaan tata kelola secara cukup memadai; Direksi: penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi dengan cukup memadai, tindak lanjut atas hasil audit atau pemeriksaan oleh eksternal dan internal cukup memadai, evaluasi pedoman dan tata tertib Direksi belum dilakukan, evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR belum dilakukan karena BPR belum menyusun kebijakan tersebut; Dewan Komisaris: secara cukup memadai telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko dan kebijakan strategis BPR serta kurang memadai dalam memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit baik dari internal maupun eksternal, evaluasi terhadap tata tertib kerja Dewan Komisaris belum dilakukan; Benturan kepentingan, pengungkapan dalam benturan kepentingan cukup memadai dimana terdapat transaksi benturan kepentingan namun tidak menimbulkan kerugian; Fungsi Kepatuhan: Anggota Direksi cukup memadai dalam mendorong terciptanya budaya kepatuhan serta PE Kepatuhan secara cukup memadai telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai pedoman kerja sistem dan prosedur kepatuhan; Fungsi Audit Internal: pedoman audit intern telah disusun dengan cukup memadai sesuai ketentuan OJK, BPR belum menugaskan pihak eksternal untuk melakukan kaji ulang terkait hasil kerja audit intern, pelaksanaan fungsi audit intern dinilai cukup memadai; Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud: PE Manajemen Risiko yang juga merangkap fungsi anti fraud, program APU PPT dinilai cukup memadai dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan manajemen risiko namun tidak melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaannya, BPR cukup memadai dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi, sistem informasi cukup memadai untuk menyediakan data dan informasi dalam rangka penyusunan pelaporan, Direksi dinilai cukup memadai dalam mengembangkan budaya risiko melalui pelatihan/sosialisasi; c. Hasil Penerapan Tata Kelola; Pemegang Saham secara memadai berupaya tidak melakukan benturan kepentingan, Pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi cukup memadai atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahlian Direksi dinilai cukup memadai, laporan tata kelola disampaikan secara cukup memadai; Dewan Komisaris: belum menyusun kebijakan remunerasi yang adil dan wajar bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta peningkatan kemampuan, pengalaman dan keahlian dinilai cukup memadai; Terdapat transaksi benturan kepentingan dengan nilai yang tidak menimbulkan kerugian BPR dan penanganan benturan kepentingan cukup memadai; pelanggaran BPR terhadap ketentuan mengalami peningkatan; BPR cukup memadai dalam mempresentasikan rencana dan realisasi audit tahunan sesuai ketentuan OJK; Realisasi rencana bisnis belum tercapai sesuai dengan rencana bisnis

Penyajian data dalam bentuk tabel, grafik dan gambar bertujuan untuk mempermudah pembacaan serta memperkuat transparansi informasi. Dengan demikian, pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja BPR secara objektif dan terukur.

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan usaha dan pengelolaan BPR Artha Mukti Santosa selama tahun buku 2024. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh nasabah, mitra kerja, pemegang saham, regulator, serta seluruh jajaran manajemen dan karyawan atas dukungan, kerja sama, dan dedikasi yang telah diberikan sepanjang tahun ini.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, BPR Artha Mukti Santosa tetap mampu menjaga kinerja yang sehat dan berkelanjutan, dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian serta komitmen terhadap pelayanan prima. Kami percaya bahwa dengan terus memperkuat fondasi operasional dan strategi yang adaptif, BPR Artha Mukti Santosa akan mampu menghadapi dinamika industri keuangan di masa mendatang.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kinerja, tantangan, serta arah strategis perusahaan ke depan.

Semarang, 25 April 2025
PT BPR Artha Mukti Santosa



Toto Wijatmiko
Direktur Utama

ARTHA MUKTI SANTOSA
pt. bank perekonomian rakyat
SEMARANG



Catur Budi Pamungkas
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Artha Mukti Santosa

Pelaporan

Laporan Tahunan Bank Perekonomian Rakyat

Nomor Referensi

933534-1-LTBPRK-R-A-20241231-010201-600854-05052025131633

Periode Data

2024

User ID Petugas Pelaporan

edp.bprams@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

29 / 29

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-05-05 13:16:33



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.